11/40605
40605.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2008

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

UNIVERSITAS TERBUKA

Disusun Oleh :

LA ODE PUASA
NIM: 014965668

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER SAINS DALAM ILMU ADMINISTRASI
BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Wakatobi Tahun 2008** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, ... 2011

Yang Menyatakan,



La Ode Puasa
NIM. 014965668

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LEMBAR PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER

Judul TAPM	: Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Wakatobi Tahun 2008
Nama	: La Ode Puasa
NIM	: 014965668
Program Studi	: MagisterAdministrasi Publik

Menyetujui:

Pembimbing I,

Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si.
NIP. 19561110 198501 1 001

Pembimbing II,

Dr. Deetje Sunarsih, M.Si.
NIP. 19541013 198503 2 001

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu/ Program Magister Sains dalam Ilmu Administrasi,

Dra. Susanti, M.Si.
NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana,

Suciati, M.Sc. Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER SAINS DALAM ILMU ADMINISTRASI
BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	: La Ode Puasa
NIM	: 014965668
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Judul TAPM	: Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Wakatobi Tahun 2008

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 20 Mei 2010
Waktu	: Pukul 19.00 - 21.00 Wita

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM:

Ketua Komisi Penguji	: Drs. Wawan Ruswanto, M.Si.	(.....)
Penguji Ahli	: M. Qudrat Nugraha, Ph.D.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Deetje Sunarsih, M.Si.	(.....)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang 15418
Telp. (021) 7490941 - Fax. (021) 7490147

BIODATA

Nama	: La Ode Puasa
NIM	: 014965668
Tempat dan Tanggal Lahir	: Onemay, 31 Desember 1960
Rergistrasi Pertama	: 2007
Riwayat Pendidikan	:

- SD Negeri Nomor 2 Waha Tomia Tamat Tahun 1972.
- SMEPN Waha Tomia, Tamat Tahun 1975.
- SPGN Bau-Bau, Tamat Tahun 1979.
- S1 Universitas Terbuka Jakarta, Tamat Tahun 1996.

Riwayat Pekerjaan :

- 1 September 1979 - 30 Juni 1996 Guru SDN 2 Timu KecamatanTomia
- 1 Juli 1996 - 08 Mei 1998 Guru SDN 1 Waha Kec.Tomia
- 09 Mei 1998 - 20 April 2003 Kepala SDN 2 Timu Kecamatan Tomia
- 21 April 2003 - 05 November 2004 Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Tomia
- 06 November 2004 - 19 Februari 2006 Kepala UPTD Diknas Kecamatan Tomia
- 20 Februari 2006 - 07 Mei 2006 Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Wakatobi
- 08 Mei 2006 - 18 Januari 2009 Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wakatobi
- 19 Januari 2009 hingga sekarang Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.

Alamat Tetap : Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Telepon : 0813 41877631

Wangi-Wangi, ...2011

La Ode Puasa
NIM. 014965668

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidyah-Nya sehingga penulisan tesis yang merupakan ungkapan pemikiran dan kajian mengenai *"Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi Tahun 2008"* dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat mencapai derajat kesarjanaan Strata 2 pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Kendari.

Paradigma perencanaan pembangunan *bottom up* merupakan salah satu solusi dalam memberdayakan masyarakat, agar berperan serta dalam menentukan arah gerak pembangunan daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada dasarnya bukan lagi hal yang baru sebagai sebuah kebijakan perencanaan mulai pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Namun pada kenyataannya pelaksanaan Musrenbang diberbagai tingkatan belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini memerlukan kajian mengapa Musrenbang yang selama ini sudah cukup lama berjalan, tetapi juga belum efektif sebagai wahana perencanaan dari bawah. Fenomena telah terjadi di Kabupaten Wakatobi, sehingga atas dasar ini penulis mencoba menelusuri melalui penelitian, guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat tentang efektivitas pelaksanaan Musrenbang.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si selaku pembimbing pertama dan Dr. Deetje Sunarsih, M.Si sebagai pembimbing kedua, yang dengan jerih payah telah membimbing dan menuntun saya dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik.

Terima kasih dan penghargaan pula kepada Rektor Universitas Terbuka, Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Kendari, serta para Tutor Tutorial Online maupun Tutor Tutorial Lokal, serta seluruh staf kantor Universitas Terbuka Pusat Jakarta dan UPBJJ Universitas Terbuka Kendari yang telah meluangkan waktu dan dukungan pikiran, mulai awal studi hingga tahapan studi saya berakhir.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi, dan masing-masing stafnya, para responden penelitian, serta teman-teman atau sahabat saya yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan baik semasa penelitian hingga penyusunan tesis ini.

Terkhusus kepada isteri Wa Ode Rusmi, anak-anak dan menantu serta cucu saya tercinta yang dengan sabar senantiasa memberikan doa dan semangatnya selama ayahanda menjalani studi. Kepada almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya kupersembahkan keberhasilan ananda untuk dapat menjadi kebanggaan keluarga.

Di akhir prakata ini saya berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan saya menyadari bahwa kekurangan dan keterbatasan senantiasa terletak pada diri kami, sehingga saya mengharapkan masukan yang sangat berharga, guna peningkatan kualitas yang mengarah kepenyempurnaan tulisan ini. Atas keikhlasan dan ketulusannya, Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua. Amiin.

Wangi-Wangi, ... 2011
Penulis,

La Ode Puasa
NIM. 014965668

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

ABSTRACT

The Effectivity Policy Implementation of
Development Planning Conference (DPC)
in Wakatobi 2008

La Ode Puasa

Universitas Terbuka

laodepuasa@yahoo.co.id

Key words: Development Planning Conference (DPC), effectivity implementation.

Development Planning Conference (DPC) basicly is not a new planning policy from village, subdistrict, and regency. In fact, the implementation of Development Planning Conference on the other level are not good.

The aims of this research is to describe policy effectivity in Wakatobi and the implication of *Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)* who have be success to get human aspiration and necessary.

The research method is quality description, with quetionare, interview, observation and documentation. It's to answer the problems research. This research is focused about how to process of Development Planning Conference with interview as an informant structurally and instructually with other secunder data.

The result research show, they are implementation of Development Planning Conference at Wakatobi from village, subdistrict and regency is not effective. They are ability dimention to identificate to many problems who have not been effective. So, the implementation of Development Planning Conference still be late. Certainly, the formulate to plan program completed, because have arranging estimation of base working. The result of Development Planning Conference can be helped at *Badan Perenacanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)* to accomodire on APBD because that's data is complicated.

On increase to implementation effectivity of Development Planning Conference Yearly, necessary to socialization about how to be doing Development Planning Conference step by step and it's need to have sinergity of stake holder on Development Planning Conference processing, so can be result from under to up level as the main idea.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERNYATAAN ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRACT v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR BAGAN x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori 11
1. Konsep Efektivitas 11
2. Konsep Perencanaan Pembangunan 14
3. Tujuan Perencanaan Pembangunan 19
4. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah 21
5. Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Partisipatif 23
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 28
7. Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat 34
B. Kerangka Berpikir 48
C. Definisi Konsep dan Operasional 50
1. Definisi Konsep 50
2. Definisi Operasional 50

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

BAB III METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian 52
B. Operasionalisasi Variabel 52
C. Populasi dan Sampel 54
D. Teknik Pengumpulan Data 56
E. Metode Analisis Data 57
F. Tempat dan Jadwal Penelitian 58
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Wakatobi 61
1. Kondisi Geografis 61
2. Wilayah Pemerintahan Kabupaten Wakatobi 63
3. Kependudukan 64
4. Ketenagakerjaan 71
B. Deskripsi Hasil Pengukuran Variabel Penelitian 77
1. Variabel Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 77
a. Dimensi Kemampuan Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan 75
b. Dimensi Partisipasi Masyarakat 81
c. Dimensi Ketepatan Waktu 86
d. Dimensi Keaktifan Peserta 88
e. Dimensi Ketepatan Rencana Rumusan Program 90
f. Dimensi Ketepatan Program Pembangunan 92
2. Variabel Hasil Musrenbang 94
a. Manfaat Musrenbang dalam Penyusunan APBD..... 94
b. Terserapnya Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat 99
1) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Wangi-Wangi 101
2) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Wangi-Wangi Selatan 103
3) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Kaledupa 106

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

4) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Kaledupa Selatan 108
5) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Tomia 110
6) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Tomia Timur 112
7) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Binongko 115
8) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Togo Binongko 117
9) Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 ... 118

C. Pembahasan Hasil Penelitian 121

1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 122
   a. Hubungan Dimensi Kemampuan Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang 122
   b. Hubungan Dimensi Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang 124
   c. Hubungan Dimensi Ketepatan Waktu terhadap Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang 126
   d. Hubungan Dimensi Keaktifan Peserta terhadap Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang 128
   e. Hubungan Dimensi Ketepatan Rumusan Rencana Program yang Diajukan oleh SKPD terhadap Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang 130
   f. Hubungan Dimensi Ketepatan Program Pembangunan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang 132
2. Hubungan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Wakatobi terhadap Manfaatnya dalam Penyusunan APBD ... 134
3. Hubungan Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 terhadap Penyerapan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat 136

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 142

B. Saran 143

DAFTAR PUSTAKA xiv

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 49

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	54
Tabel 3.2	Jadwal Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.....	60
Tabel 4.1	Pembagian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Wakatobi.....	63
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan Tahun 2005-2006	64
Tabel 4.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan Tahun 2006-2007	65
Tabel 4.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan Tahun 2007-2008	66
Tabel 4.5	Estimasi Penduduk Kabupaten Wakatobi Tahun 2009-2013.....	67
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2006	68
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk dan Persebarannya Menurut Kecamatan Kabupaten Wakatobi Tahun 2008	69
Tabel 4.8	Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Kelamin Dirinci Per Kecamatan Tahun 2008	70
Tabel 4.9	Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Dan Jenis Kelamin, Tahun 2006.....	72
Tabel 4.10	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Dan Jenis Kelamin, Tahun 2008.....	73
Tabel 4.11	Penduduk 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2006	74
Tabel 4.12	Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2008	75
Tabel 4.13	Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Pekerjaan.....	76

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.14	Distribusi Frekuensi Efektivitas Kemampuan Kerja Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan	78
Tabel 4.15	Distribusi Frekuensi Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang.....	82
Tabel 4.16	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Waktu Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten	86
Tabel 4.17	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Keaktifan Peserta Mengikuti Musrenbang.....	89
Tabel 4.18	Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Rumusan Rencana Program.....	90
Tabel 4.19	Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Program Pembangunan yang Ditetapkan	93
Tabel 4.20	Tanggapan Responden Mengenai Kegunaan Hasil Musrenbang dalam Menyusun Program Tiap SKPD, di Bappeda dan APBD....	97
Tabel 4.21	Tanggapan Responden Mengenai Terserapnya Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat Melalui Musrenbang pada APBD Kabupaten Wakatobi Tahun 2009.....	99
Tabel 4.22	Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Wangi-Wangi pada Tahun 2008	102
Tabel 4.23	Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada Tahun 2008	104
Tabel 4.24	Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Kaledupa pada Tahun 2008	106
Tabel 4.25	Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Kaledupa Selatan pada Tahun 2008	109
Tabel 4.26	Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Tomia pada Tahun 2008	110

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Tabel 4.27 Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Tomia Timur pada Tahun 2008 113

Tabel 4.28 Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Binongko pada Tahun 2008 115

Tabel 4.29 Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Togo Binongko pada Tahun 2008 menurut SKPD Sampel Penelitian 117

Tabel 4.30 Jumlah Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi menurut Kecamatan yang Terakomodasi melalui Pembiayaan APBD Tahun 2008 119

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisioner Penelitian xxi

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Dengan Para Informan Mengenai Efektivitas Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan di Kabupaten Wakatobi xxiv

Lampiran 3. Data Kajian Hasil Jawaban Responden Efektivitas Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan di Kabupaten Wakatobi xxvi

Lampiran 4. Transkrip Kutipan Hasil Wawancara Mengenai Efektivitas Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 xxviii

Lampiran 5. Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Tingkat Desa / Kelurahan dan Kecamatan xxxiii

Lampiran 5. Foto-Foto Saat Wawancara dengan Para Informan Tentang Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 xlx

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan proses pembangunan di segala bidang; ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan dan keamanan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan demokratis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan yang dilaksanakan mencakup serangkaian proses-proses yang berkesinambungan. Tahap awal dari proses pembangunan adalah perencanaan. Di dalam perencanaan, ditetapkan arah kebijakan, strategi, skala prioritas, program dan kegiatan-kegiatan indikatif lainnya untuk mencapai arah kebijakan tersebut. Dokumen-dokumen inilah yang mengarahkan ke proses pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Karena itu dapat dikatakan bahwa efektivitas perencanaan merupakan kunci dari keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dwidjowijoto (2003:67), berpendapat bahwa perencanaan yang baik dapat diidentikkan dengan sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Sepanjang pelaksanaannya konsisten dan pengendaliannya efektif maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menunggu waktu untuk sampai ke tujuan.

Kelemahan perencanaan telah lama disadari sebagai salah satu penyebab kurang optimalnya pencapaian arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Beberapa penulis berpendapat bahwa perencanaan pembangunan lebih merupakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

suatu dokumen keinginan dan harapan, bahkan hanya berupa rumusan tentang cita-cita sehingga dengan demikian kurang memungkinkan pelaksanaannya (Dwidjowijoto, 2003:67; Tjokroamidjojo, 1999:194).

Pendapat lain mengatakan bahwa perencanaan terkesan ambisius dan cenderung parsial (Kunarjo, 1992:12). Akibatnya, potensi wilayah dan modal sosial yang tersedia secara melimpah tidak dapat membawa perubahan struktur dalam masyarakat yang multidimensi (Dwidjowijoto, 2003:8).

Selain itu, proses pembangunan tidak secara efektif berpihak pada kaum miskin dan kelompok rentan, tidak secara signifikan memperbaiki kesejahteraan sosial dan akses terhadap layanan-layanan dasar, serta kurang memberdayakan pengembangan ekonomi daerah (Bappeda Provinsi Sultra, 2004:10).

Berbagai upaya penyempurnaan mekanisme perencanaan pembangunan telah ditempuh oleh pemerintah, baik sebelum maupun setelah otonomi daerah. Mekanisme perencanaan pembangunan dilakukan dengan sistem *bottom-up* atau perencanaan dari bawah, dimulai dari musyawarah pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kemudian Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) di tingkat kecamatan, Rakorbang di tingkat kabupaten/kota, seterusnya sampai Rakorbang di tingkat pusat. Setidaknya terdapat tiga undang-undang yang mengatur skenario perencanan pembangunan dengan sistem *bottom-up* tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Ketiga undang-undang tersebut di atas menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 0081/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ. Inilah skenario perencanaan dari bawah yang diharapkan dapat mengakomodasi dengan baik aspirasi seluruh komponen masyarakat karena pada hakekatnya masyarakat sendirilah yang mengidentifikasi masalah yang dihadapinya, kemudian mengusulkan alternatif kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Wakatobi menunjukkan adanya beberapa indikasi yang kurang sesuai dengan harapan. Disatu sisi upaya pemerintah daerah telah memberi peluang partisipasi masyarakat untuk mengusulkan rencana pembangunan, namun pada kenyataannya hanya sebatas pengusulan. Sehingga banyak usulan yang tidak ditindaklanjuti dengan menyetujui program yang diusulkan dari bawah melalui SKPD. Misalnya usulan beasiswa pendidikan tahun 2007 tidak direalisasikan, pada hal tercantum dalam usulan APBD. Contoh lain, adanya nuansa politik dalam perencanaan pembangunan yang dilakonkan oleh eksekutif dan legislatif, sehingga kepentingan dan aspirasi masyarakat sering terabaikan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi di bawah pengendalian mekanisme Musrenbang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah inilah yang mengkoordinasikan semua instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan yang tentunya berdasarkan target rencana tahunan yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD masing-masing instansi. Renja SKPD memuat program dan kegiatan yang dilengkapi tujuan, sasaran dan keluaran serta alokasi anggaran sebelum tahun berjalan dan tahun sesudahnya. Dokumen Renstra dan Renja tersebut dirumuskan oleh setiap SKPD Kabupaten Wakatobi dengan mengakomodasi sebagian kecil usulan masyarakat.

Hasil informasi yang diperoleh, menunjukkan bahwa dalam setiap Musrenbang di tingkat kecamatan, baik Bappeda maupun SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi mendapat sorotan dari masyarakat yang berpandangan bahwa forum mekanisme perencanaan melalui Musrenbang yang diadakan setiap tahun tidak bermanfaat karena usulan-usulan prioritas pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui forum Musrenbang dengan harapan akan terealisasi dalam Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (APBD) tahun yang akan datang ternyata sebagian besar tidak terealisir, (Hasil wawancara dengan beberapa Camat Kabupaten Wakatobi, November 2008). Pernyataan masyarakat tersebut dibenarkan oleh dua orang Kepala Bidang pada Bappeda Kabupaten Wakatobi ketika dikonfirmasi. (Bappeda Wakatobi, 2008).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Musrenbang adalah alat untuk menyeleksi kebutuhan melalui prioritasi kebutuhan. Hal ini harus ditanamkaan pada masyarakat maupun aparat di berbagai tingkat, bahwa baik dalam Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, maupun tingkat Kabupaten tidaklah dalam upaya membuat daftar panjang (*long-list*) usulan kegiatan pembangunan yang merupakan daftar keinginan yang tidak terukur dengan kemampuan pembiayaan. Mengingat keterbatasan kemampuan pembiayaan, Musrenbang seharusnya menghasilkan daftar pendek *(short-list)* usulan kegiatan pembangunan yang merupakan daftar prioritas kebutuhan. Oleh karena itu, penentuan usulan kegiatan prioritas harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan transparan.

Di sisi lain para SKPD juga menyatakan bahwa Musrenbang yang dilakukan selama ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, karena pembahasan anggaran berada pada tingkat legislatif yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, menentukan masuk tidaknya program yang sudah dianggarkan melalui hasil Musrenbang (Wawancara dengan Kepala Dinas Diknas, November 2008).

Bupati Wakatobi pada pidato Hari Ulang Tahun Wakatobi ke-4 (Tanggal 23 Desember 2007) menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Wakatobi sedang menghadapi persoalan dalam perencanaan pembanguanan, antara lain adalah belum terwadahinya usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam APBD Kabupaten Wakatobi.

Mencermati persoalan tersebut, kendala administrasi yang dihadapi Musrenbang sebagai instrumen partisipasi publik yang diakui secara hukum, akan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

memunculkan penegasan bahwa partisipasi publik yang difasilitasi oleh hukum nasional saat ini hanya sebatas perencanaan. Konsistensi perencanaan hingga proses penganggaran masih menjadi kekurangan, padahal dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif ada ruang publik yang terbuka dan adil tempat warga dan masyarakat sipil saling bernegosiasi untuk membicarakan kebijakan publik dan kemudian mengambil keputusan bersama mengenai alternatif kebijakan yang akan dipilih. Ruang publik ini dapat berupa forum, komite, maupun dewan warga. Melalui wahana ini, di satu sisi ada ruang bagi warga untuk mengorganisasikan diri secara *independent* dan di sisi yang lain ada wahana untuk menghubungkan aspirasi masyarakat sipil dengan pemerintahan. Dengan demikian, dalam kebijakan publik yang partisipatif masing-masing pihak tetap *independent*. Yang didorong adalah tingkat komunikasi dan pembuatan keputusan.

Proses-proses pembuatan kebijakan publik yang partisipatif, termasuk penyusunan rencana dan anggaran Kabupaten Wakatobi pada dasarnya terjadi pada ruang masyarakat sipil. Pada proses ini seyogyanya masyarakat mengkonsolidasi partisipan, mengagregasi kepentingan, memilih preferensi, memilih delegasi, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Ketika terjadi proses partisipatif di masyarakat, bukan berarti pemerintah diam. Pemerintah Kabupaten Wakatobi harus terlibat dalam proses tersebut. Hanya dalam proses ini pemerintah tidak bertindak sebagai wakil yang diberi mandat oleh rakyat melainkan menyediakan data dan informasi karena data sumber daya publik ada di pemerintah, melakukan asistensi teknis karena pemerintah memang memiliki keterampilan teknis perencanaan, dan melaksanakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

keputusan yang disepakati. Sedangkan legislatif dapat terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif sebagai bagian dari sesuatu yang tidak terpisahkan antara politik dengan konstituen.

Bastian (2006:99) menggambarkan permasalahan ini, sebagai berikut: Sampai di mana masyarakat dilibatkan secara legal, apakah hanya pada perencanaan atau hingga penganggaran? Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan proses penganggaran dimulai dari perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). KUA berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah produk akhir proses perencanaan pembangunan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Menurut UU No. 25/2004 ini dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, RKPD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya didasarkan proses Musrenbang. Pada titik ini, bisa disimpulkan bahwa Musrenbang merupakan satu tahap dalam proses perencanaan, sementara isi hanya sebagai pedoman dalam proses penganggaran, jadi bukan instrumen penganggaran. Ini menjadi pertanyaan besar apakah penganggaran partisipatif benar-benar secara tegas difasilitasi oleh produk hukum yang ada saat ini.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur hal secara berbeda. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi rujukan oleh RKPD, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sementara Undang-undang Nomor 32 Tahun

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2004 menyebutkan ditetapkan dengan Perda. Ini bukan persoalan yang sepele. Peraturan Kepala Daerah dan Perda memiliki konsekuensi keterlibatan politik yang berbeda. Peraturan kepala daerah lebih bernuansa teknokratis, sementara Perda bernunsa politik di mana keterlibatan publik diharapkan. Kedua kontroversi tersebut memunculkan pertanyaan yang lain: sampai di mana payung hukum memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat hingga penganggaran, tidak hanya perencanaan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan melalui Musrenbang di Kabupaten Wakatobi secara normatif belum sepenuhnya optimal, sampai batas mana masyarakat ikut menentukan program yang direncanakan, apakah sampai pada proses penentuan anggaran. Namun ini bukan persoalan yang difokuskan dalam penelitian ini.

Penelitian ini difokuskan pada efektifitas pelaksanaan kebijakan Musrenbang, berdasarkan adanya indikasi yang kurang sesuai, antara lain: pelibatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, banyaknya program yang kurang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang prioritas, adanya rumor bahwa Musrenbang hanya sekedar slogan perencanaan dari bawah, yang sebetulnya bukan (Sumber: Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Wakatobi, November 2008).

Hal ini menarik untuk dicermati, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi Tahun 2008.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Wakatobi tahun 2008?
2. Sejauhmana hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Wakatobi tahun 2008.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana hasil Musrenbang tahun 2008 mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Wakatobi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai upaya pengembangan konsep administrasi publik. Melalui penelitian ini diharapkan adanya temuan tentang pengembangan konsep dan kriteria keberhasilan perencanaan pembangunan melalui Musrenbang.
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam rangka pembinaan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat terbawah, guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Sebagai bahan masukan bagi para *stakeholders* perencana pembangunan di Kabupaten Wakatobi untuk mengevaluasi kembali efektivitas Musrenbang sebagai sarana artikulasi kebutuhan masyarakat
4. Sebagai bahan perbandingan ataupun acuan bagi penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu dari beberapa kata kunci dalam ilmu administrasi dan manajemen. Biasanya istilah efektivitas ini digunakan berdampingan dengan istilah efisiensi meskipun mempunyai pengertian yang berbeda (Handayaningrat, 1993:3).

Pengertian efektivitas yang dikemukakan dalam *Wikipedia Indonesia*, yakni kapabilitas untuk menghasilkan suatu efek. Dalam perkataan singkat, efektivitas adalah "mengerjakan hal yang benar". Kata ini berkaitan dengan efikasi (*efficacy*), yang berarti kemampuan untuk mnenghasilkan efek yang diinginkan dalam jumlah yang diinginkan, atau keberhasilan di dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Efikasi adalah "mengerjakan hal secara benar".

Atmosoeprapto (2001:4) mengemukakan bahwa efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran. Efektivitas berbeda dengan efisiensi, yaitu bagaimana kita mencampur berbagai sumber daya secara benar atau tepat. Sama dengan pengertian ensiklopedis di atas, Atmosoeprapto mengemukakan bahwa efektivitas dapat digambarkan sebagai "mengerjakan hal yang benar" sedangkan efisiensi adalah "mengerjakan hal secara benar". Efektivitas dan efisiensi yang tinggi akan menghasilkan produktivitas.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Siagian (2001: 24) memberikan definisi efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Miller (dalam Tangkilisan, 2005:138) mengemukakan bahwa efektivitas adalah tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini menurut Miller berbeda dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan.

Argiris (dalam Tangkilisan, 2005:139) mengemukakan definisi efektivitas sebagai keseimbangan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan, dan pemanfaatan kemanusiaan. Mardiasmo (2002:134) mengemukakan bahwa konsep efektivitas ini tidak melihat berapa besar biaya yang telah dikeluarkan. Biaya boleh jadi melebihi yang sudah dianggarkan, dua kali atau bahkan tiga kali lebih besar dari yang telah dianggarkan. Komaruddin (1994:269) mendefinisikan efektifitas sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tresiana (2006) dalam tulisannya *Telaah PP. No. 8 Tahun 2003* pada *Student Community of Public Administration Lampung University* mengemukakan efektivitas secara sederhana dapat diartikan "tepat sasaran" (bukan *off target*: salah sasaran). Efektivitas lebih diarahkan pada kebijakan, artinya program-program pembangunan yang akan dan sedang dijalankan ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat yang benar-benar memerlukannya dan akhirnya dapat menaikkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

produktivitas global rakyat yang akan berdampak pada meningkatnya investasi publik dalam bidang sosial, ekonomi dan meningkatnya investasi publik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.

Menurut Steers (1985:206), kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi meliputi:

a. Produktivitas,
b. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas,
c. Kepuasan kerja,
d. Kemampuan menciptakan laba, dan
e. Pencarian sumber daya.

Gerloff dalam Ndraha (1989:148) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur secara internal maupun eskternal.

a. Alat ukur efektivitas internal mencakup:
    1) Perputaran karyawan
    2) Ketidakhadiran
    3) Jumlah keluhan
    4) Sikap karyawan
    5) Iklim organisasi
    6) Komitmen karyawan
    7) Hubungan antarpribadi.
b. Alat ukur efektivitas eksternal terdiri dari:

    Kepuasan komunikasi karyawan dengan organisasi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

1) Kepuasan pemasok terhadap organisasi

2) Kepuasan konsumen

3) Kemampuan mengidentifikasi masalah dan peluang

4) Tanggung jawab sosial

5) Dampak lingkungan.

Berdasarkan pendapat para pakar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian efektivitas mencakup tingkat ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dengan menggunakan cara-cara yang paling optimal.

2. Konsep Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Perencanaan menurut Terry (dalam Hasibuan, 1993:95) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berbagai definisi perencanaan telah dikemukakan oleh para ahli. Moore dalam Hamzens (2005:6) mendefinisikan perencanaan sebagai segala sesuatu kegiatan pengambilan keputusan berkaitan dengan alokasi dan distribusi berbagai sumber daya.

Herujito (2001:84) mengemukakan bahwa perencanaan adalah keputusan terhadap apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Perencanaan berisi perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan menurut Lembaga

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Administrasi Negara (dalam Riyadi dan Bratakusumah, 2004:4) berarti memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus menerus.

Kast dan Rosenzweig (dalam Syafiie, 2004:75), mendefinisikan perencanaan sebagai suatu kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas keseluruhan usaha, sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan. Fungsi perencanaan adalah untuk menetapkan arah dan strategi serta titik awal kegiatan supaya dapat membimbing dan memperoleh ukuran yang dipergunakan dalam pengawasan agar tercegah pemborosan waktu dan faktor produksi lainnya.

Kunarjo (1992:7) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Kunarjo menyimpulkan bahwa perencanaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Berhubungan dengan hari depan
b. Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis, dan
c. Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Waterston (dalam Bryant dan White, 1989:306) menjelaskan bahwa perencanaan mencakup penghematan sumber daya langka oleh otoritas yang dibentuk oleh masyarakat banyak. Perencanaan juga mencakup upaya-upaya yang terorganisasi, sadar dan kontinyu untuk menemukan alternatif-alternatif terbaik yang dapat ditempuh guna mencapai tujuan-tujuan yang khusus.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi oleh institusi yang memiliki otoritas untuk menetapkan tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas serta serangkaian kegiatan indikatif untuk mencapainya.

Selanjutnya tidak semua perencanaan maupun rencana-rencana adalah suatu perencanaan pembangunan. Hamzens (2005:8) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kegiatan sosial yang berorientasi pada kepentingan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, dilakukan dengan teliti dan hati-hati, untuk mengembangkan strategi mencapai tujuan perubahan kondisi masyarakat agar menjadi lebih baik.

Tjokroamidjojo (1982:49) menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang membedakan suatu perencanaan secara umum dengan perencanaan pembangunan, yaitu terpenuhinya berbagai ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Adanya usaha mencapai tujuan-tujuan pembangunan tertentu ini merupakan ciri dari suatu perencanaan pembangunan. Tjokroamidjojo (1982:49) mengemukakan 9 ciri perencanaan pembangunan yaitu:

a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap. Hal ini dicerminkan dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju petumbuhan ekonomi yang positif;
b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Ciri ini adalah kelanjutan dari ciri yang pertama;
c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya Negara-negara baru berkembang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

struktur ekonominya berat ke sebelah agraris, dan ini mengakibatkan terdapatnya kelemahan-kelemahan konjungtural;

d. Perluasan kesempatan kerja. Kecuali menanggulangi adanya pengangguran dan pengangguran tak kentara di Negara-negara baru berkembang, juga diupayakan perluasan kesempatan kerja untuk menampung masuknya golongan usia kerja baru dalam kehidupan ekonomi;

e. Ciri lain dari suatu perencanaan pembangunan, yang menjadi kecenderungan setelah tahun 1960-an, adalah usaha pemerataan pembangunan. Seringkali disebut sebagai keadilan distributif. Pemerataan pembangunan ini ditujukan kepada pemerataan pendapatan antara golongan-golongan dalam masyarakat dan pemerataan pembangunan antardaerah dalam Negara. Pemerataan adalah dalam memikul beban pembangunan, bertanggung jawab atas tujuan, cara dan pelaksanaan pembangunan serta dalam memetik manfaat pembangunan;

f. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan;

g. Usaha sedemikian rupa supaya kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan kepada kemampuan nasional. Tidak sedikit negara-negara yang pada taraf permulaan pembangunannya memerlukan banyak bantuan luar negeri, sebagai komplemen kebutuhan bagi investasi yang diperlukan untuk membangun;

h. Terdapatnya suatu usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

i. Ada pula negara-negara yang mencantumkan sebagai tujuan pembangunan hal-hal yang fundamental/ideal atau bersifat jangka panjang. Misalnya saja perubahan struktural kelembagaan masyarakat, pola pemilihan dan pengusahaan faktor-faktor produksi berdasarkan orientasi keadilan sosial dan peningkatan kemampuan nasional, pembangunan bangsa dan pembangunan atau peningkatan kualitas hidup manusia.

Menurut Diana Conyers (1994:5), setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosial, karenanya dapatlah dianggap bahwa perencanaan sosial harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. Perencanaan jenis ini biasanya dipakai pemerintah atau badan lainnya guna mengatasi masalah perubahan ekonomi dan masalah sosial pada umumnya. Perencanaan ini dikenal dengan perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:6) adalah suatu tahapan awal proses pembangunan. Di mana sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan. Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya menyatakan bahwa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Ciri utama perencanaan pembangunan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai tujuan yang bersifat perubahan kearah yang lebih baik dalam hal kesejahteraan sosial ekonomi, keadilan dalam distribusi pendapatan, dan peningkatan kapasitas manusia.

3. Tujuan Perencanaan Pembangunan

Apa tujuan dilakukan perencanaan? Herujito (2001:85-86) menjelaskan bahwa maksud dan tujuan perencanaan antara lain sebagai berikut.

a. Mendorong pimpinan mulai dari eselon atas sampai eselon bawah untuk berpikir secara sistematis
b. Membantu pimpinan dalam melaksanakan koordinasi
c. Mendorong pemimpin eselon atas untuk menampilkan garis-garis besar haluan organisasi demi tercapainya tujuan
d. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap perkembangan dari apa yang direncanakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

e. Membantu pemimpin dalam menghadapi perkembangan di masa yang akan datang

f. Membantu terciptanya gambaran dan hubungan pertanggungjawaban dari masing-masing bagian organisasi.

Pendapat Herujito di atas menunjukkan bahwa perencanaan bukan saja dimaksudkan untuk memberikan arah kegiatan organisasi, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun akuntabilitas dan bahkan membangun pola pikir rasional dari pihak-pihak yang terkait didalamnya.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 2, ditegaskan mengenai tujuan perencanaan pembangunan yaitu:

a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Semenetara Hamzens (2005:130) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan diharapkan menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang bermutu yang akan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan, yang ditujukan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bagi pelanggan-pelanggannya. Pertanyaannya kemudian, siapa sajakah pelanggan-pelanggan pembangunan itu? Dalam konsep tata pemerintahan yang baik *(good governance)* pelanggan pembangunan itu adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pembangunan harus dinikmati oleh semua komponen bangsa.

Dari pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukan perencanaan pembangunan adalah untuk memberikan suatu kerangka kerja yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan, dan juga untuk membangun budaya berpikir rasional dan akuntabilitas antar pelaku pembangunan itu sendiri.

4. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan secara tuntas sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta terlingkup dengan satu paket yakni mekanisme anggaran. Aturan ini memuat proses pendekatan dalam perencanaan nasional dan daerah, yaitu:

a. Pendekatan politik
b. Pendekatan teknokratik
c. Pendekatan partisipatif
d. Pendekatan atas-bawah *(top-down)* ; dan
e. Pendekatan bawah-atas *(bottom-up)*.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sementara dalam saat yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

sama, aturan ini juga mensyaratkan masih diberlakukannya pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yakni dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yakni musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, kecamatan, provinsi, regional dan pusat/nasional. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yakni:

a. Penyusunan rencana

b. Penetapan rencana

c. Pengendalian pelaksanaan rencana, dan

d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Pada langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah daerah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana kerja termasuk agenda indikatif/estimasi anggaran biaya dari masing-masing program dan kegiatan. Bastian (2006:102) menyebutkan bahwa anggaran ini masih bersumber dari indikatif Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun akan datang dengan melihat secara cermat pencapaian realisasi APBD tahun sebelumnya. Atau dapat dikatakan bahwa total anggaran yang dibahas dalam forum Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten merupakan dana murni dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus atau Dana Perimbangan yang diperuntukkan untuk kabupaten.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang Dana Alokasi Desa masih sangat jauh dari harapan, walaupun di beberapa daerah otonom sudah menjalankan peraturan ini dengan baik. Produk hukum ini sesungguhnya dapat mendorong kemampuan masyarakat desa yang masih marjinal dan kurang berdaya untuk dapat melakukan rapat-rapat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap rancangan pembangunan secara mandiri dan bertanggungjawab.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Partisipatif

Pada point (1) huruf c pasal 68 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penerapan produk hukum ini dapat mempertegas pasal perencanaan secara partisipatif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 untuk dilaksanakan bukan secara formal/sebatas pemenuhan administratif, namun menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat untuk membuat perencanaan, mengalokasikan anggaran, dukungan sumber daya manusia, mekanisme kelembagaan lokal, penatausahaan keuangan, evaluasi dan monitoring hingga umpan balik untuk perbaikan hasil pada tahun selanjutnya. Jika mekanisme peraturan ini telah ditetapkan sebagai kebutuhan daerah, maka pihak pemerintah daerah dapat melakukan penguatan-penguatan kapasitas kepada aparatur desa/kelurahan atau masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini sebagai bagian dari proses partisipatif atau demokratisasi terhadap keberdayaan masyarakat desa.

Menurut Purnamasari (2008:1-2), untuk mencapai keberhasilan pembangunan masyarakat desa, maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya, merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan sejalan dengan pendapat Conyers (1994:154-155) yang mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap program kegiatan tersebut
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam penyelenggaraan pembangunan tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahapan perencanaan. Arif (2006:149-150) menambahkan, perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu Negara. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimilki masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (partisipatif). Dengan kata lain partisipasi masyarakat merupakan kata kunci agar suatu pembangunan berbias sukses.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Pusic (dalam Adi, 2001:206-207) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangan Pusic, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu:

a. Partsipasi dalam perencanaan

   Segi positif dari partsipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama, sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antarkelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Di sini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

   Segi positif dari Partsipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa tujuan penting program pembangunan dalam hal penilaian kebutuhan dan perencanaan secara partisipatif telah dilaksanakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pandangan Pusic di atas menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nampaknya belum lengkap guna menjamin kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan desa.

Selanjutnya Adi (2001:208) mengemukakan bahwa dalam perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, partisipasi masyarakat hendaknya juga meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan (non direktif), sehingga partisipasi masyarakat harus meliputi proses-proses berikut.

a. Tahap *Assesment*
b. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan.
c. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.
d. Tahap evaluasi (termasuk didalamnya evaluasi input, proses dan hasil).

Proses yang dimaksud adalah penekanan terhadap peran dan kapasitas fasilitator untuk mendefinisikan dan mendeteksi *stakeholder* secara tepat. Selain itu pula proses ini juga diarahkan untuk memformulasikan masalah secara kolektif, merumuskan strategi dan rencana tindak kolektif, serta melakukan mediasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya publik. Salah satu hal penting dalam

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

proses teknis ini adalah upaya pembangunan institusi masyarakat yang cukup legitimat sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan, argumen, dan ide menuju terbangunnya sebuah konsensus, sebagai awal tindak kolektif penyelesaian persoalan publik.

Pendekatan partisipatif dalam konteks apapun, termasuk dalam perencanaan, selalu dikaitkan dengan proses demokratisasi, dimana masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan masyarakat diharapkan dapat ikut dalam proses penentuan arah pembangunan. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan partisipatif.

Samsura (dalam Fitriastuti, 2005:40) mengemukakan bahwa dalam perencanaan partisipatif ditentukan oleh beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain adanya:

a. Upaya pelibatan seluruh *stakeholders*
b. Upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimat
c. Proses politik melalui upaya negosiasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*collective agreement*)
d. Usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi.

Pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat bersama-sama pihak terkait lainnya dalam berbagai tahapan pembangunan akan menghasilkan konsensus dalam kebijakan pembangunan, dan sekaligus melatih masyarakat menjadi lebih pandai khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Perencanaan partisipatif lebih

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

diartikan sebagai sebuah alat pengambilan keputusan yang diharapkan dapat meminimalisasi konflik antar *stakeholder*. Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen pembelajaran masyarakat (*social learning*) secara kolektif melalui interaksi antar seluruh pelaku pembangunan atau *stakeholders* tersebut. Pembelajaran ini pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas seluruh *stakeholders* dalam upaya memobilisasi sumber daya yang dimilikinya secara luas, sehingga perencanaan partisipatif selain sebagai proses politik juga merupakan proses teknis.

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Perencanaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Kunarjo (1992:9), mengemukakan dua jenis perencanaan dilihat dari segi arus informasi, yaitu:

a. Perencanaan dari atas ke bawah, yaitu perencanaan yang sasarannya ditetapkan dari tingkat atas (nasional atau pusat)

b. Perencanaan dari bawah ke atas, yaitu perencanaan diusulkan dari bawah (daerah) berdasarkan penilaian dan perhitungannya sendiri.

Perencanaan yang menjadi fokus penelitian ini adalah perencanaan dari bawah. Dalam proses ini, para *stakeholders* pada tingkat administrasi pemerintahan terbawah menyepakati rencana kegiatan tahunan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya melalui forum Musrenbang tingkat desa dan kelurahan. Kesepakatan tentang rencana kegiatan ini diusulkan secara berjenjang untuk dibahas dalam forum Musrenbang tingkat kecamatan dan kota sebagai daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Hamzens (2005:26) menjelaskan bahwa perencanaan dari bawah *(bottom up ward planning)* muncul sebagai kritikan terhadap perencanaan dari atas. Melihat terjadinya dampak negatif perencanaan dari atas ke bawah maka lahirlah sistem perencanaan dari bawah ke atas. Metode perencanaan dari bawah ke atas memperlihatkan besarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, masyarakat yang merencanakan dan membuat pilihan untuk kehidupan mereka.

Pendekatan perencanaan dari bawah lazim juga disebut sebagai perencanaan partisipatif. Gagasan dasar dari perencanaan partisipatif menurut Koerten dan Sjahrir (1988:225) adalah usaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan kreatif dari semua partisipan. Ideologi dari paradigma ini adalah pembebasan yang dikemukakan oleh Paulo Freiro. Menurut ideologi ini, yang terpenting bagi kaum tertindas adalah proses penyadaran, yaitu proses penumbuhan kesadaran kritis dalam dirinya untuk mengontrol lingkungannya. Ini berarti individu menganalisis sendiri masalahnya, mengidentifikasi penyebabnya, dan memutuskan sendiri apa kebutuhannya, bukan dianalisis dan diputuskan oleh para pakar atau agen pembangunan.

Realitas perencanaan pembangunan dengan sistem *bottom-up* atau perencanaan dari bawah di berbagai daerah bervariasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rivai Nur dkk. pada beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, Riau, dan Jawa Timur menemukan bahwa perencanaan dan penganggaran yang disusun menurut mekanisme *bottom up planning* tidak sesuai dengan harapan masyarakat (Rivai Nur dkk., 2004: 63).

Perencanaan pembangunan dari bawah mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 1181/2006 dan 050/2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Tahun 2006. Berdasarkan surat edaran dimaksud, pemerintah daerah menyusun rancangan rencana kerja pemerintah daerah melalui forum Musrenbang. Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* pemerintah daerah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Adapun tujuan Musrenbang adalah:

a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya
b. Menetapkan prioritas kegiatan yang diajukan untuk dibahas mulai hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan, dan masing-masing SKPD.

Surat Edaran Bersama juga memuat hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yaitu:

a. Daftar permasalahan seperti peta kerawanan kemiskinan dan pengangguran
b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
c. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya
d. Daftar prioritas masalah dan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan sebagainya
e. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksananya serta rencana pendanaannya.

Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terpadu, menyeluruh, sistematik, yang tanggap terhadap perkembangan jaman, yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 1

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

menyatakan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Undang-undang tersebut juga menjelaskan empat tahap proses perencanaan pembangunan, yakni:

1. Penyusunan Rencana

   Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah: (1) Penyiapan rancangan pembangunan yang bersifat teknokratif, menyeluruh, dan terukur. (2) Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rencana kerja dengan berpedoman rancangan pembangunan yang telah disiapkan. (3) Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali penyelenggaraan Musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. (4) Penyusunan akhir rencana pembangunan, langkah ini berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten.

2. Penetapan Rencana

   Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ditetapkan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sebagai Peraturan Kepala Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

   Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Selain dasar pemikiran di atas, Agung (2004:178) mengemukakan penyusunan Perda yang dibagi dalam tiga tahap, sebagai berikut.

a. Tahap inisiasi, dengan langkah operasional meliputi:
   1) Identifikasi dan inventarisasi aspirasi masyarakat dan isu strategis.
   2) Pengecekan preferensi politik masyarakat dalam pembuatan kerangka regulasi
   3) Penetapan agenda daerah sebagai dasar prioritas penyusunan Perda.

b. Tahap sosio-politis, dengan langkah operasional, meliputi:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

1) Penyusunan, persetujuan dan pembagian tugas penyusunan Raperda antara DPRD dan pemerintah daerah
2) Penyusunan draf akademis untuk peraturan perundang-undangan yang diprioritaskan
3) Pematangan draf akademis melalui sosialisasi dan diskusi publik (termasuk pengecekan konsistensi terhadap kerangka regulasi nasional dan daerah).

c. Tahap yuridis, dengan langkah operasional sebagai berikut.

1) Penyusunan Raperda oleh alat kelengkapan DPRD yang ditugasi
2) Pembahasan dan penetapan Perda dalam sidang-sidang DPRD sesuai dengan ketentuan tata tertib (termasuk partisipasi masyarakat)
3) Penyerahan kepada pemerintah daerah untuk disahkan, disosialisasikan dan dilaksanakan
4) Sinkronisasi lanjutan terhadap kerangka dan substansi regulasi nasional
5) Revisi Perda sesuai dengan rekomondasi dan/atau perkembangan politik daerah
6) Pembatalan dan pencabutan Perda jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

Tahapan-tahapan tersebut, ada kemiripan beberapa tahapan dan pelaksanaan Musrenbang yang dapat dijadikan kerangka acuan dalam membuat kebijakan publik (Perda). Dengan mengikuti tahapan tersebut, maka aspirasi masyarakat dapat dijaring dengan baik dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat

Aspirasi adalah kehendak atau keinginan yang keras untuk mendapatkan sesuatu (Kamus Ilmu-ilmu Sosial: Reading, 1994). Lebih lanjut dijelaskan, aspirasi masyarakat sangat beraneka ragam, baik karena jumlah rakyat yang besar maupun karena masyarakat terdiri dari berbagai lapisan yang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Aspirasi masyarakat dapat berwujud material seperti: sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan sebagainya maupun yang bersifat spiritual seperti pendidikan, kebebasan, keadilan, keagamaan, dan sebagainya, dan kadang-kala keinginan tersebut bertentangan satu sama lainnya.

Oleh karena aspirasi masyarakat adalah suatu keinginan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan, dan karena berpemerintahan adalah menyangkut tentang hubungan politik antara pemerintah dan masyarakat, maka penyaluran aspirasi masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam proses politik pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan partisipasi sebagai wujud penyaluran aspirasi masyarakat, perlu dipahami apa dan bagaimana partisipasi itu. Tjokrowinoto (1994:23) berpendapat, partisipasi adalah penyebaran mental dan energi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikiran dan perasaan bagi terciptanya tujuan bersama serta bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut.

Davis (dalam Sastropoetro, 1988:13) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab atas usaha yang bersangkutan. Tiga unsur penting dalam partisipasi adalah (1) keterlibatan jasmaniah, mental dan perasaan, (2) kesediaan memberi sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok. Ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok, (3) tanggung jawab merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota artinya ada *sense of belonging*.

Pendapat di atas memberikan pemahaman bahwa partisipasi adalah keikutsertaan atau penyertaan pikiran dan energi di dalam situasi kelompok guna tercapainya tujuan-tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang diprogramkan. Konsepsi tersebut memberikan gambaran bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan keterlibatan mental, pikiran, dan perasaan seseorang dalam suatu kegiatan bersama, lebih dari sekedar keterlibatan jasmaniah. Partisipasi juga merupakan kesediaan seseorang untuk memberikan suatu sumbangan pada usaha mencapai tujuan kelompok. Artinya bahwa seseorang memberikan sumbangan disebabkan karena ada rasa tanggung jawab apa yang disumbangkan pada kelompok.

Dari beberapa pengertian di atas, menunjukkan adanya 3 unsur yang menjadi penekanan dalam partisipasi yaitu:

a. Keterlibatan mental dan emosi individu anggota kelompok yang harus diwujudkan dalam bentuk kerjasama
b. Mempunyai semangat atau keberanian memberikan dukungan dalam rangka pencapaian tujuan, berupa barang, jasa dan uang
c. Dilandasi tanggungjawab dalam kegiatannya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan ketiga asumsi tersebut diperoleh pemahaman bahwa partisipasi adalah keterlibatan atau penyertaan mental, pikiran dan perasaan serta energi (fisik) seseorang dalam situasi kelompok guna tercapainya tujuan-tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang ditentukan tanpa mengorbankan diri sendiri.

Lebih lanjut Davis, (dalam Sastropoetro 1988:16), menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dibedakan dalam enam jenis, yaitu:

a. Partisipasi pikiran (*psychological participation*)
b. Partisipasi tenaga (*physical participation*)
c. Partisipasi pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*)
d. Partisipasi keahlian (*participation with skill*)
e. Partisipasi dalam bentuk barang (*material participation*)
f. Partisipasi dalam bentuk uang (*money participation*).

Koentjaraningrat (1995:79) berpendapat bahwa, seringkali partisipasi rakyat yang intensif disamakan dengan frekuensi ikutsertanya rakyat dalam aktivitas bersama. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda. *Pertama*, partisipasi dalam bentuk aktivitas-aktivitas bersama; *Kedua*, partisipasi sebagai individu di luar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

Lebih lanjut Koentjaraningrat (1995:79), menjelaskan bahwa tipe pertama, rakyat dipersuasi, diperintah atau dibujuk untuk berpartisipasi agar menyumbangkan tenaga dan hartanya guna membangun proyek-proyek pembangunan yang biasanya bersifat fisik. Sedangakan tipe kedua adalah partisipasi rakyat didasarkan pada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kemampuan sendiri, dapat berarti bahwa kalau rakyat ikut serta di dalam proses pembangunan itu hanya atas kesadarannya dan keyakinannya, sehingga mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas yang tinggi. Sebaliknya jika rakyat dipaksa untuk ikut serta dalam pembangunan maka mereka akan ikut serta dengan terpaksa pula.

Abe (2002:81) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif. Perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

Berorientasi pada kepentingan pembangunan, sebagian sarjana sosial berpandangan bahwa wujud partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan nyata seluruh anggota masyarakat dalam memikul beban pembangunan, tanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan dan penerimaan kembali hasil-hasil pembangunan.

Tjokroamidjojo (1994:222-223), membagi partisipasi ke dalam tiga jenjang keterlibatan, yaitu:

a. Keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah
b. Keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
c. Keterlibatan memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Geddesian (dalam Soemarmo, 2005:26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Geddesian juga menambahkan bahwa, keterlibatan masyarakat yang dimaksud dapat berupa:

a. pendidikan melalui pelatihan
b. partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi
c. partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Cohen dan Uphoff, (dalam Syamsi, 1986:138) megemukakan bahwa pengertian partisipasi banyak yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

   Partisipasi yang dimaksud dalam hal ini adalah partisipasi dalam penentuan rencana pembangunan yang dapat dilihat dari aspek: frekwensi menghadiri rapat dalam penentuan rencana, tindakan yang dilakukan dalam rapat yaitu menyumbangkan ide, gagasan, usul, saran, tanggapan atau kritik terhadap hal yang diperbincangkan serta ikut memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang telah ditetapkan, yang dapat dilihat dari aspek: keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan, dan keikutsertaan dalam membantu pembiayaan/dukungan berupa material (uang dan bahan) serta informasi yang berguna.

c. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil.

Partisipasi dalam memanfaatkan hasil yang dimaksudkan adalah menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

d. Partisipasi dalam penilaian hasil pembangunan.

Partisipasi dalam penilaian yang dimaksudkan adalah keikutsertaan dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang dapat dilihat dari tanggapan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Bryant dan White, (dalam Ndraha 1998:102) menyebutkan ada dua macam partisipasi, yakni:

a. Partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal

b. Partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dan atasan, antara klien dengan patron, dan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama partisipasi vertikal.

Berbagai pendapat tentang partisipasi yang terurai di atas, menunjukkan bahwa pada intinya partisipasi adalah keikutsertaan individu atau kelompok masyarakat, baik penyertaan pikiran maupun energi di dalam situasi kelompok guna tercapainya tujuan-tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang diprogramkan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam kaitan partisipasi dengan pembangunan, Bryant dan White (1998:268) mengemukakan bahwa, pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses itu. Keterlibatan tersebut dalam keseluruhan proses pembangunan akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berinisiatif dan menggali berbagai potensi sumber daya yang mereka miliki demi pencapaian tujuan-tujuan proyek dalam memenuhi sendiri kebutuhan mereka.

Kartasasmita (1997:57), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukan sendiri.

Secara lebih komprehensif, Tjokrowinoto (1997:48) mengemukakan beberapa alasan pembenaran pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan, yaitu:

a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan
b. Partisipasi menumbuhkan rasa harga diri dan kemampuan peribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat
c. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap
d. Pembangunan lebih baik dilaksanakan dengan dimulai dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki
e. Partisipasi memperluas zona (kawasan) penerimaan proyek pembangunan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

f. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat

g. Partisipasi menopang pembangunan

h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia, dan

i. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan daerah.

Berdasarkan konsepsi di atas, jelas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dan berhubungan langsung dengan kepentingan pelaksanaan pembangunan, dan karena itu menjadi salah satu faktor fundamental dalam menyukseskan pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan.

Dengan demikian, untuk menjamin keberhasilan pembangunan maka partisipasi masyarakat harus digerakkan, karena tanpa ada partisipasi pembangunan biasanya tidak berkelanjutan, karena masyarakat tidak mempunyai perasaan memiliki (*sense of belonging*) terhadap hasil pembangunan. Dalam berbagai studi empiris menyatakan bahwa kegagalan pembangunan akibat tidak adanya partisipasi masyarakat dan bahkan masyarakat banyak menentang upaya pembangunan.

Kegagalan pembangunan daerah banyak disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kartasasmita (1997:57), pelaksanaan pembangunan tanpa partisipasi akan berimplikasi pada:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

a. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil, tidak menguntungkan rakyat banyak
b. Rakyat kurang memahami maksud dan tujuan pembangunan yang dilakukan
c. Pembangunan bertujuan untuk menguntungkan rakyat banyak dan rakyat memahaminya tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman
d. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat tidak dilibatkan.

Selanjutnya, Kartasasmita (1997:57-58) mengingatkan bahwa tugas manajemen pembangunan harus menjamin bahwa pembangunan:

a. Menguntungkan rakyat
b. Harus dipahami maksudnya oleh rakyat
c. Harus mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya, dan
d. Dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, jujur, terbuka, dan dapat di pertanggungjawabkan.

Menurut Hetifah (2004:128), bahwa berbagai pengalaman pembangunan daerah menunjukan bahwa tanpa partisipasi masyarakat menyebabkan:

a. Pemerintah daerah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan masyarakatnya.
b. Investasi yang ditanamkan di daerah tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan warga masyarakat.
c. Sumber daya publik yang langka tidak digunakan secara optimal.
d. Sumber daya masyarakat yang potensil untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat daerah tidak tertangkap.
e. Standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana yang tidak tepat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berbagai pandangan di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan pembangunan, terutama dalam proses perumusan/perencanaan kegiatan/program dan dalam proses pelaksanaan rencana/program adalah merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan pembangunan secara menyeluruh, dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahtraan masyarakat sebagai obyek dan sasaran akhir dari penyelenggaraan pembangunan.

Selanjutnya, Mubyarto (1994:67) mengemukakan adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu: umur, pendidikan, pemilikan dan penguasaan tanah, kekayaan dan jenis pendidikan.

Dilain pihak Mikkelsen (2001:65), menyebutkan bahwa secara garis besar ada dua pendekatan dalam hal partisipasi, yaitu: (1) partisipasi datang dari masyarakat sendiri, merupakan tujuan dalam proses demokrasi. Namun demikian sedikit saja masyarakat yang mau melakukan pendekatan partisipasi secara sukarela dalam kegiatan pembangunan; (2) partisipasi dengan motivasi positif yang bersifat memaksa. Dengan pendekatan ini masyarakat dipaksa untuk melakukan partisipasi dalam pembangunan dengan motivasi agar dapat melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan secara lebih baik. Selanjutnya disebutkan bahwa partisipasi dapat dilaksanakan dengan tingkat paksaan dan sukarela yang berbeda-beda, serta tingkat keaktifan masyarakat yang berbeda pula. Namun demikian, guna mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi aktif dan sukarela merupakan hal ideal yang harus diupayakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bintoro, (dalam Syamsi 1986 : 147) mengemukakan bahwa berhasil tidaknya pembangunan pada umumnya tergantung pada beberapa faktor, yaitu: segi politik, sosial budaya dan ekonomi. Itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi seluruh rakyat dalam suatu negara.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bintoro, bahwa: *Pertama,* faktor politik dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, karena politik pada dasarnya adalah pengaturan tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh individu masyarakat dalam proses pembangunan dari suatu Negara (hak dan kewajiban). Faktor politik menentukan dapat tidaknya masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan, termasuk dalam menilai atau mengevaluasi proses pelaksanaan pembangunan. *Kedua,* faktor sosial budaya dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, karena faktor tersebut menyangkut tentang pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan (sosial), dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dari suatu kelompok masyarakat (budaya). *Ketiga,* faktor ekonomi terutama pendapatan dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, karena ekonomi merupakan suatu sumber kekuasaan atau pendukung bagi kemapanan setiap individu.

Mengingat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan dari suatu Negara dan daerah, termasuk dalam proses perumusan kebijakan daerah melalui suatu keputusan atau peraturan daerah adalah merupakan suatu strategi atau pendekatan pembangunan, dan sebagai suatu strategi dapat berarti suatu kebijakan. Edwards III (dalam Panggabean 2004:14-15) menyebutkan ada empat faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan: *Pertama,* Faktor komunikasi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dapat berpengaruh karena pelaksana partisipasi yaitu masyarakat perlu mengetahui apa hak dan kewajiban mereka dalam proses pembangunan. Untuk itu pemerintah selaku penggerak utama pembangunan dan pemegang kewenangan perlu meneruskan berbagai informasi pembangunan secara jelas, tepat dan konsisten kepada masyarakat. *Kedua,* struktur birokrasi dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, karena berbagai kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan tidak akan berhasil baik jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan, termasuk aturan main dan mekanisme kerja yang memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam setiap kegiatan pembangunan. *Ketiga,* faktor sumber daya dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, karena sumber daya merupakan potensi setiap individu untuk dapat berperan aktif, seperti: pengetahuan, pendidikan, ekonomi (pendapatan), dan keterampilan. *Keempat,* faktor disposisi (kecenderungan) dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, karena faktor disposisi menyangkut tujuan atau orientasi program, apakah bermuara pada kepentingan atau kebutuhan masyarakat.

Mengingat kompleksnya faktor yang dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat terutama partisipasi masyarakat dalam penyampaian ide (partisipasi pikiran) berkaitan dengan penyampaian aspirasi masyarakat sebagaimana terurai di atas, maka untuk kepentingan kajian ini faktor-faktor yang hendak diamati adalah yang dikemukakan oleh Panggabean, khususnya faktor: sumberdaya, struktur birokrasi, dan faktor disposisi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Pedoman Penyelanggaraan Musrenbang yang digagas AIPRD LOGICA *(An Australian Goverment AusAID Initiative)* (2007:14-16), menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan jiwa dari pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang memberdayakan adalah pembangunan yang membebaskan masyarakat dari ketergantungan atas pelayanan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu partisipasi dalam pembangunan harus melalui penumbuhan kemauan, kemampuan, dan rasa percaya diri masyarakat. Pola pembangunan partisipatif adalah pola pembangunan yang mendudukkan masyarakat, baik secara individu atau kelompok, sebagai pelaku utama dan penentu keputusan dan tindakan pembangunan. Karena kapasitas masyarakat juga sangat beragam, maka pembangunan harus didasarkan pada:

1. Aspirasi masyarakat (kebutuhan masyarakat)
2. Kepentingan masyarakat
3. Kemampuan masyarakat
4. Upaya atau kemauan masyarakat.

Pedoman tersebut juga mengemukakan bahwa pembangunan partisipatif akan berhasil apabila dalam pelaksanaannya dilandasi dengan azas-azas yang merupakan satu kesatuan yang terpadu, sebagai berikut.

1. Azas Solidaritas

   Keterpaduan kegiatan pembangunan dari berbagai pembangunan menjadi jelas, sehingga untuk apa dan untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan, dapat dijawab dengan tegas. Solidaritas ini tidak saja dituntut

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

antar anggota kelompok masyarakat tetapi antara masyarakat dan kerabat kerja pembangunan lainnya.

2. Azas Partisipasi

Para pelaku pembangunan yang terkait haruslah bertindak secara aktif, sehingga terciptalah pola pembangunan partisipatif dengan berlandaskan tekad yang disepakati bersama.

3. Azas Kemitraan

Dalam kegiatan pembangunan partisipatif, masyarakat seharusnya menjadi pelaku utama dan penentu. Artinya aspirasi, kepentingan, kemauan, dan kemampuan masyarakatlah yang menjadi landasan pembangunan. Oleh karena itu peran para pelaku pembangunan lainnya haruslah ditempatkan sebagai mitra sejajar. Interaksi yang terjadi adalah interaksi antar pihak yang setara meskipun berbeda fungsi, sehingga terbentuklah kerabat kerja pembangunan seperti kerja sama yang lazim terjadi dalam satu organ.

4. Azas Memampukan

Meskipun masyarakat menjadi pelaku sentral dan penentu, tidak akan berhasil dengan baik bila tidak ada kontribusi dari pelaku pembangunan lainnya. Lebih-lebih bila kelompok masyarakat yang dimaksudkan adalah kelompok masyarakat rentan: berpenghasilan rendah dan tingkat pendidikannya juga relatif rendah, atau sumberdaya personal dan kolektifnya kurang memadai. Dengan demikian maka peran pelaku pembangunan lainnya masih sangat diharapkan sebagai pendamping

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang memampukan, agar pembangunan yang ingin dicapai oleh masyarakat melalui pola partisipatif ini bisa terwujud.

5. Azas Pemerataan

Pembangunan partisipatif harus menekankan pemerataan peran pelaku pembangunan secara aktif dalam memanfaatkan peluang pembangunan bagi semua masyarakat, termasuk masyarakat miskin.

Berbagai macam pemikiran tentang konsepsi partisipasi masyarakat terurai di atas, menunjukkan bahwa betapa kompleks dan luasnya tanggungjawab serta peran masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun untuk kepentingan kajian ini, konsepsi atau bentuk partisipasi yang hendak diamati adalah partisipasi dalam bentuk pikiran. Bentuk partisipasi ini ditetapkan sebagai fokus kajian karena bentuk ini merupakan wahana di dalam penyaluran aspirasi/keinginan-keinginan masyarakat.

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan konteks latar belakang dan uraian kajian teoritik dalam penelitian ini, maka dapat dipertegas bahwa dasar pikirannya terletak pada optimalisasi pendekatan partisipatif penyelenggaraan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan, dimana masyarakat desa/keluarahan harus mendapat fasilitasi atau dampingan yang kuat dalam rangka mengarahkan rencana-rencana prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi Tahun 2008, penulis memodifikasi dari berbagai konsep yang telah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

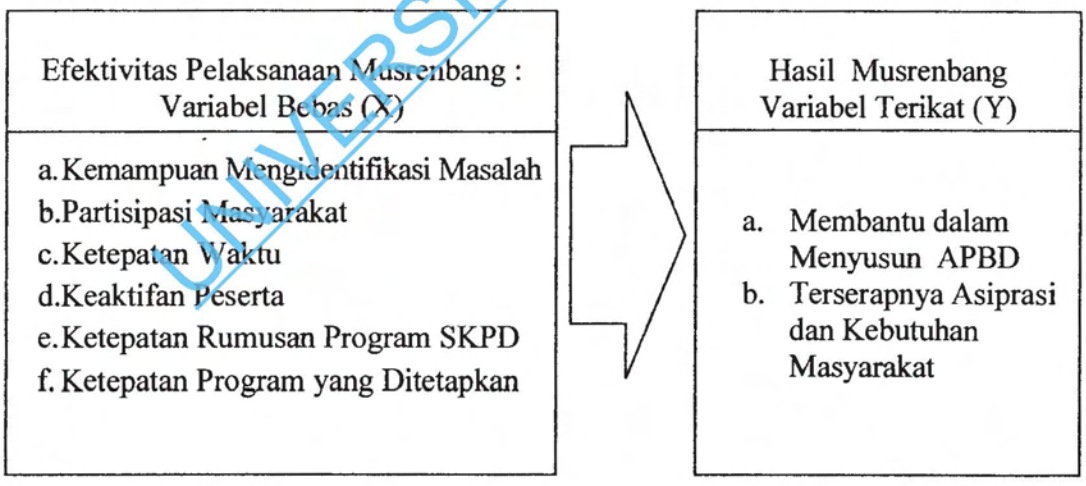
dikemukakan di atas. Unsur-unsur pokok yang menjadi parameter guna keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Kemampuan mengidentifikasi masalah
b. Partisipasi masyarakat
c. Ketepatan waktu
d. Keaktifan peserta
e. Ketepatan rumusan program SKPD
f. Ketepatan program yang ditetapkan

Sementara hasil Musrenbang dalam penelitian ini dinilai dari dua aspek, yakni :

a. Bermanfaat dalam menyusun APBD
b. Terserapnya aspirasi dan kebutuhan masyarakat

Berdasarkan pendapat dari berbagai pakar di atas, maka dibuatlah kerangka berpikir penelitian sebagai berikut.



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Definisi Konsep dan Operasional

1. Defenisi Konsep

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah Forum Musyawarah Tahunan Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Bappeda untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yang bertujuan menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya, menetapkan prioritas program dan kegiatan yang diajukan untuk dibahas mulai Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan, dan tingkat SKPD.

b. Efektivitas pelaksanaan Musrenbang adalah terselenggaranya pelaksanaan Musrenbang sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terserap dalam anggaran.

c. Hasil Musrenbang adalah rangkuman berbagai usulan rencana program pembangunan yang diperoleh dari pelaksanaan Musrenbang dalam upaya mengakomodasi program dan kegiatan kebutuhan dalam menyerap aspirasi masyarakat baik materil maupun nonmateril.

2. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional penelitian ini sebagai berikut.

a. Efektivitas pelaksanaan Musrenbang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: kemampuan mengidentifikasi masalah, partisipasi masyarakat, ketepatan waktu, keaktifan peserta, ketepatan program dan kesesuaian usulan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

program dari bawah. Variabel ini mempunyai 6 dimensi yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut.

1) Kemampuan mengidentifikasi masalah yaitu kemampuan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan survei, memformulasi dan memperoleh data yang menjadi bahan perencanaan
2) Partisipasi masyarakat adalah sejauhmana masyarakat diberi kesempatan dan keaktifan dalam proses perencanaan pembangunan khususnya pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
3) Ketepatan waktu, yakni pelaksanaan Musrenbang sesuai tahapan dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku
4) Keaktifan peserta adalah keaktifan dalam mengikuti musrenbang, memberikan saran/pendapat dan merumuskan hasil musrenbang.
5) Ketepatan rumusan rencana program adalah program yang dihasilkan dari Musrenbang sesuai dengan skala prioritas, kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan program pembangunan
6) Ketepatan program adalah sejauhmana program yang ditetapkan sesuai kebutuhan, mudah dilaksanakan, sesuai usulan dari bawah.

b. Hasil Musrenbang adalah rencana program yang dihasilkan dan ditinjau dari aspek manfaat yang membantu sebagai dasar pedoman penyusunan APBD, dan terserapnya program dan kegiatan aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik materil maupun nonmateril.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan mengguanakan analisa sederhana. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi dan situasi, atau berbagai variabel yang menjadi obyek penelitian berdasarkan apa adanya (Bungin, 2006:36). Sedangkan yang dimaksud analisa sederhana menurut Irawan (2006:10.9) adalah menghitung frekwensi, rata-rata, median dan modus dengan cara tabulasi data langsung, sehingga dengan desain penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

B. Operasionalisasi Variabel

Variabel secara rumusan sederhana merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Sesuatu itu mungkin manusia, benda, system, dan lain-lain. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel: variabel bebas (X) yakni efektivitas pelaksanaan Musrenbang, dan variabel terikat (Y) yakni hasil Musrenbang. Menurut Irawan (2006, 3.8-3.8) Variabel bebas (independent) adalah variabel yang direkayasa (dimanipulasi) untuk mendapatkan pengaruhnya dengan variabel lain, sedangakan variabel terikat adalah variabel yang menjadi sasaran dari rekayasa atau manipulasi dari variabel bebas. Variabel terikat ini biasa juga disebut dengan *"variable post test"* atau variabel terpengaruh.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Adapun operasionalisasi dari masing-masing variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
(1)	(3)	
I. Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang (Variabel X)	1. Kemampuan Mengidentifikasi Masalah-masalah pembangunan	a. Setiap SKPD melakukan survey b. Setiap SKPD memiliki data yang akurat c. Setiap SKPD memiliki skala prioritas program d. Setiap SKPD memiliki rencana kegiatan yang tertuang
	2. Partisipasi Masyarakat	a. Partisipasi masyarakat terbuka secara umum
		b. Partisipasi masyarakat hanya terbuka secara khusus c. Penyerapan aspirasi dilakukan secara langsung d. Penyerapan aspirasi dilakukan secara tidak langsung e. Ketersediaan mekanisme untuk menyalurkan partisipasi
	3. Ketepatan Waktu	a. Pelaksanaan Musrenbang tingkat desa/kelurahan sesuai jadwal b. Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan sesuai jadwal c. Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten sesuai jadwal
	4. Keaktifan Peserta	a. Peserta Musrenbang aktif menghadiri Musrenbang b. Peserta aktif memberikan informasi-informasi pembangunan c. Peserta aktif memberikan saran pemikiran dalam Musrenbang d. Peserta mengikuti Musrenbang sampai selesai

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

	5. Ketepatan Rumusan Rencana Program	a. Rumusan Program SKPD selalu tepat b. Rumusan Program SKPD yang diusulkan selalu disetujui c. Keakuratan rumusan program SKPD sesuai kebutuhan yang dinginkan d. Rumusan program berisi tujuan, sasaran, manfaat program.
	6. Ketepatan Program	a. Program yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan SKPD b. Program yang ditetapkan telah mudah dilaksanakan c. Program yang ditetapkan sesuai usulan dari bawah d. Program yang ditetapkan sesuai RPJMD.
II. Hasil Musrenbang (Variabel Y)	1. Bermanfaat dalam Penyusunan APBD	a. Hasil Musrenbang membantu SKPD dalam menyusun program dan anggaran b. Hasil Musrenbang membantu Bappeda dalam menyusun program dan anggaran c. Hasil Musrenbang membantu Penyusunan APBD
	2. Terserapnya Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat	a. Hasil Musrenbang menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari aspek materil b. Hasil musrenbang menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari aspek non materil

UNIVERSITAS TERBUKA

C. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (1996:116-117), unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian yang dapat berupa benda atau manusia. Dengan kata lain, unit analisis merupakan banyaknya satuan yang akan dijadikan obyek penelitian dalam hal ini populasi dan sampel penelitian.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Atas dasar pendapat tersebut unit analisis penelitian ini adalah unit organisasi (SKPD) yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang tahunan pada tingkat Kabupaten Wakatobi yang dikoordinasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Jumlah SKPD di Kabupaten Wakatobi berjumlah 23 SKPD sebagai populasi penelitian.

Mengingat jumlah populasi relatif besar, maka ditarik sampel penelitian sebanyak 4 Satuan Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Wakatobi dengan teknik penarikan sampel yakni *purposive sampling* yakni penetapan sampel secara sengaja, di mana SKPD yang menjadi sampel dianggap mewakili populasi yang ada atau unit analisis yang ada. Adapun keempat sampel SKPD yakni:

1. Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dari setiap SKPD ditetapkan 10 orang sampel responden secara *purposive sampling*, yang terdiri Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi masing-masing Dinas. Penentuan sampel responden sebagaimana Sugiyono (2005:67) mengemukakan *purposive sampling* yaitu penentuan responden dengan syarat tertentu, sehingga alasan megambil sampel dalam penelitian ini bahwa mereka inilah yang paling mengetahui program-program yang ada di dinas masing-masing, baik itu program-program yang sedang berjalan maupun yang sedang direncanakan, termasuk proses pelaksanaan Musrenbang. Sebagaimana Rescoe dalam (Sunarcaya, 2002:62) mengatakan bahwa >30 dan <500 kebanyakan penelitian sudah terwakili dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

minimum sampel penelitian yang diperlukan adalah 30 sampel. Sehingga penelitian ini mencantumkan jumlah responden sebanyak 40 orang.

Selain responden, dalam penelitian ini ditetapkan informan penelitian untuk menjaring informasi dan tanggapan informan mengenai pelaksanaan Musrenbang. Adapun para informan yang dimaksud, antara lain:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi

   Sekretaris Daerah dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah pejabat Pemerintahan Daerah yang berperan menerima laporan pelaksanaan Musrenbang dari Kepala Bappeda untuk disampaikan kepada Bupati Wakatobi. Sehingga dengan demikian Sekretaris Daerah dianggap sebagai pejabat yang mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Musrenbang setiap tahunnya di Kabupaten Wakatobi.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi

   Kepala Bappeda merupakan pejabat yang mengkoordinasikan dan bertanggungjawab mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga penetapan hasil Musrenbang, sehingga pejabat ini dianggap paling mengetahui proses pelaksanaan kebijakan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi terhadap terakomodasi dan tidak terakomodasinya usulan program dan kegiatan prioritas masyarakat yang tertuang dalam RKPD sampai pada pembiayaannya melaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi

   Ketua dan Wakil Ketua DPRD merupakan pejabat politik daerah yang hendak mengawal dan mengkoordinasikan aspirasi program dan kegiatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

prioritas kebutuhan masyarakat, karena unsur ini merupakan representasi masyarakat mulai pembahasan anggaran hingga kepada tahap diregulasikannya untuk dapat dilaksanakan oleh pihak eksekutif

4. Tokoh Masyarakat 4 orang

   Tokoh masyarakat merupakan elemen terpenting yang berfungsi sebagai pemimpin informal yang senantiasa berkomitmen dan konsisten dalam mengusung usulan-usulan program dan kegiatan dalam pencapaian pemenuhan aspirasi dan kebutuhan yang berpihak kepada masyarakat.

5. LSM, yang diwakili 2 LSM.

   LSM adalah Lembaga swadaya masyarakat yang selalu bersama-sama mendampingi masyarakat guna memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang diusulkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Wakatobi pada setiap tahunnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan tiga macam teknik, yaitu:

1. Kuesioner sebagai instrument utama; sasarannya adalah responden yang telah ditetapkan, untuk memperoleh data primer tentang proses Musrenbang yang selama ini berlangsung. Oleh karena seluruh responden penelitian ini relatif berpendidikan sehingga dapat memahami isi kuesioner dengan baik, maka pengisian kuesioner diserahkan langsung kepada masing-masing responden.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Wawancara; yaitu mengadakan wawancara dengan beberapa informan penelitian untuk memperoleh informasi tentang proses pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi Tahun 2008.
3. Dokumentasi, yakni menganalisis dokumen-dokumen hasil Musrenbang tingkat Kabupaten tahun 2008.

Skala pengukuran instrument penelitian ini menggunakan "skala likert". Dimana skala *rating likert* mempnyai gradasi dari yang sangat positif sampai sangat negatif, dengan memakai lima skala, yakni:

1. Sangat Setuju (SS) skor : 5
2. Setuju (S) skor : 4
3. Kurang Setuju (KS) skor : 3
4. Tidak Setuju (TS) skor : 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor : 1

E. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan sebelumnya dengan menggunakan analisis deskriftif kuantitatif dengan analisa sederhana frekuensi dan persentase. Yang dimaksud analisa sederhana menurut Irawan (2006:10.9) adalah menghitung frekwensi, rata-rata, median dan modus dengan cara tabulasi data langsung. Pertanyaan dalam kuesioner dibuat secara tertutup dengan jawaban yang bersifat ordinal (berjenjang), dan diberikan skor yang berjenjang pula dari 1 (sangat rendah) sampai dengan 5 (sangat tinggi). Skor jawaban dikalikan dengan frekuensi pada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kategori jawaban tersebut. Selanjutnya dihitung nilai rata-ratanya untuk menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan Musrenbang.

Selanjutnya untuk analisis frekuensi, digunakan interval skor dan interpretasinya sebagaimana pendapat Karepesina (2007:74) yaitu perolehan skor maksimum untuk setiap pertanyaan adalah 5 atau 100% dan skor minimum adalah 1 atau 20%. Jarak antara skor yang berdekatan adalah satu seper lima dari selisih nilai maksimum dengan nilai minimum, atau sebesar 16% dari nilai maksimum. Sehingga dapat dibuat interval persentase skor untuk setiap kategori adalah sebagai berikut :

- 84% sampai dengan 100% dikategorikan **Sangat Efektif**
- 68% sampai dengan 83,99% dikategorikan **Efektif**
- 52% sampai dengan 67,99% dikategorikan **Cukup Efektif**
- 36% sampai dengan 51,99% dikategorikan **Kurang Efektif**
- 20% sampai dengan 35,99% dikategorikan **Tidak Efektif**

Berdasarkan interval persentase tersebut, maka dapat diuraikan dan dideskripsikan fenomena Musrenbang dan selanjutnya diambil kesimpulan penelitian sebagai jawaban permasalahan dan tujuan penelitian.

UNIVERSITAS TERBUKA

F. Tempat dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Wakatobi pada unit kerja (SKPD) yang telah disebutkan di atas. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian selama enam bulan, yaitu dari bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Mei 2009. Uraian kegiatan utama dan jadwal waktu adalah sebagai berikut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Tabel 3.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Persiapan Proposal dan Seminar	XX					
2.	Perizinan & Penelitian	XX	XXXX				
3.	Pengolahan Data		XX	XXXX			
4.	Penulisan Laporan			X	XXXX	XX	
5.	Konsultasi/Perbaikan					XX	
6.	Seminar Hasil						XX
7.	Ujian Tesis						X

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Wakatobi

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Buton melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003. Kabupaten Wakatobi dikenal dengan sebutan Kepulauan Tukang Besi, nama Wakatobi merupakan singkatan dari empat kecamatan di kepulauan tersebut yakni Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko, yang terletak di sebelah timur Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Wakatobi secara geografis terletak di bagian Khatulistiwa persisnya di Tenggara pulau Sulawesi, melintang dari Utara ke Selatan 5°12" - 6°10" LS (sepanjang kurang lebih 160 km) dan 123°20" - 124°39" BT (sepanjang kurang lebih 120 km).

Kepulauan Wakatobi merupakan gugusan Pulau-Pulau Kecil (PPK), bahkan dapat dikatakan gugusan pulau sangat kecil, berjumlah 48 buah Pulau dengan luas daratan 823 km² dan luas perairan 55.113 km² serta panjang garis pantai 251,96 km. Adapun batas wilayah Kabupaten Wakatobi sebagai berikut.

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buton dan Muna
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Buton
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pada tahun 1995, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 426/Kpts-II/1995 menetapkan Wakatobi sebagai Taman Wisata Alam Laut. Hal ini mengingat Kepulauan Wakatobi merupakan salah satu wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang terlengkap di dunia. Selanjutnya pada tahun 1996 ditingkatkan statusnya menjadi wilayah konservasi dengan status Taman Nasional (Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 393/Kpts-VI/1996).

Keadaan topografi Kabupaten Wakatobi bervariasi mulai dari datar bergelombang, berbukit sampai bergunung. Curah hujan Kabupaten Wakatobi menunjukkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September yakni sebesar 2,5 mm dan tertinggi pada bulan Januari, sebesar 229,5 mm.

Sumber mata air di Kabupaten Wakatobi umumnya berasal dari air tanah (*ground water*) dan gua-gua karst. Air permukaan (sungai) hanya dijumpai di Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Kaledupa. Jenis tanah di kabupaten Wakatobi berdasarkan klasifikasi PPT dan klasifikasi *Soil Taxononomi Soil Survei Staff* (1999) yakni Litosol dan Mediteran.

Peta geologi Lembar Kepualauan Tukang Besi Sulawesi Tenggara skala 1:25.000 Tahun 2004 menunjukkan bahwa secara umum formasi geologi Kabupaten Wakatobi dikelompokkan menjadi 2 jenis yakni formasi geologi Qpl dengan jenis bahan induk yaitu batu gamping koral.

Kepulauan Wakatobi terdapat pada Pusat Segi Tiga Karang Dunia (*Coral Triangle Center*), memiliki jumlah keanekaragaman hayati kelautan tertinggi di dunia,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

yakni 750 jenis karang dari 850 spesies karang dunia, 900 jenis ikan dunia dengan 46 devisites teridentifikasi. Wakatobi memiliki 90.000 ha terumbu karang dan Atol Kaledupa (48 Km), Atol tunggal terpanjang di dunia (*Operation Wallacea*).

1. Wilayah Pemerintahan Kabupaten Wakatobi

Secara administratif, Kabupaten Wakatobi yang resmi berdiri tahun 2003 atas dasar Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003, pada awal terbentuknya hanya terdiri dari 4 kecamatan saja. Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah kecamatan yang ada pada tahun 2007 berkembang menjadi 8 kecamatan, dengan jumlah desa sebanyak 75 dan 25 kelurahan. Pembagian wilayah administrasi pemerintahan secara rinci adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Wakatobi

No.	Kecamatan	Desa Induk	Desa Pemekaran	Kelurahan Induk	KelurahanPemkeran	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Wangi-Wangi	5	9	2	4	20
2.	Wangi-Wangi Selatan	10	8	2	1	21
3.	Kaledupa	5	7	4	0	16
4.	Kaledupa Selatan	8	2	0	0	10
5.	Tomia	5	3	2	0	10
6.	Tomia Timur	5	0	4	0	9
7.	Binongko	3	2	3	1	9
8.	Togo Binongko	2	1	2	0	5
Jumlah		43	32	19	6	100

Sumber : Wakatobi Dalam Angka Tahun 2008.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

2. Kependudukan

Hasil sensus penduduk tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi sebanyak 95.574 jiwa dan meningkat menjadi 98.180 jiwa pada tahun 2006, sedang tahun 2007 berkembang menjadi 99.492 jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa pada beberapa tahun terakhir angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Wakatobi tidak mengalami pertambahan yang serius, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2 sampai dengan Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan Tahun 2005-2006

No.	Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan %
		2005	2006	
1.	Binongko	14.381	15.271	6,19
2.	Tomia	9.259	6.834	-26,19
3.	Tomia Timur	8.934	10.443	16,89
4.	Kaledupa	9.690	9.998	3,18
5.	Kaledupa Selatan	7.842	7.551	-3,71
6.	Wangi-Wangi	21.967	23.244	5,81
7.	Wangi-Wangi Selatan	23.401	24.839	6,15
Jumlah		95.574	98.180	2,73

Sumber : Wakatobi Dalam Angka Tahun 2007

Data di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 terjadi kenaikan dibanding Tahun 2005 yang terjadi pada beberapa kecamatan. Pertambahan pertumbuhan penduduk yang signifikan terjadi di Kecamatan Tomia Timur yang dalam kurun waktu satu tahun pertambahan penduduk mencapai angka 1.509 jiwa atau 16,89%. Angka tersebut sangat berbanding terbalik

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

dengan yang terjadi di Kecamatan Tomia yang merosot kurang hingga mencapai jauh di bawah angka nol yaitu -26,19%. Secara keseluruhan laju pertumbuhan penduduk tahun 2006 sebesar 2,73 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2007 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wakatobi mengalami penurunan dari tahun 2006 yaitu hingga mencapai 1,34% dengan dimekarkannya Kecamatan Togo Binongko sebagaimana data berikut.

Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan Tahun 2006-2007

No.	Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan %
		2006	2007	
1.	Binongko	15.271	10.756	-29,57
2.	Togo Binongko	-	5.265	-
3.	Tomia	6.834	6.143	-10,11
4.	Tomia Timur	10.443	10.128	-3,02
5.	Kaledupa	9.998	10.668	6,70
6.	Kaledupa Selatan	7.551	7.790	3,17
7.	Wangi-Wangi	23.244	23.572	1,41
8.	Wangi-Wangi Selatan	24.839	25.170	1,33
Jumlah		98.180	99.492	1,34

Sumber : Wakatobi Dalam Angka Tahun 2008

Kesejahteraan penduduk merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan masalah kependudukan, seperti besarnya jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi dan tidak meratanya penyebaran penduduk di Kabupaten Wakatobi. Data di atas menunjukkan bahwa pemerintah setidaknya dapat mewujudkan langkah tersebut

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

dengan menekan angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Wakatobi Tahun 2007 di beberapa kecamatan yang dinilai rawan terhadap laju pertumbuhan penduduknya seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Tomia Timur yang berhasil ditekan angka pertumbuhan penduduknya hingga turun mencapai -3,02% dari tahun sebelumnya.

Berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah kependudukan termasuk untuk memecahkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dilakukan pemerintah melalui berbagai program yang tentunya berbasis keikutsertaan masyarakat. Tanpa partisispasi masyarakat, pemerintah pun tak dapat berbuat apa-apa.

Begitu pula usaha-usaha yang mengarah pada pemerataan penyebaran penduduk dengan diberlakukannya otonomi daerah yang diharapkan dapat mengurangi pertambahan penduduk dan perpindahan penduduk. Hal ini terlihat dari data laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wakatobi tahun 2008 sebagai berikut.

Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Kecamatan Tahun 2007-2008

No.	Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan %
		2007	2008	
1.	Binongko	10.756	10.622	-1,25
2.	Togo Binongko	5.265	4.899	-6,95
3.	Tomia	6.143	6.852	11,54
4.	Tomia Timur	10.128	9.964	-1,62
5.	Kaledupa	10.668	10.741	0,68
6.	Kaledupa Selatan	7.790	7.748	-0,54
7.	Wangi-Wangi	23.572	24.053	2,04
8.	Wangi-Wangi Selatan	25.170	26.596	5,67
Jumlah		99.492	101.475	1,99

Sumber : Wakatobi Dalam Angka Tahun 2009

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Data pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa program pemerintah dalam upaya pemerataan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Wakatobi telah membuahkan hasil yang dengan seefektif mungkin menekan angka laju pertumbuhan tersebut. Hal ini nampak bahwa pada tahun 2008 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Wakatobi adalah 1,99% dari jumlah penduduk 101.475 jiwa.

Adapun estimasi jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi dalam enam tahun kedepan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk konstan pertahun dan mengikuti pola pertumbuhan penduduk tahun 2006 sampai tahun 2008 sebagaimana jumlah yang tercantum di atas maka diperkirakan sebagai berikut.

Tabel 4.5 Estimasi Penduduk Kabupaten Wakatobi Tahun 2009-2013

No.	Tahun	Penduduk Wakatobi	% Pertumbuhan Penduduk
1.	2009	103.608	2,05
2.	2010	105.404	1,70
3.	2011	107.200	1,67
4.	2012	108.997	1,65
5.	2013	110.793	1,63

Sumber : Wakatobi Dalam Angka 2008, Bappeda

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Wakatobi hasil estimasi penduduk di atas dapat dirata-ratakan setiap tahunnya 1,74 %. Kemudian dari data hasil perkiraan 5 tahun kedepan nampak persentase pertumbuhan setiap tahunnya menurun. Data menunjukkan perkiraan penduduk Kabupaten Wakatobi tahun 2009 adalah 103.608 atau dengan jumlah persentase pertumbuhan sebesar 2,05% dari tahun 2008 dengan jumlah penduduk 101.475. Artinya dari tahun ke tahun

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

angka pertumbuhan itu menurun. Ini sangat menggembirakan bila tercapai. Berbagai program pemerintah yang berhubungan dengan masalah pertumbuhan penduduk haruslah dioptimalkan agar tepat guna. Program Keluarga Berencana (KB) haruslah menjadi sasaran yang tepat yang menjadi program penting disamping program-program pemberdayaan lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah kependudukan yang merujuk kepada nilai-nila agama dan budaya.

Selanjutnya struktur umur penduduk Wakatobi masih tergolong muda, karena proporsi usia 0 sampai dengan 14 tahun masih cukup besar yakni sebesar 33,71%. Berikut data penduduk Kabupaten Wakatobi menurut kelompok umur.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Kelompok Umur Tahun 2005 -2006

No.	Kelompok Umur	2005		2006	
		Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
1.	0 - 14	32.205	33,69	33.094	33,71
2.	15 - 64	58.126	60,82	59.722	60,83
3.	65 +	5.243	5,49	5.364	5,46
Jumlah		95.574	100,00	98.180	100,00

Sumber : Wakatobi Dalam Angka 2007, Bappeda

Penduduk dengan umur 15-64 tentunya berdampak pada tingginya tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk atau rasio antara jumlah penduduk terhadap penduduk usia kerja. Dengan demikian Kabupaten Wakatobi termasuk daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi dengan angka 60,83 persen.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Persebaran penduduk di Kabupaten Wakatobi, sebagian besar penduduk menetap di pulau Wangi-Wangi sekitar 49,84% dari total penduduk, sisanya tersebar di Pulau-pulau lainnya, seperti pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk dan Persebarannya Menurut Kecamatan Kabupaten Wakatobi Tahun 2008

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Penduduk			Persentase (%)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Binongko	156,00	5.187	5.435	10.622	10,47
2.	Togo Binongko	*	2.379	2.520	4.899	4,83
3.	Tomia	47,10	3.394	3.458	6.852	6,75
4.	Tomia Timur	67,90	4.673	5.291	9.964	9,82
5.	Kaledupa	45,50	5.143	5.598	10.741	10,58
6.	Kaledupa Selatan	58,50	3.562	4.186	7.748	7,64
7.	Wangi-Wangi	241,98	11.796	12.257	24.053	23,70
8.	Wangi-Wangi Selatan	206,02	13.125	13.471	26.596	26,14
Jumlah		823,00	47.599	49.259	101.475	100

**) Masih Gabung Dengan Kec. Binongko*
Sumber : BPS dan Wakatobi Dalam Angka 2009

Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya maka Kecamatan Kaledupa merupakan daerah yang paling padat penduduknya yaitu dengan luas wilayah 45,50 km^2 di huni oleh penduduk 10.741 jiwa sedangkan Kecamatan yang tergolong jarang penduduknya terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi dengan luas Wilayah 241,98 km^2 atau hamper sepertiga luas Wilayah Wakatobi daerah ini hanya di huni oleh 24.053 jiwa. Tentunya hal ini pula harus menjadi catatan penting dalam merencanakan program perencanaan setiap tahunnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Selanjutnya *sex ratio* (rasio jenis kelamin) yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2008 sebesar 94, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki. Kemudian rasio penduduk Kabupaten Wakatobi tidak mengalami perubahan pada tahun 2008 seperti dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 4.8 Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Kelamin Dirinci Per Kecamatan Tahun 2008

No.	Kecamatan	Penduduk					Rasio
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	
1.	Binongko	5.187	10,5	5.435	10,4	10.622	95
2.	Togo Binongko	2.379	4,8	2.520	4,8	4.899	94
3.	Tomia	3.394	6,9	3.458	6,6	6.852	98
4.	Tomia Timur	4.673	9,5	5.291	10,1	9.964	88
5.	Kaledupa	5.143	10,4	5.598	10,7	10.741	92
6.	Kaledupa Selatan	3.562	7,2	4.186	8,0	7.748	85
7.	Wangi-Wangi	11.796	23,9	12.257	23,5	24.053	96
8.	Wangi-Wangi Selatan	13.125	26,6	13.471	25,8	26.596	97
Jumlah		49.259	100	52.216	100	101.475	94

Sumber : Wakatobi Dalam Angka Tahun 2009

Pada tahun 2000 sampai tahun 2008, rasio jenis kelamin Kabupaten Wakatobi selalu berada di bawah 100. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Rasio ini biasanya berhubungan dengan pola migrasi di daerah tersebut, di mana umumnya daerah-daerah tersebut adalah daerah pengirim migran. Hal tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat Wakatobi yang sebagian besar merupakan pelaut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

3. Ketenagakerjaan

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu negara. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Terkait dengan hal ini, diperlukan indikator-indikator yang mampu menggambarkan keadaan angkatan kerja dan tenaga kerja untuk selanjutnya dijabarkan sebagai dasar penentuan arah kebijakan ketenagakerjaan sehingga dari besaran indikator-indikator tersebut dapat diketahui keadaan ketenagakerjaan saat ini dan hal apa saja yang memerlukan perbaikan di masa depan.

Uraian ketenagakerjaan disini akan meliputi penduduk usia kerja yang didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun keatas, yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja dikenal dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angkatan kerja dibedakan menurut penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan. Penduduk yang bekerja dirinci menurut lapangan pekerjaan/usaha, status pekerjaan utama dan jenis pekerjaan utama. Sedangkan kategori penduduk yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2006, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Wakatobi sebanyak 76.005 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 36.583 jiwa atau 48,49 % dan perempuan sebanyak 39.152 jiwa atau 51,51 %.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Berikut penduduk Kabupaten Wakatabi pada tahun 2006 dengan usia 10 tahun keatas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin.

Tabel 4.9 Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2006

No.	Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I. Angkatan kerja	26.656	17.843	44.490
	1.1. Bekerja	24.151	14.718	38.869
	1.2. Mencari kerja	2.505	3.116	5.620
2.	II. Bukan Angkatan Kerja	10.197	21.318	31.515
	2.1. Sekolah	8.583	8.837	17.420
	2.2. Mengurus RT	217	11.201	11.419
	2.3. Lainnya	1.397	1.280	2.677
	Jumlah (I + II)	36.853	39.152	76.005
3.	III. % Pekerja terhadap angkatan kerja	90,60	82,53	87,37
4.	IV. % Angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja	72.33	45,55	58,53

Sumber : BPS, Susenas Wakatobi 2006.

Penduduk Kabupaten Wakatobi pada usia 10 tahun ketas sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4.9 menunjukkan angkatan pengangguran atau mencari kerja masih cukup besar yaitu sebanyak 5.620 jiwa. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Wakatobi bersama komponen-komponen daerah lainya. Jika hal ini tidak diatasi, maka akan menimbulkan kemiskinan dan dekadensi moral bagi penduduk Kabupaten Wakatobi. Begitu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pula pada tingkat usia angkatan sekolah, pemerintah harus dapat menciptakan generasi yang mampu memberikan manfaat terhadap pembangunan daerah Kabupaten Wakatobi dalam berbagai aspek kehidupan.

Bila dibandingkan tahun 2008 kondisi itu tidak mengalami perubahan yang dapat mendorong proses pembangunan daerah Kabupaten Wakatobi, sabagaimana terlihat dari Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2008

No.	Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I. Angkatan kerja	27.430	23.267	50.697
	1.1. Bekerja	26.454	21.564	48.018
	1.2. Mencari kerja	976	1.703	2.679
2.	II. Bukan Angkatan Kerja	6.720	14.273	20.993
	2.1. Sekolah	3.036	3.738	6.774
	2.2. Mengurus RT	740	9.195	9.935
	2.3. Lainnya	2.944	1.340	4.284
	Jumlah (I + II)	34.150	37.540	71.690
3.	III. TPAK (Tingkat Parisipasi Angkatan Kerja)	80,32	61,98	70,72
4.	IV. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	3,56	7,32	5,28

Sumber : Wakatobi Dalam Angka 2009.

Mencermati permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Wakatobi maka dari data di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah perlu melakukan pemebenahan terhadap permasalahan ketenagakerjaan. Data di atas menunjukkan bahwa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pemerintah Kabupaten Wakatobi tidak banyak memberikan kontribusi yang cukup terhadap angkatan kerja. Data menunjukkan pada tahun 2008 Tingkat pengangguran telah menurun hingga 5,28%, namun ini tidak berdampak pada jumlah penyerapan tenaga kerja di Kabupten Wakatobi.

Menurut lapangan pekerjaan, penduduk Kabupaten Wakatobi Tahun 2006, yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian yang disusul dengan sektor-sektor lainnya, sebagai berikut.

Tabel 4.11 Penduduk 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2006

No	Jenis Kegiatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pertanian	9.889	13.677	23.566
2.	Pertambangan dan Penggalian	84	402	486
3.	Industri	771	811	1.582
4.	Listrik dan Gas	54	0	54
5.	Konstruksi	972	0	972
6.	Perdagangan	3.029	2.860	5.889
7.	Transportasi & Komunikasi	2.331	94	2.425
8.	Keuangan	185	211	396
9.	Jasa	1.998	1.501	3.499
10.	Lainnya	0	0	0
Jumlah		19.313	19.556	38.869

Sumber : Susenas 2006

Data di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Wakatobi dengan jumlah pekerja pada sektor pertanian sebanyak 23.566 jiwa atau 60,6 % merupakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

gambaran bahwa pemerintah melalui rencana-rencana programnya harus dapat mengakomodasi dengan baik kebutuhan petani dalam meningkatkan kualiatas hidupnya sehingga terciptalah masyarakat sejahtera sebagaimana tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Begitupula perdagangan yang disusul sektor jasa, transportasi dan industri yang tidak kalah pentingnya dalam menyusun rencana program menurut skala prioritas kebutuhan daerah.

Tabel 4.12 Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2008

No	Jenis Kegiatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pertanian	15.368	14.586	29.953
2.	Pertambangan dan Penggalian	186	67	253
3.	Industri	690	1.211	1.901
4.	Listrik dan Gas	47	3	50
5.	Konstruksi	1.668	0	1.668
6.	Perdagangan	2.039	3.757	5.796
7.	Transportasi dan Komunikasi	3.668	319	3.987
8.	Keuangan	82	4	86
9.	Jasa	2.663	1.571	4.234
10.	Lainnya	44	46	90
Jumlah		26.454	21.564	48.018

Sumber : Wakatobi Dalam Angka Tahun 2009

Data di atas menunjukkan bahwa 29.953 jiwa penduduk Kabupaten Wakatobi tahun 2008 bekerja di sektor pertanian. Kondisi geografis daerah yang memiliki tanah berbatuan menyebabkan penduduk Kabupaten Wakatobi hanya

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan kesederhanaan, dan tidak menutup kemungkinan hal ini dapat mengarah ke kondisi yang lebih buruk lagi. Tentunya oleh pihak eksekutif bersama legislatif harus lebih serius memikirkan kearah pembenahan kebijakan-kebijakan program pembangunan menuju masyarakat Wakatobi yang sejahtera.

Dari uraian data di atas terlihat bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan rendah rentan terhadap masalah kemiskinan. Bila hal ini tidak segera diatasi dengan unsur-unsur pendukung, maka program-program pemerintah untuk pengembangan dan pembangunan Kabupaten Wakatobi tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut data dari berbagai profesi kerja penduduk Wakatobi.

Tabel 4.13 Penduduk Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Wiraswasta	7.426	4.337	11.763
2.	Petani/Nelayan	9.889	13.677	23.566
3.	PNS	1501	1080	2.581
4.	POLRI	184	1	185
5.	TNI	47	-	47
6.	Jasa Lainnya	3113	555	3.668
	Jumlah	22.160	19.650	41.810

Sumber : Wakatobi Dalam Angka Tahun 2009

Bila mencermati tingkat kehidupan sehari-hari penduduk Kabupaten Wakatobi, maka secara umum andalan bidang pertanian tidaklah dapat dibanggakan. Kondisi gegrafis dan iklim yang tidak mendukung akan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mengakibatkan penduduk dengan tingkat kehidupan pada taraf hanya bertahan untuk kebutuhan terbatas. Pemerintah harus bekerja keras bersama Lembaga-lembaga swadaya yang ada beserta unsur legislatif memikirkan apa dan bagaimana upaya-upaya jalan keluarnya. Keberhasilan suatu daerah bukan dilihat dari suksesnya daerah tersebut membangun gedung perkantoran yang megah dengan berbagai kunjungan-kunjungannya tetapi dibalik itu rakyatnya melarat dan tidak merasakan kesejahteraan.

B. Deskripsi Hasil Pengukuran Variabel Penelitian

1. Variabel Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musrenbang Tahunan

Variabel efektivitas pelaksanaan kebijakan Musrenbang Tahunan ditelaah berdasarkan dimensi-dimensi berikut: a) kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan, b) partisipasi masyarakat, c) ketepatan waktu, d) keaktifan peserta, e) ketepatan rumusan rencana program, dan f) ketepatan program pembangunan.

a. Dimensi Kemampuan Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan

Dimensi pertama dari efektivitas pelaksanaan kebijakan Musrenbang Tahunan adalah kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kemampuan ini adalah sejauh mana SKPD melakukan survei dan menemukan berbagai permasalahan pembangunan sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Hasil pengukuran terhadap 4 indikator dari dimensi tersebut, disajikan pada Tabel 4.14.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Efektivitas Kemampuan Kerja Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan

Jawaban (Skor)	Indikator								Σf	$\Sigma f(s)$
	1		2		3		4			
	F	%	F	%	F	%	F	%		
Tidak Setuju (1)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
Kurang Setuju (2)	1	2,5	18	45,0	2	5,0	0	0,0	21	42
Agak Setuju (3)	10	25.0	14	35,0	12	30,0	2	5,0	38	114
Setuju (4)	22	55,0	6	15,0	24	60,0	34	85,0	86	344
Sangat Setuju (5)	7	17,5	2	5,0	2	5,0	4	10,0	15	75
Jumlah	40	100,0	40	100,0	40	100,0	40	100,0	160	575

Sumber : Hasil Olahan data, 2009

Berdasarkan tabel di atas, untuk semua indikator dimensi kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan, modus jawaban responden berada pada kategori "setuju" dengan variasi sebagai berikut: 55,0% untuk indikator (1), 15,0 % untuk indikator (2), 60,0% untuk indikator (3), dan 85,0% untuk indikator (4). Bila dirata-ratakan jawaban "setuju" dengan variabel efektivitas pelaksanaan musrenbang dari dimensi kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan adalah rata-rata 53,75%. Kecenderungan pilihan kedua dari responden berada pada kategori "agak setuju" dan "kurang setuju" dengan persentase jawaban pada kategori ini sebesar 23,75% dan 13,13%.

Perkalian frekuensi pada masing-masing item jawaban dengan skornya menghasilkan skor aktual sebesar 575. Adapun skor ideal yang mungkin diperoleh dari 4 indikator adalah 4 x 5 x 40 = 800. Jadi persentase skor aktual terhadap skor ideal adalah 71,88%. Berdasarkan kriteria yang telah dikemukakan pada bab tiga

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(Metode Penelitian), maka secara rata-rata jawaban responden terhadap dimensi ini berada pada kategori "efektif".

Angka di atas menunjukkan efektivitas pelaksanaan Musrenbang pada dimensi kemampuan mengidentifikasi masalah pembangunan dari 4 SKPD yakni; Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika secara umum dinilai cukup memadai. Dapat diartikan bahwa SKPD di Kabupaten Wakatobi telah melaksanakan dan memiliki kemampuan melakukan identifikasi masalah-masalah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, hanya belum dilakukan secara maksimal. Terutama pada kepemilikan data yang akurat bagi SKPD belum tertata dengan baik. Akibatnya perencanaan pembangunan kadang mengalami bias atau kurang sesuai dengan kondisi daerah, pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi yang dalam wawancara mengatakan bahwa:

> "Masalah yang dihadapi oleh SKPD kami dalam kaitannya dengan kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan adalah terbatasnya data yang akurat. Artinya kami masih kurang memiliki data mengenai jenis kebutuhan masyarakat, apalagi secara geografis Kabupaten Wakatobi sulit dijangkau secara keseluruhan. Sehingga kadang-kadang perencanaan yang dilakukan tidak didasarkan pada data yang akurat". (Hasil wawancara, tanggal 5 Februari 2009).

Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi, mengatakan hal yang sama, yaitu:

> "Dinas yang dipimpinnya memiliki kendala tentang data yang akurat, berkaitan dengan beberapa hal, seperti kebutuhan guru tiap sekolah, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, kondisi bangunan sekolah, data murid, siswa yang berhak mendapatkan beasiswa atau bantuan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

belajar, bahkan data base pendidikan Kabupaten Wakatobi belum ada. Hal ini tentunya menyulitkan kami untuk menyusun rencana". (Hasil wawancara tanggal 12 Agustus 2008).

Kemudian Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi, mengatakan bahwa:

"Dalam upaya memajukan ekonomi dan sistem pemerintahan daerah yang bernuansa normatif, dinas yang dipimpinnya memiliki kendala yang sama akan minimnya data dan informasi yang akurat tentang kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan laut, darat dan udara untuk pengembangan hubungan antarpulau yang meliputi, data kondisi wilayah, ketersediaan sarana perhubungan setempat, jumlah tenaga lapang, yang tentunya kesemuanya ini harus ditunjang oleh profesionalisasi yang optimal". (Hasil wawancara tanggal 20 Februari 2009).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi berkaitan dengan kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan, yaitu:

"Dinas kesehatan sangat terkendala oleh data yang akurat mengenai masalah-masalah kesehatan masyarakat, misalnya kondisi kesehatan pada umumnya, gizi masyarakat, fasilitas kesehatan, seperti penempatan puskesmas dengan petugasnya, masalah-masalah utama kesehatan masyarakat di Kabupaten Wakatobi belum dimiliki data yang akurat. Dengan kata lain, kami kekurangan data yang akurat untuk masalah-masalah kesehatan. Hal ini merupakan salah satau dampak kondisi geografis yang sulit dijangkau, karena sarana perhubungan tidak memadai, dan petugas sangat terbatas". (Hasil wawancara tanggal 22 Januari 2009).

Berdasarkan informasi yang diperoleh baik dari responden maupun informan terkait dengan kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan di Kabupaten Wakatobi, dapat disimpulkan bahwa masalah yang paling dominan dihadapi adalah kurang tersedianya data yang akurat sebagai dasar pembuatan program pembangunan daerah. Padahal dalam pembuatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kebijakan yang baik harus ditunjang data yang lengkap dan akurat, sehingga program yang dihasilkan dapat lebih bermanfaat.

Dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi perlu melakukan pemutakhiran data-data di segala bidang pembangunan, atau perlu menyusun *data base* setiap SKPD sehingga dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, data tersebut menjadi salah satu pijakan dasar, selain turun secara langsung ke masyarakat. Data akurat tentang masalah-masalah pembangunan sesungguhnya dapat diperoleh secara langsung dari masyarakat, hanya biayanya relatif besar dan waktu relatif lama. Untuk efisiensi dan efektifitas, maka dapat diberdayakan struktur pemerintahan mulai dari tingkat desa/kelurahan, dan kecamatan secara rutin setiap bulan. Sehingga pada saat Musrenbang tidak ada lagi kendala masalah lemahnya identifikasi masalah-masalah pembangunan.

b. Dimensi Partisipasi Masyarakat

Dimensi kedua dari efektivitas pelaksanaan Musrenbang yang diteliti adalah partisipasi masyarakat, yakni yang bertujuan untuk mengungkap sejauhmana pelibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam turut menentukan program pembangunan daerah, yang dilakukan melalui perencanaan dari bawah (*bottom up*). Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kompetensi mengikuti Musrenbang mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, sesuai ketentuan pelaksanaan Musrenbang.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil pengukuran penelitian pada dimensi partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Musrenbang berdasarkan 4 indikator, sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang

Jawaban (Skor)	Indikator										Σf	Σf (s)
	1		2		3		4		5			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Tidak Setuju (1)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0
Kurang Setuju (2)	15	37,5	7	17,5	13	32,5	5	12,5	14	35,0	54	108
Agak Setuju (3)	19	47,7	14	35,0	15	37,5	5	12,5	16	40,0	69	207
Setuju (4)	4	10,0	17	42,5	12	30,0	20	50,0	8	20,0	61	244
Sangat Setuju (5)	2	5,0	2	5,0	0	0,0	10	25,0	2	5,0	16	80
Jumlah	40	100,0	40	100,0	40	100,0	40	100,0	40	100,0	200	639

Sumber: Olahan data primer, 2009

Berdasarkan tabel di atas, untuk semua indikator dimensi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, modus jawaban responden berada pada kategori "agak setuju dan kurang setuju" dengan variasi sebagai berikut: "agak setuju": 47,7% untuk indikator (1), 35,0% untuk indikator (2), 37,5% untuk indikator (3), 12,5% untuk indikator (4), 40,0% untuk indikator (5). Bila dirata-ratakan jawaban "agak setuju" dengan kemampuan kerja dari dimensi ini adalah 34,54%. Sementara kategori "kurang setuju" variasi jawaban sebagai berikut: 37,5% untuk indikator (1), 17,5% untuk indikator (2), 32,5% untuk indikator (3), 12,5% untuk indikator (4), dan 35,0% untuk indikator (5), dengan rata-rata 27,0% responden yang memilih kurang setuju dari lima indikator pada dimensi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Perkalian frekuensi pada masing-masing item jawaban dengan skornya menghasilkan skor aktual sebesar 639. Adapun skor ideal yang mungkin diperoleh dari 5 indikator adalah 5 x 5 x 40 = 1000. Jadi persentase skor aktual terhadap skor ideal adalah 63,90%. Berdasarkan kriteria yang telah dikemukakan pada bab tiga (Metode Penelitian), maka secara rata-rata jawaban responden terhadap dimensi ini berada pada kategori "cukup efektif".

Angka di atas menunjukkan bahwa dimensi partisipasi masyarakat tersebut secara umum dinilai kurang memadai. Artinya dalam pelaksanaan musrenbang mulai di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten partisipasi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung belum berjalan sebagaimana mestinya.

Hal ini sesuai informasi yang diperoleh dari informan penelitian, menyatakan bahwa:

> "Pada kenyataannya masyarakat masih bingung di mana dan kapan aspirasi mereka disalurkan. Memang ada musrenbang, tapi perhatian masyarakat untuk musrenbang sangat kecil. Hal ini tidak terlepas dari mekanisme perencanaan yang ada, karena indikasi menunjukkan bahwa perencanaan seakan-akan dari bawah, tetapi kemudian hasil keputusan akhir (program pembangunan) banyak yang tidak sesuai dengan usulan". (Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kabupaten Wakatobi, Tanggal 2 Februari 2009).

Berdasarkan informasi dari Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi yang diwawancarai berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan Musrenbang mengatakan bahwa:

> "Memang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang belum optimal, hal ini disebabkan oleh antara lain sebagian SKPD yang ada masih kurang membuka diri kepada masyarakat, misalnya tidak hadir dalam Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, sehingga ada anggapan masyarakat percuma kita ikut Musrebang karena pejabat yang diharapkan hadir tidak hadir. Hal lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang. Memang ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dalam pelaksanaan musrenbang, karena kelemahan ini ada pada dua sisi baik SKPD maupun masyarakat itu sendiri". (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, tanggal 3 Februari 2009).

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu membuka diri dan menyiapkan mekanisme untuk menyalurkan aspirasi tidak hanya hadir dalam Musrenbang tetapi ada bentuk lain, sehingga masyarakat memberi dukungan penuh dalam perencanaan Musrenbang yang setiap tahun.

Hal tersebut lebih mendasar lagi seperti informasi yang dikemukakan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Wakatobi sebagai berikut:

> Bahwasanya Wakatobi dengan segala keterbatasannya harus mampu menciptakan pemerintahan dengan sistem perencanaan yang optimal. Pemerintah sebagai *stakeholder* adalah pemegang kendali dalam menentukan baik dan buruknya tatanan perencanaan pembangunan. Tanpa didasari oleh tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi serta kepekaan terhadap usulan kebutuhan dari masyarakat maka secara dramatis Kabupaten kita akan terpuruk jauh terbelakang dengan daerah-daerah lain. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran haruslah menjadi prioritas utama dalam pencapaian tujuan pembangunan. Juga Musrenbang jangan hanya jadi ajang asal. Pemerintah harus mampu menuntun dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tujuan dan arah pelaksanaan pembangunan yang direncanakan. (Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, tanggal 19 Januari 2009).

Pendapat yang sama seperti dikemukakan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi yang dihimpun sebagai informan bahwa:

> Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi tidak berjalan sesuai dengan pola asas-asas pelaksanaan Musrenbang nasional yang dilahirkan oleh pemerintah negara kita. Kalau mencermati proses pelaksanaannya, bahwa Musrenbang di Kabupaten Wakatobi ini hanya menurut keinginan atau

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> kebutuhan para lembaga saja. SKPD dan sejenisnya bukan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi boleh dikatakan peran unsur masyarakat hampir tidak ada. Terlihat dari setiap pelaksanaannya usulan masyarakat terkadang sama sekali tidak di akomodir. Kita harus menata ulang pelaksanaan Musrenbang ini agar berjalan sesuai dengan tujuan kita bersama. Dengan demikian kami unsur legislatif sebagai wakil masyarakat yang senantiasa duduk bersama dengan pemerintah dalam merumuskan dalam pemanfaatan anggaran akan berjalan lancar dan tertib serta kondusif. (Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, tanggal 1 Februari 2009).

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang mutlak adanya. Pelibatan para pelaku pembangunan sangat jelas aturannya. Keterlibatan para pelaku pembangunan bisa secara langsung dan bisa juga melalui aspirasi yang dijaring pada sub-komunitas. Agar hasil serap aspirasi berdaya guna dan berhasil guna tinggi, maka perlu adanya penyadaran yang terus-menerus, agar aspirasi masyarakat tidak menghasilkan daftar keinginan, melainkan menghasilkan daftar kebutuhan prioritas.

Arif (2006:149-150), bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu Negara. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimilki masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (partisipatif). Dengan kata lain partisipasi masyarakat merupakan kata kunci agar suatu pembangunan berbias sukses.

Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Pusic (dalam Adi, 2001:206-207)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas .

c. Dimensi Ketepatan Waktu

Dimensi ketiga dari variabel efektivitas pelaksanaan Musrenbang adalah ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang. Di mana untuk mengetahui hal tersebut ditanyakan empat indikator kepada reseponden, yakni waktu pelaksanaan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, dengan sebaran jawaban responden sebagai berikut.

Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Waktu Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten

Jawaban (Skor)	Indikator						Σf	$\Sigma f(s)$
	1		2		3			
	F	%	F	%	F	%		
Tidak Setuju (1)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurang Setuju (2)	6	15,0	5	12,5	12	30,0	23	23
Agak Setuju (3)	27	67,5	30	75,0	25	62,5	82	164
Setuju (4)	7	17,5	5	12,5	3	7,5	15	45
Sangat Setuju (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	40	100,0	40	100,0	40	100,0	120	233

Sumber: Olahan data primer, 2009

Berdasarkan tabel di atas, untuk semua indikator dimensi ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang mulai tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten, jawaban responden cenderung kadang tepat waktu. Di mana jawaban "agak setuju": 67,5% untuk indikator 1(waktu pelaksanaan Musrenbang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tingkat desa/kelurahan), 75,0% untuk indikator 2 (waktu pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan), dan 62,5% untuk indikator 3 (waktu pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten). Bila dirata-ratakan jawaban "agak setuju" dari dimensi ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi adalah 68,33%.

Perkalian frekuensi pada masing-masing item jawaban dengan skornya menghasilkan skor aktual sebesar 233. Adapun skor ideal yang mungkin diperoleh dari 3 indikator adalah 3 x 3 x 40 = 360. Jadi persentase skor aktual terhadap skor ideal adalah 64,72%. Berdasarkan kriteria yang telah dikemukakan pada bab tiga (Metode Penelitian), maka secara rata-rata jawaban responden terhadap dimensi ini berada pada kategori "cukup efektif ". Makna dari cukup efektif berkaitan dengan ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, dalam tiga tahun terakhir belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Musrenbang tingkat desa/kelurahan dalam rangka merencanakan program pembangunan yang akan diusulkan pada tingkat kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari-Maret tahun anggaran sebelumnya. Kemudian Musrenbang tingkat kecamatan dalam rangka merencanakan program pembangunan tingkat kecamatan atau menyempurnakan usulan program pembangunan dari desa/kelurahan yang selanjutnya akan diusulkan pada tingkat kabupaten dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun anggaran sebelumnya. Musrenbang tingkat kabupaten dalam rangka merencanakan program pembangunan tingkat kabupaten berdasarkan usulan program pembangunan dari desa/kelurahan dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kecamatan, yang selanjutnya menjadi agenda penyusunan RKPD dilaksanakan pada bulan Juni-Juli tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan jadwal pelaksanaan Musrenbang yang telah ditetapkan di atas, pelaksanaan musrenbang selama tiga tahun terakhir belum sesuai jadwal, baik pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, serta kabupaten.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi memberikan tanggapan ketika wawancara mengemukakan bahwa:

> "Belum tepatnya waktu pelaksanaan Musrenbang ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kesiapan perangkat pemerintah mulai pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten kurang memperhatikan bahan Musrenbang, dan masalah prosedur penyusunan anggaran yang selalu terlambat". (Hasil wawancara Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, tanggal 14 Februari 2009).

Dengan demikian dimensi ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang mulai pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten belum berjalan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan pada setiap tahun anggaran.

d. Dimensi Keaktifan Peserta

Salah satu aspek yang dinilai efektivitas dalam pelaksanaan Musrenbang adalah keaktifan peserta Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang akan mempunyai nilai, arah dan tujuan jika didalamnya tercipta keseriusan dan kepedulian akan pentingnya Musrenbang itu sendiri. Paling tidak ada hasil yang hendak dicapai setelah proses pelaksanaannya selesai. Pada dimensi ini indikator yang dinilai antara lain keaktifan peserta menghadiri Musrenbang, keaktifan mengikuti jalannya Musrenbang, aktif

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

memberikan informasi-informasi pembangunan, keaktifan memberikan saran, dan keaktifan peserta mengikuti Musrenbang sampai selesai, dengan sebaran jawaban responden sebagai berikut.

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Keaktifan Peserta Mengikuti Musrenbang

Jawaban (Skor)	Indikator								Σf	$\Sigma f(s)$
	1		2		3		4			
	F	%	F	%	F	%	F	%		
Tidak Setuju (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurang Setuju (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agak Setuju (3)	15	37,7	20	50,0	26	65,0	24	60,0	85	255
Setuju (4)	17	42,5	12	30,0	12	30,0	13	32,5	54	108
Sangat Setuju (5)	8	20,0	8	20,0	2	5,0	3	7,5	21	21
Jumlah	40	100,0	40	100,0	40	100,0	40	100,0	160	384

Sumber: Olahan data primer, 2009

Bila dirata-ratakan jawaban "agak setuju" dari dimensi keaktifan peserta dalam mengikuti pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi adalah 53,18%. Perkalian frekuensi pada masing-masing item jawaban dengan skornya menghasilkan skor aktual sebesar 384. Adapun skor ideal yang mungkin diperoleh dari 4 indikator adalah 4 x 3 x 40 = 480. Jadi persentase skor aktual terhadap skor ideal adalah 80,0%. Berdasarkan kriteria yang telah dikemukakan pada bab tiga (Metode Penelitian), maka secara rata-rata jawaban responden terhadap dimensi ini berada pada kategori "efektif".

Makna dari efektif berkaitan dengan keaktifan peserta dalam mengikuti pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi menunjukkan bahwa peserta

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Musrenbang telah aktif mengikuti jalannya proses Musrenbang yang dilakukan dalam merencanakan program pembangunan, meskipun masih terdapat beberapa peserta yang kurang aktif.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi menilai keaktifan peserta dalam proses pelaksanaan Musrenbang menyatakan bahwa:

> "Keaktifan peserta Musrenbang dari tiap instansi sudah memadai, hanya kadang-kadang masih dijumpai beberapa pejabat yang tidak mengikuti pelaksanaan Musrenbang". (Hasil wawancara Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, tanggal 14 Februari 2009).

Dengan demikian dimensi keaktifan peserta pelaksanaan Musrenbang mulai pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga dengan demikian proses pelakasanaan Musrenbang tidak berjalan baik.

e. Dimensi Ketepatan Rumusan Rencana Program

Dimensi berikutnya adalah ketepatan rumusan rencana program yang diajukan oleh setiap SKPD. Dalam artian bahwa rumusan rencana program disusun secara sistematis, tepat, akurat, diperinci menurut tujuan, sasaran, dan manfaat program, dan selalu disetujui oleh lembaga legislatif.

Untuk mengungkap hal tersebut berikut disajikan data jawaban reponden mengenai ketepatan rumusan rencana program yang dilakukan di empat SKPD Kabupaten Wakatobi sebagai sampel penelitian.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.18 Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Rumusan Rencana Program

Jawaban (Skor)	Indikator								Σf	$\Sigma f(s)$
	1		2		3		4			
	F	%	F	%	F	%	F	%		
Sangat Tidak Setuju (1)	2	5,0	3	7,5	2	5,0	1	2,5	8	8
Tidak Setuju (2)	1	2,5	2	5,0	2	5,0	2	5,0	7	14
Kurang Setuju (3)	5	12,5	20	50,0	6	15,0	3	7,5	34	102
Setuju (4)	27	67,5	12	30,0	25	62,5	26	65,0	90	360
Sangat Setuju (5)	5	12,5	3	7,5	5	12,5	8	20,0	21	105
Jumlah	40	100,0	40	100,0	40	100,0	40	100,0	160	589

Sumber: Olahan data primer, 2009

Bila dirata-ratakan jawaban "setuju" dari dimensi ketepatan rumusan rencana program pembangunan di Kabupaten Wakatobi adalah 56,25%. Perkalian frekuensi pada masing-masing item jawaban dengan skornya menghasilkan skor aktual sebesar 589. Adapun skor ideal yang mungkin diperoleh dari 4 indikator adalah 4 x 5 x 40 = 800. Jadi persentase skor aktual terhadap skor ideal adalah 73,63%. Berdasarkan kriteria yang telah dikemukakan pada bab tiga (Metode Penelitian), maka secara rata-rata jawaban responden terhadap dimensi ini berada pada kategori "efektif".

Makna efektif berkaitan dengan ketepatan rumusan program yang diajukan SKPD sebagai hasil olahan data Musrenbang di Kabupaten Wakatobi menunjukkan bahwa telah dirumuskan dengan baik, sesuai dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Artinya program yang diusulkan telah sesuai dengan kebutuhan, dan dilengkapi dengan penjelasan secara rinci mengenai tujuan program, strategi, input, output, outcome dan impact dari program yang diusulkan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kelemahan dalam dimensi ini adalah rumusan program yang diusulkan SKPD masih sering mendapat penolakan dari lembaga legislatif dalam proses penyusunan APBD setiap rencana program.

Hal ini disampaikan juga oleh Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, yang menjelaskan bahwa:

> "Rumusan program yang diusulkan SKPD selalu mendapat hambatan di lembaga legislatif, sehingga tidak semua usulan bisa diterima, yang sebenarnya bukan karena program itu kurang baik, tetapi lebih disebabkan mekanisme penyusunan anggaran yang cenderung menggunakan pendekatan politik oleh anggota legislatif. Misalnya Dinas Pendidikan pada Tahun 2007 mengusulkan anggaran pendidikan S2 bagi pegawai Pemda Wakatobi, namun tidak disetujui oleh DPRD. (Hasil wawancara Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, tanggal 14 Februari 2009).

Dengan demikian dimensi ketepatan rumusan program yang diusulkan setiap SKPD pada dasarnya telah dilakukan dengan baik. Meskipun perlu disempurnakan sesuai indikator penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga mampu meyakinkan anggota legislatif, bahwa program-program yang dibuat oleh SKPD benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Wakatobi.

f. Dimensi Ketepatan Program Pembangunan

Dimensi ini mempersoalkan ketepatan program pembangunan, maksudnya adalah apakah program yang telah ditetapkan benar-benar tepat sesuai kebutuhan mendasar, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang ditujukan oleh sebuah program.

Program pembangunan merupakan bagian atau hal-hal yang direncanakan untuk dilaksnakan sebagai implementasi dari Musrenbang. Tepat dan tidaknya dalam mengusulkan tergantung dari kesepahaman sesuai daftar prioritas yang ada dari

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masyarakat yang disepakati dalam musyawarah yang nantinya akan tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, bukan memprioritasi kepentingan politik, pribadi atau golongan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen penata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Dalam mengungkap hal tersebut di atas, ada 4 indikator yang digunakan untuk mengukurnya, yakni: 1) Program yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan SKPD, 2) Program yang ditetapkan mudah dilaksanakan, 3) Program yang ditetapkan sesuai usulan dari bawah, dan 4) Program yang ditetapkan sesuai Rencana Strategi Daerah.

Untuk mengetahui hal tersebut, berikut disajikan data menurut tanggapan atau penilaian responden penelitian, sebagai berikut.

Tabel 4.19 Tanggapan Responden Mengenai Ketepatan Program Pembangunan yang Ditetapkan

Jawaban (Skor)	Indikator								$\sum f$	$\sum f(s)$
	1		2		3		4			
	F	%	F	%	F	%	F	%		
Sangat Tidak Setuju (1)	2	5,0	3	7,5	1	2,5	1	2,5	7	7
Tidak Setuju (2)	1	2,5	2	5,0	4	10,0	2	5,0	9	18
Kurang Setuju (3)	2	5,0	2	5,0	29	72,5	4	10	37	111
Setuju (4)	29	72,5	30	75	5	12,5	32	80	96	380
Sangat Setuju (5)	6	12,5	3	7,5	1	2,5	1	2,5	11	55
Jumlah	40	100,0	40	100,0	40	100,0	40	100,0	160	553

Sumber: Olahan data primer, 2009

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bila dirata-ratakan jawaban "setuju" dari dimensi ketepatan program pembangunan di Kabupaten Wakatobi adalah 60,0%. Perkalian frekuensi pada masing-masing item jawaban dengan skornya menghasilkan skor aktual sebesar 553. Adapun skor ideal yang mungkin diperoleh dari 4 indikator adalah 4 x 5 x 40 = 800. Jadi persentase skor aktual terhadap skor ideal adalah 69,13%. Berdasarkan kriteria yang telah dikemukakan pada bab tiga (Metode Penelitian), maka secara rata-rata jawaban responden terhadap dimensi ini berada pada kategori "efektif".

Makna efektif berkaitan dengan ketepatan program yang ditetapkan artinya bahwa hasil perencanaan yang diperoleh dari proses Musrenbang mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten telah menghasilkan program yang sesuai kebutuhan dan skala prioritas, serta dapat dilaksanakan dengan baik. Hanya saja masih perlu ditingkatkan, sehingga program-program pembangunan yang ditetapkan senantiasa mengacu pada kebutuhan pembangunan daerah yang paling mendesak.

Hal ini senada dengan informasi yang dihimpun dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang senantiasa mendampingi dan mendukung proses pembangunan yang hadir di masyarakat, mengatakan bahwa:

> "Pada setiap tahunnya program-program pembangunan yang hadir di Kabupaten Wakatobi hampir tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Banyak program-program yang tidak tepat sasaran yang hanya membuang-buang anggaran. Ini sangat membingungkan masyarakat kenapa samapai terjadi demikian. Pemerintah harusnya sensitif dengan masyarakat karena keberhasilan suatu daerah diukur dari kesejahtraan masyarakat bukan kekayaan para pemangku jabatan yang melimpah". (Hasil wawancara dengan unsur LSM di Kabupaten Wakatobi, tanggal 3 Februari 2009).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kelemahan dalam proses penetapan program, kadang-kadang bukan usulan dari unit kerja paling bawah. Misalnya hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, masih kurang diakomodir dalam penetapan program. Artinya kecenderungan perencanaan pembangunan di Kabupaten Wakatobi adalah perencanaan dari atas (*top down planning*). Sementara Musrenbang merupakan media perencanaan dari bawah (*bottom up planning*).

Hal ini juga dikemukakan oleh oleh Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, menjelaskan bahwa:

> "Perencanaan pembangunan di Kabupaten Wakatobi masih cenderung perencanaan dari atas (*top down planning*). Hal ini dapat dilihat banyaknya usulan dari unit kerja di bawah, tetapi tidak mampu diakomodir dalam penetapan anggaran. Tentunya hal ini pula merupakan satu kelemahan dalam perencanaan pembangunan, hanya saja tidak bisa dihindari karena mekanisme penyusunan anggaran yang belum berjalan secara optimal. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya jumlah usulan, sementara kemampuan anggaran sangat terbatas. (Hasil wawancara Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Februari 2009).

Dengan demikian dimensi ketepatan program yang ditetapkan pada dasarnya telah mencerminkan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Hanya saja perlu diperbaiki lagi sehingga nilai tambah yang diharapkan dari Musrenbang sesuai dengan harapan sebagaimana yang tertuang dalam tujuan Musrenbang itu sendiri. Dengan kata lain menyelenggarakan Musrenbang bukan hanya sekedar musyawarah, tetapi hasilnya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Paradigma pembangunan dalam hal ini harus menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pemerintah harus mampu membawa perubahan-perubahan dan pembaharuan kepada masyarakat. Sebagai katalisator, pemerintah harus

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dapat mengenali faktor-faktor yang mampu mendorong laju pembangunan nasional dan menarik manfaat yang sebesar-besarnya. Sebagai dinamisator, pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan. Sebagai stabilisator, pemerintah berusaha menciptakan suasana yang tertib dan aman. Sebagai pelopor, pemerintah harus mampu menunjukkan contoh-contoh nyata yang baik dan membangun dalam tindakan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai *provider* dan pelaksana dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengabil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses Musrenbang.

2. Variabel Hasil Musrenbang

a. Manfaat Musrenbang dalam Penyusunan APBD

Musrenbang merupakan arena formal bagi para pemangku kepentingan dalam membahas prioritas kegiatan pembangunan di daerah yang akan menjadi bahan bagi penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Forum ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis, karena semua pihak dapat menyamakan persepsi dalam meningkatkan akselerasi pembangunan sekaligus memberikan pemikiran yang terbaik dalam rangka mensukseskan program pembangunan.

Salah satu dimensi untuk mengetahui hasil Musrenbang bermanfaat atau tidaknya adalah sejauhmana hasil Musrenbang tersebut mampu membantu dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di mana program pembangunan yang ditetapkan dalam APBD merupakan hasil Musrenbang mulai

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Untuk mengungkap hal tersebut, ada tiga indikator yang digunakan yakni.

1. Membantu SKPD dalam menyusun program dan anggaran
2. Membantu Bappeda dalam merumuskan program pembangunan dan anggaran
3. Membantu dalam perumusan APBD secara keseluruhan.

Berkaitan dengan ketiga indikator tentang hasil Musrenbang tersebut mampu membantu dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka disajikan data tanggapan responden sebagai berikut.

Tabel 4.20 Tanggapan Responden Mengenai Manfaat Hasil Musrenbang Dalam Menyusun Program Tiap SKPD, di Bappeda dan APBD

Jawaban (Skor)	Indikator						Σf	$\Sigma f(s)$
	1		2		3			
	F	%	F	%	F	%		
Sangat Tidak Setuju (1)	1	2,5	0	0,0	0	0,0	1	1
Tidak Setuju (2)	1	2,5	0	0,0	2	5,0	3	6
Kurang Setuju(3)	2	5,0	3	5,0	5	12,5	10	30
Setuju (4)	31	77,5	36	90,0	35	87,5	102	408
Sangat Setuju (5)	5	12,5	1	2,5	1	2,5	7	35
Jumlah	40	100,0	40	100,0	40	100,0	123	465

Sumber : Olahan data primer, 2009

Bila dirata-ratakan jawaban "setuju" dari dimensi hasil Musrenbang membantu dalam penyusunan anggaran dan program pembangunan di Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan adalah 85,0%. Perkalian frekuensi pada masing-masing

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

item jawaban dengan skornya menghasilkan skor aktual sebesar 465. Adapun skor ideal yang mungkin diperoleh dari 3 indikator adalah 3 x 5 x 40 = 600. Jadi persentase skor aktual terhadap skor ideal adalah 77,5%. Berdasarkan kriteria yang telah dikemukakan pada bab tiga (Metode Penelitian), maka secara rata-rata jawaban responden terhadap dimensi ini berada pada kategori "efektif".

Makna efektif berkaitan dengan hasil Musrenbang dalam membantu penyusunan anggaran artinya bahwa hasil Musrenbang selama ini cukup membantu SKPD, Bappeda Kabupaten Wakatobi dalam menyusun anggaran daerah setiap tahun. Hasil Musrenbang menyajikan data-data tentang kebutuhan masyarakat yang lebih riil, sehingga dijadikan dasar pengusulan program. Artinya pelaksanaan Musrenbang memiliki manfaat yang sangat besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dalam membantu menentukan skala prioritas pembangunan daerah di berbagai bidang.

Hal senada dikemukakan oleh oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, menjelaskan bahwa:

> "Hasil Musrenbang yang dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, sangat bermanfaat dalam penyusunan program dan anggaran di kantor kami. Hal ini karena data-data yang dibutuhkan cukup lengkap dari hasil Musrenbang, yang berisikan berbagai usulan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hanya saja kadang-kadang usulan terlalu banyak, sementara anggaran yang tersedia relatif terbatas, sehingga kami melakukan seleksi, usulan program mana yang menjadi prioritas. (Hasil wawancara dengan beberapa informan, tanggal 26 Februari 2009).

Dengan demikian hasil Musrenbang pada dimensi ini sangat membantu SKPD dalam menyusun program pembangunan di Kabupaten Wakatobi. Sehingga Musrenbang perlu lebih ditingkatkan kualitasnya, agar dapat menyajikan berbagai usulan program dari bawah sesuai kebutuhan masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Terserapnya Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat

Dimensi kedua dari hasil Musrenbang yang diteliti adalah sejauhmana aspirasi dan kebutuhan masyarakat mampu diserap atau mampu dipenuhi dalam bentuk berbagai program pembangunan, baik materil maupun non materil, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk mengungkap hal ini maka ada empat indikator yang digunakan, yakni:

1. Hasil Musrenbang mampu menyerap aspirasi masyarakat dari aspek materil
2. Hasil Musrenbang mampu menyerap kebutuhan masyarakat dari aspek non-materil
3. Hasil Musrenbang memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek materil
4. Hasil Musrenbang memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek non-materil

Berkaitan dengan keempat indikator tersebut diatas, maka disajikan data tanggapan responden sebagai berikut.

Tabel 4.21 Tanggapan Responden Mengenai Terserapnya Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat Melalui Musrenbang pada APBD Kabupaten Wakatobi Tahun 2009

Jawaban (Skor)	Indikator								Σf	$\Sigma f(s)$
	1		2		3		4			
	F	%	F	%	F	%	F	%		
Sangat Tidak Setuju (1)	1	2,5	0	0	0	0	1	2,5	2	2
Tidak Setuju (2)	3	7.5	0	0	0	0	1	2.5	4	8
Kurang Setuju (3)	1	2,5	5	12,5	3	7,5	2	5	11	33
Setuju (4)	30	75	35	87,5	36	90	31	77,5	132	528
Sangat Setuju (5)	5	12,5	0	0	1	2,5	5	12,5	11	55
Jumlah	40	100,0	40	100,0	40	100,0	40	100,0	160	626

Sumber: Olahan data primer, 2009

UNIVERSITAS TERBUKA

Bila dirata-ratakan jawaban "setuju" dari dimensi terserapnya aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang pada APBD Kabupaten Wakatobi adalah 82,5%. Perkalian frekuensi pada masing-masing item jawaban dengan skornya menghasilkan skor aktual sebesar 626. Adapun skor ideal yang mungkin diperoleh dari 4 indikator adalah 4 x 5 x 40 = 800. Jadi persentase skor aktual terhadap skor ideal adalah 78,3%. Berdasarkan kriteria yang telah dikemukakan pada bab tiga (Metode Penelitian), maka secara rata-rata jawaban responden terhadap dimensi ini berada pada kategori "efektif".

Makna efektif berkaitan dengan hasil Musrenbang dalam terserapnya aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Wakatobi artinya bahwa hasil Musrenbang tahun 2008, SKPD menganggap telah menyerap baik aspirasi dan kebutuhan masyarakat, namun dalam realisasinya masih banyak usulan kegiatan yang belum diakomodasikan dalam APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2009. Pemerintah dan unsur legislatif bersama lembaga-lembaga swadaya masyarakat harus dapat memberikan perhatian yang serius terhadap hal ini agar pembangunan yang dijalankan dapat memberi manfaat sesuai arah dan tujuan pembangunan itu sendiri guna menuju masyarakat yang sejahtera.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan, bahwa:

> "Pada kenyataannya masyarakat masih bingung di mana dan kapan aspirasi mereka disalurkan. Memang ada musrenbang, tapi perhatian masyarakat untuk Musrenbang sangat kecil. Hal ini tidak terlepas dari mekanisme perencanaan yang ada, karena indikasi menunjukkan bahwa perencanaan seakan-akan dari bawah, tetapi kemudian hasil keputusan akhir (program pembangunan) banyak yang tidak sesuai dengan usulan".(Wawancara dengan Tokoh Masyarakat pada tanggal 2 Pebruari 2009)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka dibawah ini akan diuraikan usulan program dan kegiatan prioritas setiap Kecamatan sebagai hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi (Lampiran 5) yang bersumber dari hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan/kecamatan tahun 2008 di empat SKPD sampel penelitian.

1) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Wangi-Wangi

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan kecamatan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Peranan Pemerintah Kecamatan lebih bertungsi sebagai pelaksana administrasi, sedangkan fungsi pembangunan lebih diserahkan kepada masing-masing desa/kelurahan.

Kecamatan Wangi-Wangi sebagai ibukota Kabupaten Wakatobi dengan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat, baik materil maupun nonmateril yang disampaikan melalui usulan-usulan di forum Musrenbang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya yang program dan keigiatannya akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Wakatobi.

Berkaitan dengan penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Wangi-Wangi tersebut, berikut disajikan data jumlah usulan kegiatan prioritas kebutuhan dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang diambil dari hasil keputusan Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan yang terakomodasi dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun 2009, yaitu:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.22 Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Wangi-Wangi pada Tahun 2008

SKPD	Program dan Kegiatan Prioritas				Σf
	Diakomodasi		Tidak Diakomodasi		
	F	%	F	%	
Dinas Pendidikan Nasional, Pora	3	42,9	4	57,1	7
Dinas Kesehatan	4	80,0	1	20,0	5
Dinas Pekerjaan Umum, Pertamben	21	42,0	29	58,0	50
Dinas Perhubungan, Kominfo	1	50,0	1	50,0	2
Jumlah	29	45,3	35	54,7	64

Sumber: Olahan Data Sekunder(Lampiran 5)

Tabel 4.22 menunjukan bahwa penyerapan aspirasi dan prioritas kebutuhan masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi yang terakomodasi dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 adalah 45,3%, sedang yang tidak terakomodasi 54,7%, dari 64 program dan kegiatan prioritas yang diusulkan. Hal ini dapat dikatakan bahwa hasil Musrenbang di Kecamatan Wangi-Wangi ini belum menggambarkan aspiratif. Data diatas menunjukan pula bahwa program dan kegiatan prioritas yang tidak terakomodasi masih lebih besar dibanding dengan yang terakomodasi.

Kriteria normatif untuk menentukan program prioritas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, pasal 17 ayat (5) menyebutkan bahwa "Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapain keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan". Kriteria normatif ini hendaknya menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan prioritas pada hasil Musrenbang di

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kabupaten Wakatobi untuk dapat menciptakan kepastian bahwa program dan kegiatan tersebut berorientasi kepada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat serta memperhatikan aspek-aspek keadilan dalam mengatasi kesenjangan-kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya.

Berdasarkan pendapat di atas, Kartasasmita (1997:57), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukan sendiri.

2) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

Masyarakat di Kabupaten Wakatobi dengan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat, baik materil maupun nonmateril yang disampaikan melalui forum Musrenbang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini tentunya dengan tumpuan keinginan bahwa apa yang menjadi kebutuhan mereka yang disampaikan melaui usulan-usulan di forum ini dapat tercapai mulai dari penyusunan rencana hingga terakomodasinya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berikut disajikan data jumlah hasil usulan kegiatan prioritas Kecamatan Wangi-Wangi Selatan dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang diambil dari hasil keputusan Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan yang terakomodasi dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun 2009, yaitu:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.23 Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada Tahun 2008

SKPD	Program dan Kegiatan Prioritas				Σf
	Diakomodasi		Tidak Diakomodasi		
	F	%	F	%	
Dinas Pendidikan Nasional, Pora	4	57,1	3	42,9	7
Dinas Kesehatan	2	33,3	4	66,7	6
Dinas Pekerjaan Umum, Pertamben	9	36,0	16	64,0	25
Dinas Perhubungan, Kominfo	10	47,6	11	52,4	21
Jumlah	25	42,4	34	57,6	59

Sumber: Olahan Data Sekunder(Lampiran 5)

Berdasarkan uraian data yang disajikan pada tabel diatas, menunjukan bahwa penyerapan aspirasi dan kebutuhan prioritas masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan yang terakomodasi dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 yaitu 42,4%, sedang yang tidak terakomodasi adalah 57,6%, dari 59 program dan kegiatan prioritas yang diusulkan. Seperti halnya hasil Musrenbang di Kecamatan Wangi-Wangi, bahwa program dan kegiatan prioritas di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan belum berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Hal ini ditandai dengan program dan kegiatan yang diakomodasi masih jauh lebih kecil dibanding dengan yang tidak terakomodasi.

Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa Musrenbang tidaklah dalam upaya membuat daftar panjang (*long-list*) usulan kegiatan pembangunan, yang merupakan daftar keinginan yang tidak terukur dengan kemampuan pembiayaan. Mengingat keterbatasan kemampuan pembiayaan, maka Musrenbang harus menghasilkan daftar pendek (*short-list*) usulan kegiatan pembangunan yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

merupakan daftar prioritas kebutuhan. Musrenbang merupakan alat untuk menjaring kebutuhan pembangunan dari berbagai tingkat. Yang lebih penting lagi adalah apabila Musrenbang dilaksanakan dengan mekaniksme yang benar, dalam rangka menentukan usulan kegiatan prioritas yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan transparan. AIPRD LOGICA *(An Australian Goverment AusAID Initiative)* (2007:14-16) menambahkan, bahwa dalam kegiatan pembangunan partisipatif, masyarakat seharusnya menjadi pelaku utama dan penentu. Artinya aspirasi, kepentingan, kemauan, dan kemampuan masyarakatlah yang menjadi landasan pembangunan.

Mencermati peran penting pelaksanaan kebijakan Musrenbang dalam menyampaiakan aspirasi dan kebutuhan prioritas masyarakat ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi mengemukakan:

> "Bahwasanya Wakatobi dengan segala keterbatasan-nya harus mampu menciptakan pemerintahan dengan sistem perencanaan yang optimal. Pemerintah sebagai *stakeholder* adalah pemegang kendali dalam menentukan baik dan buruknya tatanan perencanaan pembangunan. Tanpa didasari oleh tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi serta kepekaan terhadap usulan kebutuhan dari masyarakat maka secara dramatis Kabupaten kita akan terpuruk jauh terbelakang dengan daerah-daerah lain. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran haruslah menjadi prioritas utama dalam pencapaian tujuan pembangunan. Juga Musrenbang jangan hanya jadi ajang asal. Pemerintah harus mampu menuntun dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tujuan dan arah pelaksanaan pembangunan yang direncanakan" (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, tanggal 19 Januari 2009).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Kaledupa

Kabupaten Wakatobi yang terdiri dari daerah kepulauan dengan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat, baik materil maupun nonmateril yang disampaikan melalui forum Musrenbang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini tentunya dengan tumpuan keinginan masyarakat Kecamatan Kaledupa agar apa yang menjadi kebutuhan mereka yang disampaikan melaui usulan-usulan di forum ini dapat tercapai mulai dari penyusunan rencana hingga terakomodasinya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, berikut disajikan data jumlah hasil usulan kegiatan prioritas Kecamatan Kaledupa dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang diambil dari hasil keputusan Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan yang terakomodasi dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun 2009, yaitu:

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.24 Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Kaledupa pada Tahun 2008

SKPD	Program dan Kegiatan Prioritas				Σf
	Diakomodasi		Tidak Diakomodasi		
	F	%	F	%	
Dinas Pendidikan Nasional, Pora	0	0	1	100	1
Dinas Kesehatan	0	0	1	100	1
Dinas Pekerjaan Umum, Pertamben	13	48,1	14	51,9	27
Dinas Perhubungan, Kominfo	4	66,7	2	33,3	6
Jumlah	17	46,6	18	53,4	35

Sumber: Olahan Data Sekunder(Lampiran 5)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.24 menunjukan bahwa penyerapan aspirasi dan prioritas kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kaledupa yang terakomodasi dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 adalah 46,6%, sedang yang tidak terakomodasi 53,4%, dari 35 program dan kegiatan prioritas yang diusulkan. Perbandingan prosentase penyerapan aspirasi dan kebutuan masyarakat masih lebih besar tidak terkomodasi sebagaimana dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah dalam meningkatkan nilai manfaat usulan dalam pelaksanaan Musrenbang, haruslah berupaya memberikan pemahaman dan sosialisasi seluas-luasnya, agar masyarakat lebih mengerti akan peran pentingnya Musrenbang itu dilaksanakan. Hal ini seperti yang ditunjukkan dalam tabel diatas bahwa usulan yang dibidangi oleh Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kesehatan dari kecamatan ini hanya dengan masing-masing satu usulan program dan kegiatan kebutuhan. Ironisnya, dari masing-masing usulan tersebut tidak dapat diakomodasi dalam APBD tahun 2009. Berkaitan dengan hal ini diakui oleh Tokoh Masyarakat yang mengatakan bahwa:

> "Pada kenyataannya masyarakat masih bingung di mana dan kapan aspirasi mereka disalurkan. Memang ada musrenbang, tapi perhatian masyarakat untuk Musrenbang sangat kecil. Hal ini tidak terlepas dari mekanisme perencanaan yang ada, karena indikasi menunjukkan bahwa perencanaan seakan-akan dari bawah, tetapi kemudian hasil keputusan akhir (program pembangunan) banyak yang tidak sesuai dengan usulan". (Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, tanggal 2 Pebruari 2009)

Belum tersedianya patokan alokasi anggaran dalam proses pelaksanaan Musrenbang menyebabkan Musrenbang menghasilkan daftar usulan program

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang bersifat daftar keinginan dan hanya sedikit yang didanai oleh APBD. Salah satu alasannya adalah keterbatasan keuangan yang sangat mengikat pemerintah daerah. Dengan pengeluaran rutin yang menyedot 52,5 % total pendapatan daerah hanya sedikit alokasi untuk membiayai program. Di saat yang sama masing-masing SKPD dan anggota DPRD memiliki usulan program pembangunan yang ingin dibiayai. Konsekuensinya, hanya tersisa sedikit alokasi dana untuk proses Musrenbang.

4) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Kaledupa Selatan

Kecamatan Kaledupa Selatan merpuakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kaledupa di Kabupaten Wakatobi yang dengan berbagai aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat, baik materil maupun nonmateril yang disampaikan melalui forum Musrenbang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini tentunya dengan tumpuan keinginan bahwa apa yang menjadi kebutuhan mereka yang disampaikan melaui usulan-usulan di forum ini dapat tercapai mulai dari penyusunan rencana hingga terakomodasinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Kaledupa Selatan tersebut, berikut disajikan data jumlah usulan kegiatan prioritas kebutuhan dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang diambil dari hasil keputusan Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan yang terakomodasi dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun 2009, yaitu:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.25 Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Kaledupa Selatan pada Tahun 2008

SKPD	Program dan Kegiatan Prioritas				Σf
	Diakomodasi		Tidak Diakomodasi		
	F	%	F	%	
Dinas Pendidikan Nasional, Pora	4	44,4	5	55,6	9
Dinas Kesehatan	4	44,4	5	55,6	9
Dinas Pekerjaan Umum, Pertamben	16	43,2	21	56,8	37
Dinas Perhubungan, Kominfo	0	0	2	100	2
Jumlah	24	42,1	33	57,9	57

Sumber: Olahan Data Sekunder(Lampiran 5)

Berdasarkan uraian data pada tabel diatas menunjukan bahwa penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kaledupa Selatan yang terakomodasi dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 adalah 42,1%, sedang yang tidak terakomodasi 57,9%, dari 57 program dan kegiatan prioritas yang diusulkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Penyerapan aspirasi dan kebutuan masyarakat yang masih banyak tidak terakomodasi ini harus membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Wakatobi terhadap tingkat kepedulian kebutuhan masyarakatnya. Hamzens (2005:130) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan diharapkan menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang bermutu yang akan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan, yang ditujukan bagi pelanggan-pelanggannya. Dalam konsep tata pemerintahan yang baik *(good governance)* pelanggan pembangunan itu adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pembangunan harus dinikmati oleh semua komponen bangsa.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.26 menunjukan bahwa penyerapan aspirasi dan kebutuhan prioritas masyarakat di Kecamatan Tomia yang terakomodasi dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 adalah 34,7%, sedang yang tidak terakomodasi 65,3%, dari 72 program dan kegiatan prioritas yang diusulkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sedikit berbeda dengan kecamatan lainnya, bahwa di kecamatan lain, jenis usulan programnya cenderung pada kegiatan yang dibidangi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi. Dimana jenis usulan program dan kegiatan di kecamatan ini lebih mengarah kepada usulan kegiatan yang dibidangi oleh Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olehraga dan Dinas Kesehatan.

Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa pada daerah ini tingkat pemahaman terhadap fungsi pelakasanaan Musrenbang sedikitnya telah dimengerti, dan tingkat kepedulian dan kebutuhan masyarakat telah mencerminkan nilai-nilai kepribadian yang diharapkan, artinya bahwa apa yang menjadi usulan mereka adalah benar-benar mengarah kepada pencapaian tujuan pembangunan dalam mensejahterakan rakyat yang berasas keadilan dan pemerataan. Namun usulan hanyalah sebatas usul, akan tetapi pada realisasinya harus berhamba kepada kesabaran masyarakat. Penulis mencoba menelusuri hal ini dengan menggali informasi dari Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, sebagaimana yang diakui dalam penuturannya berikut.

> "Perencanaan pembangunan di Kabupaten Wakatobi masih cenderung perencanaan dari atas (*top down planning*). Hal ini dapat dilihat banyaknya usulan dari unit kerja di bawah, tetapi tidak mampu diakomodir dalam penetapan anggaran. Tentunya hal ini merupakan satu kelemahan dalam perencanaan pembangunan, hanya saja tidak bisa dihindari karena mekanisme penyusunan anggaran yang belum berjalan secara optimal. Hal ini juga disebabkan oleh

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

banyaknya jumlah usulan, sementara kemampuan anggaran sangat terbatas". (hasil wawancara dengan Kepala Bappeda, tanggal 16 Pebruari 2009)

Pandangan yang berbeda mengenai tidak terakomodasinya sejumlah program yang diusulkan dalam Musrenbang ini oleh Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, mengatakan bahwa:

"Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi tidak berjalan sesuai dengan pola asas-asas pelaksanaan Musrenbang nasional yang dilahirkan oleh pemerintah negara kita. Kalau mencermati proses pelaksanaannya, bahwa Musrenbang di Kabupaten Wakatobi ini hanya menurut keinginan atau kebutuhan para lembaga saja. SKPD dan sejenisnya bukan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi boleh dikatakan peran unsur masyarakat hampirtidak ada. Terlihat dari setiap pelaksanaan usulan masyarakat terkadang sama sekali tidak diakomodasi. Kita harus menata ulang pelaksanaan Musrenbang ini agar berjalan sesuai dengan tujuan kita bersama. Dengan demikian kami unsur legislatif sebagai wakil masyarakat yang senantiasa duduk bersama dengan pemerintah dalam merumuskan dalam pemanfaatan anggaran akan berjalan lancar dan tertib serta kondusif".

Tjokroamidjojo (1982:49) dalam salah satu ulasannya pada ciri perencanaan pembangunan mengatakan, pemerataan pembangunan antardaerah dalam negara adalah pemerataan dalam memikul beban pembangunan, bertanggung jawab atas tujuan, cara dan pelaksanaan pembangunan serta dalam memetik manfaat pembangunan.

6) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Tomia Timur

Kecamatan Tomia Timur merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Tomia. Kondisi geografis Kabupaten Wakatobi yang terdiri dari daerah kepulauan ini, beragam aspirasi dan kebutuhan masyarakat, baik materil maupun nonmateril yang disampaikan melalui forum Musrenbang diharapkan dapat membantu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini tentunya dengan tumpuan keinginan bahwa apa yang menjadi kebutuhan mereka yang disampaikan melaui usulan-usulan di forum ini dapat tercapai seperti halnya kecamatan lainnya.

Mengenai penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Tomia Timur ini, berikut disajikan data jumlah usulan kegiatan prioritas kebutuhan dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang diambil dari hasil keputusan Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan yang terakomodasi dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun 2009, yaitu:

Tabel 4.27 Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Tomia Timur pada Tahun 2008

SKPD	Program dan Kegiatan Prioritas				Σf
	Diakomodasi		Tidak Diakomodasi		
	F	%	F	%	
Dinas Pendidikan Nasional, Pora	5	31,3	11	68,7	16
Dinas Kesehatan	3	50,0	3	50,0	6
Dinas Pekerjaan Umum, Pertamben	2	40,0	3	60,0	5
Dinas Perhubungan, Kominfo	0	0	3	100	3
Jumlah	10	33,3	20	66,7	30

Sumber: Olahan Data Sekunder(Lampiran 5)

Berdasarkan uraian tabel diatas menunjukan bahwa penyerapan aspirasi dan kebutuhan prioritas masyarakat di Kecamatan Tomia Timur yang terakomodasi dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 adalah 33,3%, sedang yang tidak terakomodasi 66,7%, dari 30 program dan kegiatan prioritas yang diusulkan. Pada usulan program dan kegiatan yang dibidangi oleh Dinas Perhubungan,

UNIVERSITAS TERBUKA

Komunikasi dan Informatika sama sekali tidak terakomodir. Berkaitan dengan kondisi tersebut Kepala Dinas SKPD tersebut menuturkan bahwa:

> "Dalam upaya memajukan ekonomi dan sistem pemerintahan daerah yang bernuansa normatif, dinas yang kami pimpin memiliki kendala akan minimnya data dan informasi yang akurat tentang kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan laut dan darat untuk pengembangan hubungan antarpulau yang meliputi, data kondisi wilayah, ketersediaan sarana perhubungan setempat, jumlah tenaga lapangan, yang tentunya kesemuanya ini harus ditunjang oleh profesionalisme yang optimal". (hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tanggal 20 Pebruari 2009)

Mencermati persoalan ini, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Wakatobi belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan asas-asas perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif sebagaimana yang diamanatkan oleh bangsa bahwa pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Perlu diketahui bahwa tahapan pembangunan di dalam penyelenggaraannya yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahapan perencanaan, sebagaimana Arif (2006:149-150) menambahkan, perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu negara.

Dengan demikian dalam perencanaan pembangunan, pemerintah seharusnya melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimilki masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (partisipatif). Dengan kata lain partisipasi masyarakat merupakan kata kunci agar suatu pembangunan berbias sukses.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Binongko

Berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Binongko, baik materil maupun nonmateril yang disampaikan melalui forum Musrenbang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini tentunya dengan tumpuan keinginan bahwa agar apa yang menjadi kebutuhan mereka yang disampaikan melalui usulan-usulan di forum ini dapat tercapai mulai dari penyusunan rencana hingga terakomodasinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Binongko tersebut, berikut disajikan data jumlah usulan kegiatan kebutuhan prioritas dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang dapat diakomodasi dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun 2009, yaitu:

Tabel 4.28 Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Binongko pada Tahun 2008

SKPD	Program dan Kegiatan Prioritas				Σf
	Diakomodasi		Tidak Diakomodasi		
	F	%	F	%	
Dinas Pendidikan Nasional, Pora	0	0	2	100	2
Dinas Kesehatan	3	75,0	1	25,0	4
Dinas Pekerjaan Umum, Pertamben	11	42,3	15	57,7	26
Dinas Perhubungan, Kominfo	5	55,6	4	44,4	9
Jumlah	19	46,3	22	53,7	41

Sumber: Olahan Data Sekunder(Lampiran 5)

Tabel 4.28 menunjukan bahwa penyerapan aspirasi dan kebutuhan prioritas masyarakat di Kecamatan Binongko yang terakomodasi dari hasil Musrenbang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kabupaten Wakatobi tahun 2008 adalah 46,3,3%, sedang yang tidak terakomodasi 53,7%, dari 41 program dan kegiatan prioritas yang diusulkan oleh masyarakat. Usulan program dan kegiatan yang dibidangi oleh Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi tahun 2008 pada kecamatan ini, tidak ada yang diakomodasi dari kedua kegiatan yang diusulkan.

Menanggapi permasalahan ini, Abe (2002:81) mengemukakan, perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

Sejalan dengan uraian dan pandangan tentang kelemaahan yang dialami dalam penyerapana aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Wakatobi tersebut, maka Tokoh LSM sesuai informasi yang dihimpun dalam wawancara mengatakan:

> "Melihat struktur APBD Kabupaten Wakatobi dalam tahun 2009 menunjukkan bahwa anggaran disusun belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Belanja pelayanan publik kecil yakni hanya mencapai 47,5 peresen dari jumlah program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD. Lagi pula anggaran belum terdistribusi dengan baik, misalnya pada sektor pendidikan, masih banyak sekolah-sekolah yang minim fasilitas belajarnya. Demikian juga pada sektor kesehatan, program pemerintah daerah belum berihak kepada masyarakat" (Hasil Wawancara dengan Tokoh LSM pada Tanggal 20 Pebruari 2009).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

8) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Togo Binongko

Kecamatan Togo Binongko yang terlatek di ujung Timur Tenggara Kabupaten Wakatobi melalui berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat, baik materil maupun nonmateril yang disampaikan pada forum Musrenbang, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini tentunya dengan tumpuan keinginan bahwa apa yang menjadi kebutuhan mereka yang disampaikan melaui usulan-usulan di forum ini dapat tercapai mulai dari penyusunan rencana hingga terakomodasinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan tingkat penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Togo Binongko tersebut, berikut disajikan data jumlah usulan kegiatan kebutuhan prioritas dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang diambil dari hasil keputusan Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan yang terakomodasi dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun 2009, yaitu:

Tabel 4.29 Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi yang Bersumber dari Hasil Musrenbang Kecamatan Togo Binongko pada Tahun 2008 menurut SKPD Sampel Penelitian

SKPD	Program dan Kegiatan Prioritas				Σf
	Diakomodasi		Tidak Diakomodasi		
	F	%	F	%	
Dinas Pendidikan Nasional, Pora	7	50,0	7	50,0	14
Dinas Kesehatan	4	57,1	3	42,9	7
Dinas Pekerjaan Umum, Pertamben	4	50,0	4	50,0	8
Dinas Perhubungan, Kominfo	2	100	0	0	2
Jumlah	17	54,8	14	45,2	31

Sumber: Olahan Data Sekunder(Lampiran 5)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan uraian tabel diatas menunjukan bahwa penyerapan aspirasi dan kebutuhan prioritas masyarakat di Kecamatan Togo Binongko yang terakomodasi dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 adalah 54,8%, sedang yang tidak terakomodasi 45,2%, dari 31 program dan kegiatan prioritas yang diusulkan oleh masyarakat. Tingkat penyerapan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang ini sedikit memberikan hasil yang berbeda dengan kecamatan lain, bahwasanya di Kecamatan Togo Binongko menunjukan prosentase akomodasi program dan kegiatan usulan yang lebih besar terakomodasi dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya. Hal ini memberikan gambaran yang baik terhadap efektivitas pelaksanaan Musrenbang yang cenderung memperhitungkan asas manfaat pembangunan. Jika hal ini mampu diterapkan di kecamatan lainnya maka apa yang menjadi tujuan dilaksanakannya Musrenbang dapat tercapai dalam menyerap aspirasi dan kebutuhan. Hanya saja masih perlu ditingkatkan lagi agar apa yang menjadi usulan program dan kegiatan tersebut diakomodasi sepenuhnya yang selanjutnya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

9) Hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi Tahun 2008

Pelaksanaan Musrenbang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada warga untuk menyalurkan aspirasi dan masalah kebutuhan prioritas masyarakat. Proses ini dimulai pada tingkat desa/kelurahan dengan mengidentifikasi program-program yang ingin dilakukan desa/kelurahan, yang pada umumnya berupa pembangunan infrastruktur skala komunitas desa/kelurahan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan uraian data tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi belum sepenuhnya menitikberatkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Data perolehan diatas menunjukan bahwa kegiatan prioritas yang "tidak diakomodasi" ke dalam APBD Kabupaten Wakatobi pada tahun 2009 adalah 57,3% dari sejumlah kegiatan yang diusulkan yaitu 389 program dan kegiatan. Persentase ini cukup besar jika melihat jumlah program dan kegiatan yang diusulkan.

Menanggapi hal ini diperoleh beberapa data dan informasi sebagai cerminan terserapnya aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Hasil wawancara dengan beberapa Tokoh LSM di Kabupaten Wakatobi menjelaskan bahwa:

> "Melihat struktur APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2008 menunjukkan bahwa anggaran disusun belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Belanja pelayanan publik relatif kecil yakni hanya mencapai 47,5 % dari APBD. Lagi pula anggaran belum terdistribusi dengan baik, misalnya pada sektor pendidikan, masih banyak sekolah-sekolah yang minim fasilitas belajarnya. Demikian juga pada sektor kesehatan, program pemerintah daerah belum berpihak kepada masyarakat" (hasil wawancara dengan Tokoh LSM Kabupaten Wakatobi, tanggal 20 Februari 2009).

Mencermati hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 tersebut, maka belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam menyusun program dan anggaran pembangunan. Di sisi lain adanya kesulitan untuk sekaligus memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, karena terbatasnya anggaran. Misalnya pada tahun 2006 APBD Kabupaten Wakatobi mencapai 202 miliar rupiah. Hai seperti ini oleh masyarakat harus menyadarinya, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam kondisi yang terjadi sehingga mereka benar-benar mengerti terhadap keadaan tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Keberadaan Musrenbang secara resmi dalam proses perencanaan adalah satu kesempatan untuk benar-benar menerapkan prinsip pendekatan *bottom-up*. Jika ini dikaitkan dengan proses penganggaran, Musrenbang merupakan salah satu tahapan di mana kebutuhan masyarakat bisa diidentifikasi dan dianggarkan.

Penelitian ini difokuskan kepada efektivitas pelaksanaan kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan di Kabupaten Wakatobi tahun 2008. Maksud efektivitas dalam penelitian ini adalah sejauhmana proses dan mekanisme pelakasanaan kebijakan Musrenbang di Kabupten Wakatobi tahun 2008 dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat menyerap aspirasi usulan prioritas kebutuhan masyarakat dan diakomodasi dalam APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2009.

Variabel efektivitas pelaksanaan Musrenbang dilihat dari enam dimensi yakni kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan, partisipasi masyarakat, ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang, keaktifan peserta, ketepatan perumusan program, dan ketepatan program yang ditetapkan. Sedangkan variabel hasil Musrenbang dilihat dari dua dimensi yakni: Hasil Musrenbang dapat bermanfaat dalam penyusunan program dan anggaran bagi SKPD, Bappeda dan penyusunan APBD secara keseluruhan, dan sejauhmana hasil Musrenbang mampu menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik materil maupun nonmateril.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas hubungan keterkaitan dari dimensi-dimensi penelitian ini terhadap efektifivitas pelaksanaan kebijakan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 dan manfaatnya bagi penyusunan APBD serta penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi Tahun 2008

a. Hubungan Dimensi Kemampuan Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang

Asumsi teoritik yang mendasari penelitian ini adalah bahwa perencanaan yang baik merupakan perpaduan perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) dan perencanaan dari atas (*top down planning*). Konsep Musrenbang merupakan konsep yang lebih menekankan perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) yang harus ditopang dengan perencanaan tingkat atas. Hal ini karena kedua model perencanaan ini memiliki kelemahan masing-masing. Perencanaan dari bawah kelemahannya antara lain memerlukan waktu yang cukup lama, serta anggaran yang diusulkan kadang-kadang tidak realistis, karena berdasarkan harapan. Sedangkan perencanaan tingkat atas, juga memiliki kelemahan yakni penetapan program kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta falsafahnya tiba saat tiba akal, sehingga program yang disusun kurang akurat.

Berdasarkan pandangan tersebut, dari hasil penelitian dalam dimensi ini menunjukkan persentase skor aktual terhadap skor ideal adalah 71,88%. Menurut kriteria yang telah ditentukan pada metode penelitian, maka dimensi ini berada pada kategori "efektif".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Arti efektif dalam dimensi ini jika dihubungkan dengan hasil pelaksanaan Musrenbang yang mampu menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang pada dimensi kemampuan mengidentifikasi masalah pembangunan dari 4 SKPD sampel penelitian di Kabupaten Wakatobi bahwa telah berjalan baik, hanya belum dilakukan secara maksimal. Terutama pada kepemilikan data yang akurat bagi SKPD belum tertata dengan baik. Akibatnya perencanaan pembangunan kadang mengalami bias atau kurang sesuai dengan kondisi daerah, pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi, bahwa:

> "Dinas yang kami pimpin memiliki kendala tentang data yang akurat, berkaitan dengan beberapa hal, seperti kebutuhan guru tiap sekolah, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, kondisi bangunan sekolah, data murid, siswa yang berhak mendapatkan beasiswa atau bantuan belajar, bahkan data base pendidikan Kabupaten Wakatobi belum ada. Hal ini tentunya menyulitkan kami untuk menyusun rencana". (Hasil wawancara tanggal 12 Agustus 2008).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 31 menyebutkan, "Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan". Selanjutnya dalam pasal ini menjelaskan, yang dimaksud dengan "data" adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perangkat penyimpan lainnya. Sedangkan "informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Dengan demikian jika mekanisme peraturan ini telah ditetapkan sebagai kebutuhan daerah, maka pihak pemerintah daerah dapat melakukan penguatan-penguatan kapasitas kepada aparatur desa/kelurahan atau masyarakat dalam hal perencanaan. Hal ini sebagai bagian dari proses partisipatif atau demokratisasi terhadap keberdayaan masyarakat desa.

b. Hubungan Dimensi Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang

Friedmann (1987:122), mengemukakan bahwa perencanaan partisipatif, merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama *(collective agreement)* melalui aktivitas negosiasi atau urun rembuk antar seluruh pelaku pembangunan *(stake holders)*. Proses politik ini dilakukan secara transparan dan aksesibel sehingga masyarakat memperoleh kemudahan setiap proses pembangunan yang dilakukan serta setiap tahap perkembangannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang dalam dimensi ini adalah pada kategori "cukup efektif" dengan persentase skor aktual terhadap skor ideal adalah 63,90%. Artinya bahwa dimensi partisipasi masyarakat tersebut secara umum dinilai kurang memadai. Artinya dalam pelaksanaan Musrenbang mulai di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten partisipasi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung belum berjalan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Musrenbang kota/kabupaten pada biasanya diselenggarakan antara bulan Maret sampai bulan Mei, bersamaan dengan proposal dari beragai dinas teknis. Musrenbang kabupaten/kota dihadiri oleh sejumlah masyarakat, anggota DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan lain-lain. Musrenbang tingkat desa/kelurahan dalam rangka merencanakan program pembangunan yang akan diusulkan pada tingkat kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari-Maret tahun anggaran sebelumnya.

Kemudian Musrenbang tingkat kecamatan dalam rangka merencanakan program pembangunan tingkat kecamatan atau menyempurnakan usulan program pembangunan dari desa/kelurahan yang selanjutnya akan diusulkan pada tingkat kabupaten dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun anggaran sebelumnya. Musrenbang tingkat kabupaten dalam rangka merencanakan program pembangunan tingkat kabupaten berdasarkan usulan program pembangunan dari desa/kelurahan dan kecamatan yang selanjutnya menjadi agenda penyusunan RKPD dilaksanakan pada bulan Juni-Juli tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan pandangan diatas, dimensi ketiga dari variabel yang diteliti terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 yaitu ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang menunjukkan hasil penelitian bahwa dimensi ini pada kategori "cukup efektif" dengan persentase skor aktual terhadap skor ideal adalah 64,72 persen.

Makna dari cukup efektif berkaitan dengan ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten tahun 2008 di Kabupaten Wakatobi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

ditentukan secara nasional. Hal ini disebabkan kurangnya kesiapan perangkat pemerintah daerah mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, di satu sisi masalah prosedur penyusunan anggaran yang selalu terlambat. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi memberikan tanggapan ketika wawancara mengemukakan bahwa:

> "Belum tepatnya waktu pelaksanaan Musrenbang ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kesiapan perangkat pemerintah mulai pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten kurang memperhatikan bahan Musrenbang, dan masalah prosedur penyusunan anggaran yang selalu terlambat". (Hasil wawancara Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, tanggal 14 Februari 2009).

Sehingga dengan ketidaktepatannya waktu pelaksanaan Musrenbang ini akan berdampak pada terlambatnya pelaksanaan penyusunan RKPD dan RAPBD dan mengakibatkan keterlambatan penetapan APBD dan kegiatan setiap tahun anggaran. Kondisi ini jika tidak secepatnya diatasi oleh semua unsur, maka niscaya roda pembangunan pun di daerah ini akan mengalami hambatan-hambatan.

d. Hubungan Dimensi Keaktifan Peserta terhadap Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang

Peran masyarakat menjadi kunci terpenting dalam mengembangkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Wakatobi. Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, seharusnya menjadi sarana utama bagi suatu daerah dan masyarakat agar mereka dapat bahu membahu membangun demokrasi dan tata kelola pemertintahan yang baik. Hamzens (2005:8) menekankan, perencanaan pembangunan sebagai suatu kegiatan sosial yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

berorientasi pada kepentingan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, yang dilakukan dengan teliti dan hati-hati, untuk mengembangkan strategi mencapai tujuan perubahan kondisi masyarakat agar menjadi lebih baik.

Kemampuan masyarakat atau organisasi masyarakat untuk mengakses informasi, berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan, serta berperan dalam menjaga akuntabilitas proses pemerintahan adalah sebuah faktor fundamental demi kesehatan demokrasi, sedikitnya untuk dua alasan: *pertama*, hal itu menjamin bahwa warga bisa berperan, berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan yang baik; *kedua*, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat membangun *checks and balance* dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk dapat memberi gambaran detail terhadap hasil penelitian tentang efektivitas pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi tahun 2008 maka penulis mengamati pula dimensi keaktifan peserta dalam pelaksanaan Musrenbang. Indikator yang dinilai antara lain keaktifan peserta menghadiri Musrenbang, keaktifan mengikuti jalannya Musrenbang, keaktifan memberikan saran, dan keaktifan peserta mengikuti Musrenbang sampai selesai.

Hasil penelitian pada dimensi ini menunjukkan bahwa skor aktual terhadap skor ideal adalah 80,0% dengan kategori efektif. Makna dari efektif berkaitan dengan keaktifan peserta dalam mengikuti pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi menunjukkan bahwa peserta Musrenbang telah aktif mengikuti jalannya proses Musrenbang yang dilakukan dalam merencanakan program pembangunan, artinya peserta telah memiliki perhatian akan pentingnya Musrenbang. Hanya masih terdapat beberapa peserta yang tidak mengikuti proses Musrenbang secara

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

seksama, sampai selesai dilaksanakan. Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi menilai keaktifan peserta Musrenbang, menyatakan bahwa:

> "Keaktifan peserta Musrenbang dari tiap instansi sudah memadai, hanya kadang-kadang masih terdapat beberapa pejabat yang tidak mengikuti Musrenbang". (Hasil wawancara Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, tanggal 14 Februari 2009).

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Wakatobi harus dapat meningkatkan kepedulian terhadap proses pelaksanaan kebijakan Musrenbang setiap tahunnya. Begitu pula partisipasi secara aktif masyarakat bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara, melainkan juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi benar-benar menjadi forum musyawarah bersama dengan senantiasa mengedepankan prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan yang dimaksud adalah hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama.

e. Hubungan Dimensi Ketepatan Rumusan Rencana Program yang Diajukan oleh Setiap SKPD terhadap Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi). Untuk menjalankan organisasinya, SKPD membuat dokumen Rencana Strategi (Renstra) SKPD untuk jangka waktu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kerja lima tahun dan dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu kerja satu tahun. Kedua dokumen tersebut disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat (termasuk LSM, Ormas dan Asosiasi Profesi) yang diselenggarakan oleh SKPD bersangkutan. Dokumen Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan menjadi acuan penyusunan RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pemerintah dan disinergikan dengan hasil Musrenbang kecamatan yang dirumuskan oleh bidang-bidang di internal SKPD masing-masing.

Di dalam proses pelakasnaan Musrenbang, diharapkan unsur masyarakat akan memberikan usulan berdasarkan wilayah yang akan menjadi informasi berharga bagi SKPD mengenai wilayah yang membutuhkan intervensi SKPD dalam bentuk program dan kegiatan guna menentukan lokasi dan kelompok sasaran, sehingga kasus salah sasaran (*mistargetting)* dapat diminimalisasi.

Ketepatan rumusan rencana program yang diajukan oleh setiap SKPD yang dimaksudkan dalam penelitian ini, dalam artian bahwa rumusan rencana program disusun secara sistematis, tepat, akurat, dirinci menurut tujuan, sasaran, dan manfaat program, dan selalu disetujui oleh lembaga legislatif. Hasil penelitian menunjukkan persentase skor aktual terhadap skor ideal dalam dimensi ini adalah 73,63% dengan kategori efektif, ini menggambarkan bahwa ketepatan program yang diajukan SKPD telah dirumuskan dengan baik, sesuai dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Artinya program yang diusulkan telah sesuai dengan kebutuhan, dan dilengkapi dengan penjelasan secara rinci mengenai tujuan program, strategi, *input*, *output*,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

outcome dan *impact* dari program yang diusulkan. Namun yang menjadi kelemahan dalam dimensi ini adalah rumusan program yang diusulkan SKPD masih sering mendapat penolakan dari lembaga legislatif dalam proses pembahasan APBD.

f. Hubungan Dimensi Ketepatan Program Pembangunan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang

Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjelaskan, Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya Kepmendagri Nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menyebutkan, Program pembangunan adalah instrumen

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian dan penjelasan program pembangunan yang dijelaskan diatas maka program pembangunan yang berhubungan dengan penelitian ini adalah apakah program yang telah ditetapkan dalam proses pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Wakatobi benar-benar tepat sesuai kebutuhan mendasar, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang ditujukan oleh sebuah program.

Hasil penelitian pada dimensi ini menunjukkan bahwa ketepatan program pembangunan mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten menunjukkan persentase skor aktual terhadap skor ideal adalah 69,13% pada kategori efektif. Waterston (dalam Bryant dan White, 1989:306) menjelaskan bahwa perencanaan mencakup penghematan sumber daya langka oleh otoritas yang dibentuk oleh masyarakat banyak untuk menemukan alternatif-alternatif terbaik yang dapat ditempuh guna mencapai tujuan-tujuan yang khusus.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program yang ditetapkan dari proses Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 menghasilkan program yang sesuai kebutuhan dan skala prioritas, serta dapat dilaksanakan dengan baik. Hanya saja masih perlu ditingkatkan, sehingga program-program pembangunan yang ditetapkan senantiasa mengacu pada kebutuhan pembangunan daerah yang paling mendesak. Kelemahan ini juga seperti halnya dikemukakan oleh oleh Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, menjelaskan bahwa:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"Perencanaan pembangunan di Kabupaten Wakatobi masih cenderung perencanaan dari atas (*top down planning*). Hal ini dapat dilihat banyaknya usulan dari unit kerja di bawah, tetapi tidak mampu diakomodir dalam penetapan anggaran. Tentunya hal ini pula merupakan satu kelemahan dalam perencanaan pembangunan, hanya saja tidak bisa dihindari karena mekanisme penyusunan anggaran yang belum berjalan secara optimal. Banyak jumlah usulan, sementara kemampuan anggaran sangat terbatas. (Hasil wawancara Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Februari 2009).

2. Hubungan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 terhadap Manfaatnya dalam Penyusunan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD ini merupakan sebuah dokumen yang memperlihatkan adanya aliran dana masuk dari sumber-sumber tertentu dan dialokasikan untuk mendanai kegiatan pembangunan yang direncanakan. Sebagai sebuah sistem anggaran, maka APBD akan memperlihatkan sebuah aliran dua arah, penerimaan dan pengeluaran, serta bagian-bagian tertentu yang harus dipahami publik.

Variabel hasil Musrenbang pada dimensi bermanfaat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dinilai dari tiga indikator, yakni.

1. Membantu SKPD dalam menyusun program dan anggaran
2. Membantu Bappeda dalam merumuskan program-program dan anggaran pembangunan
3. Membantu dalam perumusan APBD secara keseluruhan.

Hasil penelitian dari pelaksanaan kebijakan Musrenbang Kabupaten tahun 2008 yang dilakukan mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan sangat membantu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

para SKPD, dimana Bappeda dalam penyusunan anggaran pembangunan di Kabupaten Wakatobi menunjukkan persentase skor aktual terhadap skor ideal adalah 77,5%. Makna dari efektif berkaitan dengan hasil Musrenbang dalam membantu penyusunan anggaran, artinya bahwa hasil Musrenbang selama ini cukup membantu SKPD dan Bappeda Kabupaten Wakatobi dalam menyusun anggaran daerah setiap tahun. Dalam forum Musrenbang menyajikan data-data tentang kebutuhan masyarakat yang lebih riil, sehingga dijadikan dasar pengusulan program. Artinya pelaksanaan Musrenbang memiliki manfaat yang sangat besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dalam menentukan skala prioritas pembangunan daerah di berbagai bidang.

Mencermati hasil Musrenbang pada dimensi membantu penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Wakatobi perlu lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbangs, sehingga dapat menyajikan berbagai usulan program dari bawah sesuai kebutuhan masyarakat.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan Nasional, dan Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi, menjelaskan, bahwa:

> "Hasil Musrenbang yang dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, sangat bermanfaat dalam penyusunan program dan anggaran di kantor kami. Hal ini karena data-data yang dibutuhkan cukup lengkap dari hasil Musrenbang, yang berisikan berbagai usulan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hanya saja kadang-kadang usulan terlalu banyak, sementara anggaran yang tersedia relatif terbatas, sehingga kami melakukan seleksi, usulan program mana yang menjadi prioritas. (Hasil wawancara dengan beberapa informan, tanggal 26 Februari 2009).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

dokumen final RKPD dan Renja SKPD. Perlu dinilai sejauh mana peringkat kesesuaian antara hasil *bottom up process* dengan rancangan RKPD dan Renja SKPD yang disepakati; dan peringkat kepuasan para peserta terhadap hasil kesepakatan yang dicapai, yaitu sejauh mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam rancangan RKPD dan Renja SKPD.

Pada dimensi terserapnya aspirasi dan kebutuhan masyarakat ini hasil penelitian menunjukkan persentase skor aktual terhadap skor ideal adalah 78,3% tentunya dengan kategori efektif. Ada perbedaan yang sangat mendasar dari makna efektif pada dimensi ini, bahwa dari data hasil Musrenbang Kabupaten yang diambil dari hasil Musrenbang kecamatan sebagaimana yang dirangkum pada Tabel 4.30 menjelaskan bahwa dari 389 program dan kegiatan yang diusulkan, hanya166 atau 42,7% program dan kegiatan yang "terakomodasi" dan sisanya 223 atau 57,3% "tidak terakomodasi". Dengan demikian jumlah usulan dan kegiatan pada 8 kecamatan dapat dirata-ratakan menjadi hanya 43,2% yang terakomodasi. Begitu pula jika menyimak data yang disajikan untuk setiap kecamatannya, bahwa hampir semua mengalami kondisi yang serupa. Hanya satu kecamatan yang jumlah persentase terakomodasinya lebih besar dari yang tidak terkaomodasi, yaitu Kecamatan Togo Binongko dengan perolehan 54,8% terakomodasi dan tidak terakomodasi 45,2% dari 31 kegiatan dan program yang diusulkan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.29

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh beberapa Tokoh LSM di Kabupaten Wakatobi menjelaskan, bahwa:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "Bahwa anggaran disusun belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Belanja pelayanan publik relatif kecil yakni hanya mencapai 47,5% dari jumlah APBD. Lagi pula anggaran belum terdistribusi dengan baik, misalnya pada sektor pendidikan, masih banyak sekolah-sekolah yang minim fasilitas belajarnya. Demikian juga pada sektor kesehatan sangat minim, program pemerintah daerah belum berpihak kepada masyarakat". (Hasil wawancara dengan tokoh LSM Kabupaten Wakatobi, tanggal 25 Februari 2009).

Hal ini bertentangan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kartasasmita (1997: 57-58), "Perencanaan pembangunan harus menjamin bahwa pembangunan itu: 1) menguntungkan rakyat; 2) harus dipahami maksudnya oleh rakyat; 3) harus mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya, dan 4) dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, jujur, terbuka, dan dapat di pertanggungjawabkan". Pandangan Kartasasmita tersebut mengandung arti bahwa, hasil Musrenbang itu harus dapat menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Apabila ini dapat diwujudkan, maka dapat dikatakan pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi yang dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten menjadi efektif (tercapai tujuan). Akan tetapi, kalau sebaliknya, maka Musrenbang yang dilaksanakan itu tidak efektif.

Kegagalan pembangunan daerah banyak disebabkan oleh kurangnya partisipasi rakyat/masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menurut Kartasasmita (1997:57) pelaksanaan pembangunan tanpa partisipasi akan berimplikasi pada.

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil, tidak menguntungkan rakyat banyak;
2. Rakyat kurang memahami maksud dan tujuan pembangunan yang dilakukan;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Pembangunan bertujuan untuk menguntungkan rakyat banyak dan rakyat memahaminya tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu;
4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat tidak dilibatkan.

Berkaitan dengan uraian diatas, sesuai Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-187/Kep/Bangda Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada bagian VII huruf (c) meyebutkan bahwa, sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka Musrenbang perlu memiliki karakter sebagai berikut.

1. Merupakan "*demand driven process*" artinya aspirasi dan kebutuhan peserta Musrenbang berperanan besar dalam menentukan keluaran hasil Musrenbang
2. Bersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua *stakeholders* untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil Musrenbang
3. Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integrai dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD)
4. Bersifat "*strategic thinking process*" artinya proses pembahasan dalam Musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi

5. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta Musrenbang
6. Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas issu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan *consensus*
7. Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; menfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak *(mutually acceptable solutions)*.

Peran serta DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukar dipastikan apakah hasil Musrenbang ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari DPRD. Adalah diharapkan bahwa DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD (sebagai hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihannya).

Di samping itu pula Musrenbang juga merupakan ajang sinkronisasi, koordinasi dan interaksi antara pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan perencanaan pembangunan. Dengan demikian Musrenbang merupakan salah satu metode dalam mengatasi kegagalan perencanaan pembangunan yang selama ini

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

terjadi. Persoalannya adalah pelaksanaan Musrenbang harus efektif terlebih dahulu agar dapat mencapai hasil perencanaan yang efektif, sehingga program kebutuhan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang yang efektif akan berdampak baik pula terhadap tingkat penyerapan aspirasi dan kebutuhan rakyat, guna menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahatera sebagaimana tujuan pembangunan nasional.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah dibahas dan diuraikan pada Bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi antara lain: dimensi kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan belum dapat dilakukan dengan baik, seperti kurangnya data yang akurat. Pada dimensi partisipasi masyarakat juga masih belum efektif, di mana masyarakat masih kurang perhatian dalam mengikuti Musrenbang. Demikian halnya waktu pelaksanaan Musrenbang juga belum tepat waktu, selalu mengalami keterlambatan. Sementara ketepatan rumusan rencana program yang diusulkan sudah memadai karena telah menggunakan pola penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pada dimensi ketepatan program yang ditetapkan juga sudah efektif, karena telah sesuai dengan kebutuhan dan mudah dilaksanakan, hanya saja masih banyak usulan dari hasil Musrenbang yang tidak diakomodasi.
2. Hasil Musrenbang yang dicapai pada dasarnya cukup membantu para SKPD khususnya Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Pembanguan Daerah (RKPD) karena data yang dibutuhkan cukup tersedia.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Pada sisi terserapnya aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berhasil secara memadai. Hal ini dapat dilihat bahwa program dan anggaran yang ada masih kurang terakomodasi kepada kebutuhan masyarakat.
4. Hampir semua kecamatan dari hasil Musrenbang Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 memberikan persentase program dan kegiatan usulan yang tidak terakomodasi lebih besar dibanding yang terakomodasi. Hanya terdapat di Kecamatan Togo Binongko yang memberikan nilai terakomodasi lebih besar dibanding dengan yang tidak terakomodasi.

B. Saran

Berangkat dari berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi sesuai temuan-temuan dan hasil penelitian serta simpulan di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi harus meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam perencanaan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang tahunan.
2. Hasil Musrenbang perlu ditingkatkan kualitasnya dengan memilih usulan-usulan kebutuhan yang benar-benar prioritas sehingga dapat terakomadasi dalam perencanaan dan penganggaran dalam APBD.
3. Perlu adanya komitmen dari seluruh stakeholder untuk mengawal program kegiatan hasil Musrenbang sebagai pengejawantahan aspirasi masyarakat, agar dalam pembahasan anggaran antara pemerintah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Kabupaten Wakatobi dan DPRD disepakati dan terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan DPRD harus dapat mengakomodasi usulan program dan kegiatan prioritas hasil Musrenbang dalam jumlah yang lebih besar lagi ke dalam APBD, dan harus mencerminkan alokasi dan distribusi yang berkeadilan di seluruh wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abe, Alexander. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif.* Solo: Pondok Edukasi.

Abe, Alexander. (2001). *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Abrar, Ana Nadhya. (2005). *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Adi, Isbandi Rukminto. (2001), *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas.* Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI.

Agung, Djojosoekarto. (2004). *Dinamika dan Kapasitas DPRD dalam Tata Pemerintahan Demokratis.* Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung.

Arif, Syaiful. (2006). *Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Kebijakan.* Malang: Averroes Press.

Arikunto, Suharsimi. (1996). *Prosedur Penelitian.* Yogyakarta: Rineka Cipta.

Atmosoeprapto, K. (2001). *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan.* Jakarta: PT Gramedia.

Barata, Nyoman. (1992). *Desa, Masyarakat dan Pembangunan Desa.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bastian. (2006). *Sistem Perencanaan dan Pengganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Bryant, Coralie dan Louise, G. White (1998). *Managing Development In The Third world (diterjemahkan oleh Rusyanto Simatupang).* Jakarta: LP3ES.

Bungin, B. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Kencana.

Bungin, B, dkk, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bobrow, David B. dan John, S. Dryzek. (1987). *Policy Analysis by Design.* USA: University of Pittsburgh Press.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bratakusumah, dkk. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. (diterjemahkan oleh Susetiawan).* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Darise, Nurlan. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: PT Indeks.

Dwidjowijoto, N.R. (2003). *Organisasi Publik Masa Depan: Redenefisi Peran Pemerintah.* Jakarta: Pustaka Pergaulan.

Fitriastuti, N. M. (2005). *Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD; Tesis Magister Administrasi Publik.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Friedmann, John. (1987). *Planning in The Public Domain. From Knowledge to Action.* New Jersey: Princeton University Press.

Halim, A. dan Theresia, D. (2007). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah ; Pengelolaan Keuangan Daerah.* Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Hamzens, Wildani. (2005). *Perencanaan di Indonesia 25 Tahun Mendatang.* Bogor: Labdawara.

Hasibuan, Malayu. (1993). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah.* Jakarta: CV. Haju Masagung.

Handayaningrat, Suwarno. (1993). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Jakarta: PT Idayu Press dan Yayasan Masagung.

Herujito, Yayat, M. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen.* Jakarta: PT Grasindo.

Hetifah, S.S. (2004). *Innovasi, Partisipasi dan Good Governance.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ikhsan, A.S. dan Harmanti. (2007). *Administrasi Keuangan Publik.* Jakarta: Universitas Terbuka Press.

Irawan, Prasetyo. (2006). *Metodologi Penelitian Administratif.* Jakarta: Universitas Terbuka Press.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Karepesina, M. (2007). *Pengaruh Motivasi Kerja Aparat Terhadap Kualitas Pelayanan Civil (Studi Mengenai Pelayanan KTP di Dua Kecamatan Kab. Halmahera Barat Maluku Utara);Tesis Program Pascasarjana.* Bandung: Universitas Padjadjaran.

Kartasasmita, Ginanjar. (1997). *Administrasi Pembangunan.* Jakarta: LP3ES.

Koerten, D. dan Sjahrir. (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen.* Jakarta: Bina Aksara.

Koentjaraningrat. (1989). *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Aksara Baru.

---------. (1995). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.* Jakarta: Djambatan.

Kunarjo. (1992). *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Manafi. (2008). *Ringkasan Eksekutif Kabupaten Wakatobi.* Wangi-Wangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Andi Offset.

Mikkelsen, Britha. (2001). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moeloeng, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mubyarto (1994). *Strategi Pembangunan Pedesaan.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Mulyadi, Muhammad. (2008). *Kabupaten Wakatobi dalam Angka.* Wangi-Wangi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi.

Ndraha, Taliziduhu. (1989). *Konsep Administrasi dan Administrasi Indonesia.* Jakarta: Bina Aksara.

---------. (1998). *Pemerintah yang Bertanggungjawab; Jurnal Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: MIPI.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

---------. (2003). *Budaya Organisasi.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Panggabean, Mutiara S. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Purnamasari, Irma. (2008). *Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi; Tesis Magister Administrasi Publik.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Rifai, Nur, dkk. (2004). *Korelasi antara Kemiskinan dengan Konflik Sosial.* Jakarta: Kerjasama Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Departemen Sosial RI dengan Lembaga Studi Sosial dan Demokrasi (LESSDEM).

Riyadi dan Bratakusumah, D.S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

---------. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sanusi, Anwar. (2003). *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Ilmu Sosial dan Ekonomi.* Malang: PT Buntara Media.

Sastrosapoetro, Santoso, R.A. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional.* Bandung: Alumni.

Sedarmanyanti. (2003). *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Ejektif dan Efesien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan.* Bandung: CV Mandar Maju.

Siagian, S. P. (2001). *Sistem Informasi Manajemen.* Jakarta: Bumi Aksara.

---------. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja.* Jakarta: Rineka Cipta.

---------. (1994). *Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi dan Terapinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

---------. (2000). *Manajemen Abad 21.* Jakarta: Bumi Aksara.

Steers, R. (1985). *Efektivitas Organisasi.* Jakarta: Erlangga.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sunarcaya, Putu. 2002. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. Tesis Magister Administrasi Publik.* Jakarta; Universitas Indonesia.

Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung; CV. Alfabeta

Soemarmo. (2005). *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif pada Proses Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Banyumanik; Tesis Magister Administrasi Publik.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Syafiie, Inu Kencana. (2004). *Birokrasi Pemerintah Indonesia.* Jakarta: Mandar Maju.

Syamsi, Ibnu. (1986). *Pokok-pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional.* Jakarta: Rajawali.

Tangkilisan, Hessel, N.S. (2005). *Manajemen Publik.* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1982). *Teori Strategi Pembangunan Nasional.* Jakarta: PT Gunung Agung.

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1994). *Perencanaan Pembangunan.* Jakarta: PT Gunung Agung.

Tjokrowinoto, Moeljarto. (1994). *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

---------. (1999). *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokras.* Yogyakarta: Kreasi Wacana.

---------. (2000). *Pembangunan Dilema dan Tantangan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

---------. (1987). *Politik Pembangunan:Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Wahab, Abdul, Solihin. (1990). *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bina Aksara.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Wahyudi, Satriyo. (2004). *Proses Anggaran Kinerja Badan Perencanaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

B. Artikel dan Paper

Anonim. *Birokrat Daerah Tetap Lebih Dominan dalam Penetapan Sebuah Kebijakan.* Uni Sosial Demokrat. http://www.unisosdem.org/ article detail.php. Diakses tanggal 19 April 2008.

Chaidir. *Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RAKORBANG)* http://www.chaidir.com/home.html. Diakses tanggal 19 April 2008.

Eko, Sutoro. *Desentralisasi, Demokrasi Lokal Dan Pembangunan Desa* http://www.irc.yojzya.org/sutoro/desentralisasi pembangunan desa. Diakses tanggal 19 April 2008.

McKnight clan Kretzman. *Asset Based Contraulity Development (ABCD).* http://www.bankofideas.com.au/abcd.doc. Diakses tgl 19 April 2008.

Mundzir, Ibnu. *Musrenbang, Terjebak antara Kebutuhan Atau Hanya Sebuah Keharusan* http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp. Diakses tanggal 15 Agustus 2009.

Prio, Kokoh. *Perencanaan Partisipatif.* http://www. 67-artikel-sppn.html. Diakses tanggal 15 Agustus 2009.

Roesman, Arif dan Astia Dendi. *Mengembangkan Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif Di Daerah, Pengalaman dan Perspektif GTZ PROMIS Nusa Tenggara* http://www.gtzpromis.or.id/indeks.pdf. Diakses tanggal 19 April 2008.

Rudiyanto, Arifin *Relevansi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Memperkuat Perencanaan Partisipatif* http://www.index.php.htm. Diakses tanggal 15 Agustus 2009.

Sadaly, Hariyanti. *Akuntabilitas Publik dan Organisasi Non Pemerintah ; Isu dan Prakteknya.* http://www.smeru.or.id/akuntabilitasornop.pdf. Diakses tanggal 19 April 2008.

Samsura, D. A. Adriansyah. *Participatory Planning, Good Governance, dan Civil Society.* http://www.bkksi.or.id/modules.php. Diakses tanggal 19 April 2008.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Solihin, Dadang. *Menciptakan Good Governance melalui Perencanaan* http://www.docstoc.com/profile/DadangSolihin.htm. Diakses tanggal 19 April 2008.

Tresiana, Novita. (2006) *Telaah PP. Nomor 8/2003, Efektivitas - Efisiensi Organisasi Publik Versus Optimasi Pelayanan Publik.* http://b.domaindlx.com/ himagaraunila/PP%20no%208.htm. Di Akses tanggal 24 November 2010.

Usfomeny, Patrisius. *Desa dan Otonomi Perencanaan* http://www.ntt-academia.org/files/opini-PU-otonomi.doc. Diakses tgl 19 April 2008.

Zulfikar, *Musrenbang Tebing Tinggi Belum Cerminkan Aspirasi Arus Bawah.* http://www.analisadaily.com/index.php. Diakses tanggal 15 Agustus 2009.

Widayatsih, Arum. *Musrenbang: Dilema "Titah Paduka" dan Keberdayaan Masyarakat Desa* http://www.Karsa on Blog.htm Diakses tanggal 15 Agustus 2009.

C. Dokumen Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* Di tetapkan di Jakarta, 15 Mei 2006.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa,* Ditetapkan di Jakarta, 30 Desember 2005.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*

Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan Nomor 050/264A/SJ. *Petunjuk Teknis Penyelenggaran Musrenbang Tahun 2007.* Dikeluarkan di Jakarta, 12 Januari 2007.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2005* Dikeluarkan di Jakarta, 20 Januari 2005.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).* Ditetapkan di Jakarta, 5 Oktober 2004.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* Ditetapkan di Jakarta, 15 Oktober 2004.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-187/Kep/Bangda Tahun 2007 tentang *Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi dan Kabupaten/Kota.*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf



UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 1

KUISIONER PENELITIAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2008

No. Responden : .....
Nama Responden : .....
U m u r : .....
Instansi/Dinas : .....

Petunjuk Jawaban : Berilah tanda Ceklist (✓) pada kolom jawaban yang dipilih.

- ✓ Sangat Setuju (SS), nilai : 5
- ✓ Setuju (S), nilai : 4
- ✓ Ragu-ragu (R), nilai : 3
- ✓ Tidak Setuju (TS), nilai : 2
- ✓ Sangat Tidak Setuju (STS), nilai : 1

A. Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang Tahunan

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	2	3	4	5	6	7
1.	SKPD senantiasa melakukan survey dalam menjaring permasalahan pembangunan					
2.	SKPD memiliki data yang akurat sebagai bahan Musrenbang					
3.	SKPD memiliki skala prioritas program dan kegiatan setiap tahun					
4.	SKPD memiliki rencana program sesuai dengan rencana Strategi					
5.	Partisipasi masyarakat terbuka secara umum dalam Musrenbang					
6.	SKPD menyiapkan media dan mekanisme untuk partisipasi masyarakat secara terbuka					
7.	Penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan secara langsung					
8.	Partisipasi masyarakat cukup berarti dalam merumuskan program					
9.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang					
10.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang					
11.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang					
12.	Peserta Musrenbang aktif menghadiri Musrenbang					
13.	Peserta aktif mengikuti proses Musrenbang					
14.	Peserta berperan aktif memberikan saran pemikiran dalam Musrenbang					

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7
15.	Peserta mengikuti proses Musrenbang sampai selesai					
16.	Rumusan program SKPD selalu tepat sesuai dengan arah kebijakan organisasi					
17.	Rumusan program SKPD yang diusulkan selalu disetujui pada Musrenbang Kabupaten					
18	Keakuratan rumusan program SKPD sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan					
19.	Program yang ditetapkan dalam Musrenbang sesuai kebutuhan SKPD					
20.	Program yang ditetapkan mudah dilaksnakan oleh SKPD					
21.	Program yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kab. Wakatobi					
22.	Program yang ditetapkan selalu memperhitungkan keberlanjutan program.					

B. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1.	Hasil Musrenbang sesuai prioritas program SKPD					
2.	SKPD mudah melakasanakan hasil Musrenbang					
3.	SKPD memiliki kemampuan kelembagaan yang memadai untuk melaksnakan program					
4.	SKPD memiliki kemampuan aparatur yang memadai untuk melaksnakan program					
5.	Hasil Musrenbang mampu menyerap aspirasi masyarakat dari aspek materil					
6.	Hasil Musrenbang mampu menyerap kebutuhan masyarakat dari aspek non-materil					
7.	Hasil Musrenbang memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek materil					
8.	Hasil Musrenbang memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek non-materil					

Wakatobi, ...2009

Responden,

(.....)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 1

KUISIONER PENELITIAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUNAN DI KABUPATEN WAKATOBI

1. No. Responden : 35
2. Nama Responden : MASIRI
3. U m u r : 41
4. Instansi/Dinas : DINAS PU, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Petunjuk Jawaban : Berilah tanda Ceklist (✓) pada kolom jawaban yang dipilih.

- ✓ Sangat Setuju (SS), nilai : 5
- ✓ Setuju (S), nilai : 4
- ✓ Ragu-ragu (R), nilai : 3
- ✓ Tidak Setuju (TS), nilai : 2
- ✓ Sangat Tidak Setuju (STS), nilai : 1

1. Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang Tahunan

No	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	2	3	4	5	6	7
1.	SKPD senantiasa melakukan survey dalam menjaring permasalahan pembangunan			✓		
2.	SKPD memiliki data yang akurat sebagai bahan Musrenbang				✓	
3.	SKPD memiliki skala prioritas program dan kegiatan setiap tahun			✓		
4.	SKPD memiliki rencana program sesuai dengan rencana Strategi		✓			
5.	Partisipasi masyarakat terbuka secara umum dalam Musrenbang				✓	
6.	SKPD menyiapkan media dan mekanisme untuk partisipasi masyarakat secara terbuka			✓		
7.	Penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan secara langsung		✓			
8.	Partisipasi masyarakat cukup berarti dalam merumuskan program	✓				
9.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang				✓	
10.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang				✓	

UNIVERSITAS TERBUKA

1	2	3	4	5	6	7
11.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang		✓			
12.	Peserta Musrenbang aktif menghadiri Musrenbang		✓			
13.	Peserta aktif mengikuti proses Musrenbang		✓			
14.	Peserta berperan aktif memberikan saran pemikiran dalam Musrenbang	✓				
15.	Peserta mengikuti proses Musrenbang sampai selesai	✓				
16.	Rumusan program SKPD selalu tepat sesuai dengan arah kebijakan organisasi		✓			
17.	Rumusan program SKPD yang diusulkan selalu disetujui pada Musrenbang Kabupaten			✓		
18	Keakuratan rumusan program SKPD sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan		✓			
19.	Program yang ditetapkan dalam Musrenbang sesuai kebutuhan SKPD		✓			
20.	Program yang ditetapkan mudah dilaksnakan oleh SKPD		✓			
21.	Program yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kab. Wakatobi		✓			
22.	Program yang ditetapkan selalu memperhitungkan keberlanjutan program.			✓		

II. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1.	Hasil Musrenbang sesuai prioritas program SKPD		✓			
2.	SKPD mudah melakasanakan hasil Musrenbang			✓		
3.	SKPD memiliki kemampuan kelembagaan yang memadai untuk melaksnakan program		✓			
4.	SKPD memiliki kemampuan aparatur yang memadai untuk melaksnakan program		✓			
5.	Hasil Musrenbang mampu menyerap aspirasi masyarakat dari aspek materil		✓			
6.	Hasil Musrenbang mampu menyerap kebutuhan masyarakat dari aspek non-materil		✓			
7.	Hasil Musrenbang memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek materil		✓			
8.	Hasil Musrenbang memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek non-materil		✓			

Wakatobi, ...2009

Responden,

MASIRI

(.....)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 1

KUISIONER PENELITIAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUNAN DI KABUPATEN WAKATOBI

1. No. Responden : 07
2. Nama Responden : DJAKARIA
3. U m u r : 55 th
4. Instansi/Dinas : DINAS KESEHATAN KAB WAKATOBI

Petunjuk Jawaban : Berilah tanda Ceklist (✓) pada kolom jawaban yang dipilih.

- ✓ Sangat Setuju (SS), nilai : 5
- ✓ Setuju (S), nilai : 4
- ✓ Ragu-ragu (R), nilai : 3
- ✓ Tidak Setuju (TS), nilai : 2
- ✓ Sangat Tidak Setuju (STS), nilai : 1

I. Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang Tahunan

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	2	3	4	5	6	7
1.	SKPD senantiasa melakukan survey dalam menjaring permasalahan pembangunan	✓				
2.	SKPD memiliki data yang akurat sebagai bahan Musrenbang		✓			
3.	SKPD memiliki skala prioritas program dan kegiatan setiap tahun		✓			
4.	SKPD memiliki rencana program sesuai dengan rencana Strategi		✓			
5.	Partisipasi masyarakat terbuka secara umum dalam Musrenbang	✓				
6.	SKPD menyiapkan media dan mekanisme untuk partisipasi masyarakat secara terbuka		✓			
7.	Penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan secara langsung			✓		
8.	Partisipasi masyarakat cukup berarti dalam merumuskan program		✓			
9.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang		✓			
10.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang		✓			

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7
11.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang		✓			
12.	Peserta Musrenbang aktif mengadiri Musrenbang		✓			
13.	Peserta aktif mengikuti proses Musrenbang	✓				
14.	Peserta berperan aktif memberikan saran pemikiran dalam Musrenbang		✓			
15.	Peserta mengikuti proses Musrenbang sampai selesai		✓			
16.	Rumusan program SKPD selalu tepat sesuai dengan arah kebijakan organisasi		✓			
17.	Rumusan program SKPD yang diusulkan selalu disetujui pada Musrenbang Kabupaten	✓				
18	Keakuratan rumusan program SKPD sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan		✓			
19.	Program yang ditetapkan dalam Musrenbang sesuai kebutuhan SKPD		✓			
20.	Program yang ditetapkan mudah dilaksnakan oleh SKPD		✓			
21.	Program yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kab. Wakatobi		✓			
22.	Program yang ditetapkan selalu memperhitungkan keberlanjutan program.	✓	✓			

II. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1.	Hasil Musrenbang sesuai prioritas program SKPD		✓			
2.	SKPD mudah melakasanakan hasil Musrenbang		✓			
3.	SKPD memiliki kemampuan kelembagaan yang memadai untuk melaksnakan program		✓			
4.	SKPD memiliki kemampuan aparatur yang memadai untuk melaksnakan program		✓			
5.	Hasil Musrenbang mampu menyerap aspirasi masyarakat dari aspek materil	✓				
6.	Hasil Musrenbang mampu menyerap kebutuhan masyarakat dari aspek non-materil		✓			
7.	Hasil Musrenbang memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek materil		✓			
8.	Hasil Musrenbang memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek non-materil		✓			

Wakatobi, ...2009

Responden,

(.....)
DJA WADDIN

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 1

KUISIONER PENELITIAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUNAN DI KABUPATEN WAKATOBI

1. No. Responden : ..11.....
2. Nama Responden : SUPARDIN KARIM, ST
3. U m u r : 33 TAHUN
4. Instansi/Dinas : PERHUBUNGAN DAN KOMINFO

Petunjuk Jawaban : Berilah tanda Ceklist (✓) pada kolom jawaban yang dipilih.

- ✓ Sangat Setuju (SS), nilai : 5
- ✓ Setuju (S), nilai : 4
- ✓ Ragu-ragu (R), nilai : 3
- ✓ Tidak Setuju (TS), nilai : 2
- ✓ Sangat Tidak Setuju (STS), nilai : 1

I. Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang Tahunan

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	2	3	4	5	6	7
1.	SKPD senantiasa melakukan survey dalam menjaring permasalahan pembangunan		✓			
2.	SKPD memiliki data yang akurat sebagai bahan Musrenbang				✓	
3.	SKPD memiliki skala prioritas program dan kegiatan setiap tahun			✓		
4.	SKPD memiliki rencana program sesuai dengan rencana Strategi		✓			
5.	Partisipasi masyarakat terbuka secara umum dalam Musrenbang				✓	
6.	SKPD menyiapkan media dan mekanisme untuk partisipasi masyarakat secara terbuka			✓		
7.	Penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan secara langsung			✓		
8.	Partisipasi masyarakat cukup berarti dalam merumuskan program			✓		
9.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang				✓	
10.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang		✓			

UNIVERSITAS TERBUKA

1	2	3	4	5	6	7
11.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang		✓			
12.	Peserta Musrenbang aktif menghadiri Musrenbang		✓			
13.	Peserta aktif mengikuti proses Musrenbang	✓				
14.	Peserta berperan aktif memberikan saran pemikiran dalam Musrenbang	✓				
15.	Peserta mengikuti proses Musrenbang sampai selesai	✓				
16.	Rumusan program SKPD selalu tepat sesuai dengan arah kebijakan organisasi		✓			
17.	Rumusan program SKPD yang diusulkan selalu disetujui pada Musrenbang Kabupaten		✓			
18	Keakuratan rumusan program SKPD sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan		✓			
19.	Program yang ditetapkan dalam Musrenbang sesuai kebutuhan SKPD		✓			
20.	Program yang ditetapkan mudah dilaksnakan oleh SKPD		✓			
21.	Program yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kab. Wakatobi		✓			
22.	Program yang ditetapkan selalu memperhitungkan keberlanjutan program.			✓		

II. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1.	Hasil Musrenbang sesuai prioritas program SKPD		✓			
2.	SKPD mudah melakasanakan hasil Musrenbang		✓			
3.	SKPD memiliki kemampuan kelembagaan yang memadai untuk melaksnakan program		✓			
4.	SKPD memiliki kemampuan aparatur yang memadai untuk melaksnakan program		✓			
5.	Hasil Musrenbang mampu menyerap aspirasi masyarakat dari aspek materil		✓			
6.	Hasil Musrenbang mampu menyerap kebutuhan masyarakat dari aspek non-materil		✓			
7.	Hasil Musrenbang memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek materil		✓			
8.	Hasil Musrenbang memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek non-materil		✓			

Wakatobi, ...2009

Responden,

(SUPARDIN KAHIM, ST.)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 1

KUISIONER PENELITIAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUNAN DI KABUPATEN WAKATOBI

1. No. Responden : 20
2. Nama Responden : SAFIUDDIN, S.Pd. M.Pd
3. U m u r : 35 TAHUN
4. Instansi/Dinas : DINAS DIKNASPORA KAB. WAKATOBI

Petunjuk Jawaban : Berilah tanda Ceklist (✓) pada kolom jawaban yang dipilih.

- ✓ Sangat Setuju (SS), nilai : 5
- ✓ Setuju (S), nilai : 4
- ✓ Ragu-ragu (R), nilai : 3
- ✓ Tidak Setuju (TS), nilai : 2
- ✓ Sangat Tidak Setuju (STS), nilai : 1

1. Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang Tahunan

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1	2	3	4	5	6	7
1.	SKPD senantiasa melakukan survey dalam menjaring permasalahan pembangunan		✓			
2.	SKPD memiliki data yang akurat sebagai bahan Musrenbang		✓			
3.	SKPD memiliki skala prioritas program dan kegiatan setiap tahun		✓			
4.	SKPD memiliki rencana program sesuai dengan rencana Strategi		✓			
5.	Partisipasi masyarakat terbuka secara umum dalam Musrenbang	✓				
6.	SKPD menyiapkan media dan mekanisme untuk partisipasi masyarakat secara terbuka			✓		
7.	Penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan secara langsung	✓	✓			
8.	Partisipasi masyarakat cukup berarti dalam merumuskan program				✓	
9.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang	✓				
10.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang		✓			

UNIVERSITAS TERBUKA

1	2	3	4	5	6	7
11.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang		✓			
12.	Peserta Musrenbang aktif menghadiri Musrenbang			✓		
13.	Peserta aktif mengikuti proses Musrenbang		✓			
14.	Peserta berperan aktif memberikan saran pemikiran dalam Musrenbang		✓			
15.	Peserta mengikuti proses Musrenbang sampai selesai		✓			
16.	Rumusan program SKPD selalu tepat sesuai dengan arah kebijakan organisasi		✓			
17.	Rumusan program SKPD yang diusulkan selalu disetujui pada Musrenbang Kabupaten			✓		
18	Keakuratan rumusan program SKPD sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan		✓			
19.	Program yang ditetapkan dalam Musrenbang sesuai kebutuhan SKPD		✓			
20.	Program yang ditetapkan mudah dilaksanakan oleh SKPD		✓			
21.	Program yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kab. Wakatobi		✓			
22.	Program yang ditetapkan selalu memperhitungkan keberlanjutan program.		✓			

II. Hasil Musyawarah Perencanaan **Pembangunan**

NO	PERNYATAAN	SS	S	R	TS	STS
1.	Hasil Musrenbang sesuai prioritas program SKPD		✓			
2.	SKPD mudah melakasanakan hasil Musrenbang		✓			
3.	SKPD memiliki kemampuan kelembagaan yang memadai untuk melaksnakan program		✓			
4.	SKPD memiliki kemampuan aparatur yang memadai untuk melaksnakan program			✓		
5.	Hasil Musrenbang mampu menyerap aspirasi masyarakat dari aspek materil			✓		
6.	Hasil Musrenbang mampu menyerap kebutuhan masyarakat dari aspek non-materil		✓			
7.	Hasil Musrenbang memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek materil			✓		
8.	Hasil Musrenbang memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek non-materil			✓		

Wakatobi, ...2009

Responden,

(PAFUDDIN, S.Sos. MSi)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

Wangi-Wangi, 4 Januari 2009

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i).....

(Responden Penelitian)

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian studi saya pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka Program Magister Administrasi Publik (MAP), maka saya melakukan penelitian untuk penyusunan tesis saya, yang berjudul *"Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Wakatobi Tahun 2008"*.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) kiranya bersedia menjadi responden dalam penelitian tesis saya, untuk memberikan tanggapan yang seobyektif mungkin, sehubungan dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Wakatobi menurut pengetahuan dan pengalaman sesuai pedoman kuisioner yang saya berikan.

Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para responden.

Peneliti,

La Ode Puasa

NIM. 014965668

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN
MENGENAI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2008

Informan : .....
.....
Tanggal Wawancara : .....

A. Kemampuan Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan:

1. *Apakah perwakilan masyarakat yang diundang dalam acara Musrenbang memiliki data-data perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat?*
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
2. *Apakah usulan-usulan masyarakat telah mencerminkan kebutuhan nyata sesuai data identifikasi permasalahan, ataukah hanya merupakan keinginan dan harapan-harapan?*
   .....
   .....
   .....
   .....

B. Partisipasi Masyarakat:

1. *Apakah masyarakat yang diundang dalam kegiatan Musrenbang tahunan tingkat desa/keiurahan/kecamatan dan kabupaten mencerminkan perwakilan masyarakat?*
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
2. *Apakah perwakilan masyarakat yang hadir diberi kesempatan yang luas untuk mengemukakan usulan-usulan prioritas pembangunan di wilayahnya?*
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
3. *Apakah perwakilan masyarakat yang diundang berkontribusi mengemukakan pendapat dalam Musrenbang?*
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Ketepatan Waktu:

- *Apakah pelaksanaan Musrenbang Tahunan telah dilaksanakan tepat waktu, sesuai jadwal yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan?*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

D. Keaktifan Peserta:

1. *Apakah peserta Musrenbang Tahunan yang diundang aktif menghadirinya?*

.....
.....
.....

2. *Apakah peserta aktif mengikuti seluruh proses acara Musrenbang Tahunan?*

.....
.....
.....
.....

3. *Apakah peserta selalu memberikan saran pendapat dalam acara Musrenbang?*

.....
.....
.....
.....
.....

E. Hasil Musrenbang Bermanfaat bagi Penyusunan APBD:

- *Sejauh mana hasil Musrenbang bermanfaat bagi penyusunan APBD?*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

F. Terserapnya Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat:

- *Apakah hasil Musrenbang telah menggambarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik dari aspek materil maupun non materil?*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN
MENGENAI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUNAN DI KABUPATEN WAKATOBI

Informan : Kadis PU Kab. Wakatobi

Tanggal Wawancara : 5 Februari 2009

A. Kemampuan Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan:

1. *Apakah perwakilan masyarakat yang diundang dalam acara Musrenbang memiliki data-data perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat?*

Data yg ada pd kami kurang akurat dgn pemerintah, pemerintah jadi kami yg harus turun langsung dalam pencarian perencanaan pembangunan di lapangan hal ini perlu ruang akses terbatas kita semua.

2. *Apakah usulan-usulan masyarakat telah mencerminkan kebutuhan nyata sesuai data identifikasi permasalahan, ataukah hanya merupakan keinginan dan harapan-harapan?*

Menurut saya belum mencerminkan karena data yang belum lengkap jadi kami yg turun langsung banyak sekali keterbatasan waktu saja.

B. Partisipasi Masyarakat:

1. *Apakah masyarakat yang diundang dalam kegiatan Musrenbang tahunan tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten mencerminkan perwakilan masyarakat?*

Hal ini yang di harapkan oleh masyarakat oleh pemerintah masyarakat sangat merasa pesimis terhadap keputusan pemerintah yang saya lihat sekarang tidak berubah masyarakat tidak senang.

2. *Apakah perwakilan masyarakat yang hadir diberi kesempatan yang luas untuk mengemukakan usulan-usulan prioritas pembangunan di wilayahnya?*

Ya pemerintah yang kurang memperhatikan masyarakat yg benar2 data kebutuhan yg akurat selama ini hanya kadang2 usulan kami hanya sampai di meja saja.

3. *Apakah perwakilan masyarakat yang diundang berkontribusi mengemukakan pendapat dalam Musrenbang?*

Pada semua kami selalu pasif kita berharap kepada masyarakat yg hadir untuk mengemukakan pendapat semua ada.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. **Ketepatan Waktu:**

- *Apakah pelaksanaan Musrenbang Tahunan telah dilaksanakan tepat waktu, sesuai jadwal yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan?*

Kalau menurut pengamatan kami ~~pada~~ tahap pelaksanaan Musrenbang terkadang itu belum sesuai dengan jadwal yg ditetapkan bahkan ada pada saat tanggal pelaksanaan realisasi anggaran kami tunggu agar kedepannya Musrenbang dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yg ditetapkan baik pusat/daerah.

D. **Keaktifan Peserta:**

1. *Apakah peserta Musrenbang Tahunan yang diundang aktif menghadirinya?*

Ada sebagian yg hadir dan sebagian kembali yg tidak

2. *Apakah peserta aktif mengikuti seluruh proses acara Musrenbang Tahunan?*

Kalau menurut kami aktif untuk proses Musrenbang apabila mereka hadir saja atau ada undangan sebagian yg mereka bawa.

3. *Apakah peserta selalu memberikan saran pendapat dalam acara Musrenbang?*

Ada juga yg memberikan saran, tetapi tidak sesuai dgn program yg di harapkan pd masyarakat

E. **Hasil Musrenbang Bermanfaat bagi Penyusunan APBD:**

- *Sejauh mana hasil Musrenbang bermanfaat bagi penyusunan APBD?*

Kalau dilihat dari manfaat bagi APBD mulai dari pembangunan infrastruktur dan pemenuhan program yang ada di kecamatan kami terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yg pada di prioritaskan

F. **Terserapnya Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat:**

- *Apakah hasil Musrenbang telah menggambarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik dari aspek materil maupun non materil?*

Kalau menurut kami sudah menggambarkan aspirasi kebutuhan masyarakat tetapi pengalaman masyarakat memanfaatkan dan mengelola program yg di rumah tangga ada sebagian atau banyak kembali yang ada2 saja pembangunan yg berbeda tidak

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN
MENGENAI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUNAN DI KABUPATEN WAKATOBI

Informan : Tokoh Masyarakat

Tanggal Wawancara : 2 Februari 2009

A. Kemampuan Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan:

1. *Apakah perwakilan masyarakat yang diundang dalam acara Musrenbang memiliki data-data perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat?*

Kami merupakan data-data kebutuhan pembangunan oleh masyarakat kami tau yg merasakan apa yg layak di Gerhikan dan tidak di Gerhikan. Jadi dengan pemerintah kami hanya ikut mana mau

2. *Apakah usulan-usulan masyarakat telah mencerminkan kebutuhan nyata sesuai data identifikasi permasalahan, ataukah hanya merupakan keinginan dan harapan-harapan?*

Jadi seperti yang kami katakan tadi 2 hal dalam apa yg menjadi usulan kami dalam musrenbang ini adalah prioritas dulu sebelum kepada pemerintah

B. Partisipasi Masyarakat:

1. *Apakah masyarakat yang diundang dalam kegiatan Musrenbang tahunan tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten menyertakan perwakilan masyarakat?*

Yg kami lihat kadang kala tidak hanya sebatas perwakilan saja kadang apa yg menjadi usulan kami di tolak pada akhirnya juga tidak di akomodir oleh pemerintah

2. *Apakah perwakilan masyarakat yang hadir diberi kesempatan yang luas untuk mengemukakan usulan-usulan prioritas pembangunan di wilayahnya?*

Sebelum di adakan musyawarah saya hadapi kepada seluruh masyarakat dalam pencalonan kepala (pemerintah)

3. *Apakah perwakilan masyarakat yang diundang berkontribusi mengemukakan pendapat dalam Musrenbang?*

Iya sangat berkontribusi karena ini semua adalah hanya saja mempunyai kekurangan dalam daerah kami. Karena yg baik harus kami musrenbang ini adalah pencerminan kami untuk kepada pemerintah dan masyarakat umumnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. **Ketepatan Waktu:**

- *Apakah pelaksanaan Musrenbang Tahunan telah dilaksanakan tepat waktu, sesuai jadwal yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan?*

Kami tidak tau pasti jadwal itu kapan sebenarnya karena kami sendiri tidak pakar kapan waktu yg ditetapkan dari pusat atau nasional tapi yg kami tau adalah musrenbang ini sudah lewat dari waktu yang seharusnya

D. **Keaktifan Peserta:**

1. *Apakah peserta Musrenbang Tahunan yang diundang aktif menghadirinya?*

Ya beberapa tidak hadir dari pemerintah dalam menghadiri

2. *Apakah peserta aktif mengikuti seluruh proses acara Musrenbang Tahunan?*

Kalau dalam kegiatan aktif untuk proses musrenbang juga berjalan dengan baik kami kadang kala bertanya kalau masih ada hal yg kurang

3. *Apakah peserta selalu memberikan saran pendapat dalam acara Musrenbang?*

Ya

E. **Hasil Musrenbang Bermanfaat bagi Penyusunan APBD:**

- *Sejauh mana hasil Musrenbang bermanfaat bagi penyusunan APBD?*

Bagi kami sangat bermanfaat apa yang menjadi usulan kami dalam musrenbang untuk masyarakat desa Kalimandir. Karena tidak ada gunanya kalau pengusulan itu tapi kalau tidak bermanfaat

F. **Terserapnya Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat:**

- *Apakah hasil Musrenbang telah menggambarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik dari aspek materil maupun non materil?*

Kalau pendapat kami mereka bahwa itu belum menggambarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat karena kami sangat mengharapkan pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat karena pembangunan akan berjalan baik jika kebutuhan semua dan prasarana di miliki —

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN
MENGENAI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUNAN DI KABUPATEN WAKATOBI

Informan : Kadis Pertanian Kab. Wakatobi

Tanggal Wawancara : 12 Agustus 2008

A. Kemampuan Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan:

1. *Apakah perwakilan masyarakat yang diundang dalam acara Musrenbang memiliki data-data perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat?*
   Kami tidak memiliki data yg bagus/akurat selama hanya berupa data dan perkiraan dari pemerintah. Kebutuhan masyarakat & prioritas pembangunan data masih sangat kurang.
2. *Apakah usulan-usulan masyarakat telah mencerminkan kebutuhan nyata sesuai data identifikasi permasalahan, ataukah hanya merupakan keinginan dan harapan-harapan?*
   Pada umumnya usulan-usulan yang diajukan masyarakat mencerminkan kebutuhan mereka sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di wilayahnya sebagai petani.

B. Partisipasi Masyarakat:

1. *Apakah masyarakat yang diundang dalam kegiatan Musrenbang tahunan tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten mencerminkan perwakilan masyarakat?*
   Ya, yg kami undang adalah benar2 masyarakat yang hadir dari kecamatan2 di wilayah kami.
2. *Apakah perwakilan masyarakat yang hadir diberi kesempatan yang luas untuk mengemukakan usulan-usulan prioritas pembangunan di wilayahnya?*
   Ya, diberi kesempatan yang luas untuk mengusulkan masalah yang dianggap baik-buruk yg perlu di prioritaskan di daerah mereka.
3. *Apakah perwakilan masyarakat yang hadir berkontribusi mengemukakan pendapat dalam Musrenbang?*
   Dalam musyawarah kami selalu kontribusi masyarakat selalu berpartisipasi, mereka selalu aktif dalam menyampaikan usulan2 pembangunan di kecamatan mereka. Tidak semua usulan yang diajukan masyarakat dapat di akomodir.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Ketepatan Waktu:

- *Apakah pelaksanaan Musrenbang Tahunan telah dilaksanakan tepat waktu, sesuai jadwal yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan?*

Kalau menurut pengamatan kami selama ini belum dilaksanakan secara waktu yg di tentukan oleh pemerintah. Tapi kita harus paham bahwa hal tersebut yg sebab adalah karena, saat semua masih dlm tahap pembelajaran. Mudah2 kedepannya akan lebih baik

D. **Keaktifan Peserta:**

1. *Apakah peserta Musrenbang Tahunan yang diundang aktif menghadirinya?*
Ada yang tidak hadir pada saat sudah di undang, sebab ada kepentingan
2. *Apakah peserta aktif mengikuti seluruh proses acara Musrenbang Tahunan?*
Belum semua aktif dalam mengikuti musrenbang tetapi hanya sebagian yg mengikuti musrenbang
3. *Apakah peserta selalu memberikan saran pendapat dalam acara Musrenbang?*
yg ini tergantung musrenbang tersebut apakah mereka hadir atau mereka hanya diam saja hanya mendengar / bungkam

E. **Hasil Musrenbang Bermanfaat bagi Penyusunan APBD:**

- *Sejauh mana hasil Musrenbang bermanfaat bagi penyusunan APBD?*

Musrenbang ini sangat bermanfaat bagi pemerintah. Tanpa Musrenbang kita akan kesulitan menyusun program yg akan di masuk dalam APBD. Karena dengan musrenbang kita bisa

F. **Terserapnya Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat:**

- *Apakah hasil Musrenbang telah menggambarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik dari aspek materil maupun non materil?*

Kalau yg kita pahami itu semua adalah kebutuhan masyarakat baik materil maupun non materil. Semuanya harus di tampung oleh pemerintah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN
MENGENAI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUNAN DI KABUPATEN WAKATOBI

Informan : Tokoh LSM

Tanggal Wawancara : 3 Februari 2009

A. Kemampuan Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan:

1. *Apakah perwakilan masyarakat yang diundang dalam acara Musrenbang memiliki data-data perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat?*

Tidak ada data yg disiapkan saat musrenbang, semua berasal dari pengusulan masyarakat yg hadir saat musrenbang berlangsung, respon

2. *Apakah usulan-usulan masyarakat telah mencerminkan kebutuhan nyata sesuai data identifikasi permasalahan, ataukah hanya merupakan keinginan dan harapan-harapan?*

Apa yg di usulkan masyarakat itu adalah kebutuhan prioritas di daerah itu. Namun yang terakomodir tetap saja masih kebutuhan

B. Partisipasi Masyarakat:

1. *Apakah masyarakat yang diundang dalam kegiatan Musrenbang tahunan tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten mencerminkan perwakilan masyarakat?*

Ya, semua yang hadir itu sudah merepresentasikan perwakilan masyarakat. Jadi peserta yang hadir dengan usulan sesuai kebutuhan mereka.

2. *Apakah perwakilan masyarakat yang hadir diberi kesempatan yang luas untuk mengemukakan usulan-usulan prioritas pembangunan di wilayahnya?*

Kadang masyarakat yang hadir itu hanya sebagai pelengkap saja. Mereka hanya diberi kesempatan untuk mengusulkan tetapi tidak ditindaklanjuti. Alasan pemerintah hanya mengacu pada RPJMD

3. *Apakah perwakilan masyarakat yang diundang berkontribusi mengemukakan pendapat dalam Musrenbang?*

Ya, berkontribusi juga! Hanya saja usulan yang masuk prioritas kebutuhan masyarakat dalam daerah kurang diakomodir oleh pemerintah daerah tapi usulan masyarakat itu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Ketepatan Waktu:

- *Apakah pelaksanaan Musrenbang Tahunan telah dilaksanakan tepat waktu, sesuai jadwal yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan?*

Kami sebenarnya belum tau proses jadwal selengkap untuk pelaksanaan Musrenbang Tahun ini Bulan berapa dan tgl berapa. Kami tidak tau kalau sudah diundang maka kami hadir kalau belum diundang atau tidak diundang maka kami tidak bisa hadir kalau tidak diberitahu

D. Keaktifan Peserta:

1. *Apakah peserta Musrenbang Tahunan yang diundang aktif menghadirinya?*

Sepengetahuan kami yang diundang dan hadir sebelumnya memang pasti akan hadir

2. *Apakah peserta aktif mengikuti seluruh proses acara Musrenbang Tahunan?*

Kalau pengamatan kami yang sudah kami hadiri maka peserta dari masyarakat aktif memberikan usulan - usulan pembangunan sederhana yang

3. *Apakah peserta selalu memberikan saran pendapat dalam acara Musrenbang?*

Ya sebatas pada kalau yang dianggap penting maka pasti usulkan

E. Hasil Musrenbang Bermanfaat bagi Penyusunan APBD:

- *Sejauh mana hasil Musrenbang bermanfaat bagi penyusunan APBD?*

Kami tidak tahu apakah Musrenbang ini pasti dibuat APBD. Hanya mengharapkan pembangunan desa Musrenbang bisa dan kegiatan maka APBD yang tidak sulit dan memberikannya.

F. Terserapnya Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat:

- *Apakah hasil Musrenbang telah menggambarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik dari aspek materil maupun non materil?*

Kalau usulan ini terpenuhi maka sudah jelas kebutuhan ini menggambarkan aspirasi baik materil atupun non materil. Tapi yang ada masalah bahwa tidak semua atau sebagian besar usulan yang tercantum pasti

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN
MENGENAI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUNAN DI KABUPATEN WAKATOBI

Informan : Ketua DPRD Kab. Wakatobi

Tanggal Wawancara : 1 Pebruari 2005

A. Kemampuan Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan:

1. *Apakah perwakilan masyarakat yang diundang dalam acara Musrenbang memiliki data-data perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat?*

Semua perwakilan desa yg diundang sangat memiliki data2 perencanaan pembangunan yang sebetulnya merupakan kebutuhan mereka meyangkut itu berupa infrastruktur dalam bidang pendidikan dll tergantung apa di desa tsb.

2. *Apakah usulan-usulan masyarakat telah mencerminkan kebutuhan nyata sesuai data identifikasi permasalahan, ataukah hanya merupakan keinginan dan harapan-harapan?*

Ya di sebabkan itu merupakan hasil dari identifikasi yang sebenarnya. Apa yg menjadi usulan itu semua adalah hal yg di anggap sangat penting.

B. Partisipasi Masyarakat:

1. *Apakah masyarakat yang diundang dalam kegiatan Musrenbang tahunan tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten mencerminkan perwakilan masyarakat?*

Ya semua yg di undang adalah perwakilan dari masyarakat dari berbagai lapisan itu tdi. Masyarakat melalui forum musrenbang dapat manfaat forum perencanaan pembangunan dlm masyarakat

2. *Apakah perwakilan masyarakat yang hadir diberi kesempatan yang luas untuk mengemukakan usulan-usulan prioritas pembangunan di wilayahnya?*

Kesempatan yang diberikan tapi biasanya hanya dalam tahapan sebelumnya tidak selalu di realisasikan dari musrenbang ini sebagai forum untuk menyampaikan usulan2 sebetulnya atau sebagai apa!

3. *Apakah perwakilan masyarakat yang diundang berkontribusi mengemukakan pendapat dalam Musrenbang?*

Sangat berkontribusi memberikan saran atau usulan yang kurangnya apa yg menjadi kebutuhan mereka dalam di desanya. Jadi tdk. Formalitas pasrtisipasi semata belaka. Jadi tdk. ini dapat terlihat pada pelaksanaan program apa yg menjadi usulan2 masyarakat itu dapat di pertanggung jawabkan dengan baik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. **Ketepatan Waktu:**

- *Apakah pelaksanaan Musrenbang Tahunan telah dilaksanakan tepat waktu, sesuai jadwal yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan?*

Calon menurut beliau pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan atau masih perlu segera dipercepat pelaksanaan Musrenbang tersebut. Calon terpilih atau kepala bagian harus dapat dicambil selesai. Jangan hanya dapat di kelas bagian dari tercapai bagi supaya terwujud pembangunan daerah lebih.

D. **Keaktifan Peserta:**

1. *Apakah peserta Musrenbang Tahunan yang diundang aktif menghadirinya?*

Aktif

2. *Apakah peserta aktif mengikuti seluruh proses acara Musrenbang Tahunan?*

Aktif tampak serius

3. *Apakah peserta selalu memberikan saran pendapat dalam acara Musrenbang?*

Iya, tapi ada juga tidak (Minoritas) tidak berkomunikasi baik, kemudian ada yang hanya ingin cepat selesai saja.

E. **Hasil Musrenbang Bermanfaat bagi Penyusunan APBD:**

- *Sejauh mana hasil Musrenbang bermanfaat bagi penyusunan APBD?*

Calon menurut beliau hasil dapat bermanfaat bagi ~~APBD~~ APBD. Jadi sebab bagi pemerintah pelaksana Musrenbang tidak memberikan atau masih harus memperbaiki lagi kebutuhan yang ~~ter~~ terbaik pembangunan ada yang harus dapat diubah dari bawah.

F. **Terserapnya Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat:**

- *Apakah hasil Musrenbang telah menggambarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik dari aspek materil maupun non materil?*

Belum. Calon berharap kepada pemerintah agar dapat memperbaiki peraturan dalam pelaksanaan proses Musrenbang agar keseluruhan harus sibuk wakil dari masyarakat dapat tercapai pemerintah dinas dapat tercapai dan baik kembali lagi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN MENGENAI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUNAN DI KABUPATEN WAKATOBI

Informan : Sekda Kab. Wakatobi

Tanggal Wawancara : 19 Januari 2019

A. Kemampuan Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan:

1. *Apakah perwakilan masyarakat yang diundang dalam acara Musrenbang memiliki data-data perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat?*

   Saya pikir kita sudah memiliki data-data yg diasyap cukup baik, kebutuhan dalam mendukung pembangunan di wakatobi ini

2. *Apakah usulan-usulan masyarakat telah mencerminkan kebutuhan nyata sesuai data identifikasi permasalahan, ataukah hanya merupakan keinginan dan harapan-harapan?*

   Kami pikir ini tidak mencerminkan kebutuhan nyata sesuai data yang dapat di pertanggung jawabkan, walaupun kadang tidak semua usulan itu berbeda dengan

B. Partisipasi Masyarakat:

1. *Apakah masyarakat yang diundang dalam kegiatan Musrenbang tahunan tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten mencerminkan perwakilan masyarakat?*

   Kadang kala ini dari yang mewakili kelompok kita, karena kurang pemahaman terhadapnya dan untuk dapat melancarkan proses musrenbang itu sehingga yg di undang dan mewakili ini tidak semua2 di hadiri dengan baik -

2. *Apakah perwakilan masyarakat yang hadir diberi kesempatan yang luas untuk mengemukakan usulan-usulan prioritas pembangunan di wilayahnya?*

   Ini dikarenakan mereka tidak tahu bahwa dalam proses musrenbang di kadang2 mereka di undang dan tidak di berikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang kadang kurang sesuai dengan kebutuhan yg di inginkan dgn mereka informasi luas dari masyarakat

3. *Apakah perwakilan masyarakat yang diundang berkontribusi mengemukakan pendapat dalam Musrenbang?*

   Iya kan tahu mereka cukup berkontribusi baik dan cukup peduli dengan pembangunan daerah kita ini

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Ketepatan Waktu:

- *Apakah pelaksanaan Musrenbang Tahunan telah dilaksanakan tepat waktu, sesuai jadwal yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan?*

Walaupun Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Cabang Tiga Timur yang sudah diberikan waktu muda melalui pemberitahuan Kelurahan pilobang atau pemberitahuan kepada masyarakat tetapi masih ada saja masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah tersebut. Jadi Pemerintah harus paham

D. Keaktifan Peserta:

1. *Apakah peserta Musrenbang Tahunan yang diundang aktif menghadirinya?*

Aktif

2. *Apakah peserta aktif mengikuti seluruh proses acara Musrenbang Tahunan?*

Aktif

3. *Apakah peserta selalu memberikan saran pendapat dalam acara Musrenbang?*

Ya, selalu memberikan saran dan usulan karena hanya di sediakan satu jam jawab atau tanggapan-tanggapan dari peserta musyawarah agar pelaksanaan musrenbang dapat berjalan dengan baik.

E. Hasil Musrenbang Bermanfaat bagi Penyusunan APBD:

- *Sejauh mana hasil Musrenbang bermanfaat bagi penyusunan APBD?*

Dalam musrenbang Pemerintah harus dapat memprioritaskan dengan baik apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat agar musrenbang ini berdampak manfaat dalam penyusunan APBD. Juga Dimana Pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan dalam penyusunan A.P.B.D.

F. Terserapnya Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat:

- *Apakah hasil Musrenbang telah menggambarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik dari aspek materil maupun non materil?*

Hasil Musrenbang sudah menggambarkan aspirasi dan kebutuhan Kelurahan Cabang Tiga Timur yang lebih diprioritaskan pembangunan. Dalam hal ini apa yang menjadi harapan masyarakat adalah harus dapat di pikul pemerintah agar kesejahteraan tercapai baik daerah maupun nasional.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

40605.pdf

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN
MENGENAI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUNAN DI KABUPATEN WAKATOBI

Informan : Kepala Bappeda Kab. Wakatobi

Tanggal Wawancara : 3 Februari 2009

A. Kemampuan Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan:

1. *Apakah perwakilan masyarakat yang diundang dalam acara Musrenbang memiliki data-data perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat?*
   Yaa... Sebelum proses Musrenbang sudah Disampaikan dgn dalam pelaksanaan Musrenbang Disampaikan, ada tanggapan akhirat dlm bentuk data-data penting yg diangkat saat Musrenbang.

2. *Apakah usulan-usulan masyarakat telah mencerminkan kebutuhan nyata sesuai data identifikasi permasalahan, ataukah hanya merupakan keinginan dan harapan-harapan?*
   Apa yg menjadi usulan masyarakat dlm proses Musrenbang kami bahas dan usulkan di pembahasan dalam penyusunan APBD Apakah yg masuk atau tidak, semua akan di pelajari setelah Musrenbang

B. Partisipasi Masyarakat:

1. *Apakah masyarakat yang diundang dalam kegiatan Musrenbang tahunan tingkat desa/kelurahan/kecamatan dan kabupaten mencerminkan perwakilan masyarakat?*
   Harapan kami dlm hal ini pemerintah masyarakat yg hadir yg dalam benar2 dan betul2 masyarakat yg benar2 hadir diperlukan dan benar2 dapat Sampai dimana mereka tugasnya

2. *Apakah perwakilan masyarakat yang hadir diberi kesempatan yang luas untuk mengemukakan usulan-usulan prioritas pembangunan di wilayahnya?*
   Sangat diberi kesempatan kami sangat Mudah2an, harapan kami yg baik untuk dapat dimasukkan dan dapat dibahas dlm penyusunan APBD dapat memenuhi Semua pasangan kebutuhan

3. *Apakah perwakilan masyarakat yang hadir berkontribusi mengemukakan pendapat dalam Musrenbang?*
   Ya mereka aktif berkontribusi karena kami selalu memberikan kesempatan yg seluas-luasnya untuk dapat mengemukakan hal-hal penting yg berhubungan dengan pelaksanaan Musrenbang dalam hal ini Musrenbang ini adalah Forum yg sangat tepat untuk mengupas dan mencari solusi bersama masyarakat yg berkaitan dgn pembangunan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Ketepatan Waktu:

- *Apakah pelaksanaan Musrenbang Tahunan telah dilaksanakan tepat waktu, sesuai jadwal yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan?*

Selalu kami berupaya sesuai jadwal musrenbang, namun terkadang ada juga tidak memungkinkan & daerah kami ini sebagian besar yang mengalami dan terkena alam. Tapi Alhamdulillah selama ini lancar aman, karena ketersediaan waktu dan hadirnya semua pihak yang terkait sangat mendukung, ke kecamatan yang kurang maksimal ya karena beberapa lokasi

D. Keaktifan Peserta:

1. *Apakah peserta Musrenbang Tahunan yang diundang aktif menghadirinya?*

Dalam hal ini kami pantau dari pada kegiatan musrenbang sebelumnya dengan metode yang berbeda dengan sebelumnya dan mereka sangat antusias dengan adanya musrenbang

2. *Apakah peserta aktif mengikuti seluruh proses acara Musrenbang Tahunan?*

Ya, mereka aktif karena apa yang mereka usulkan dan sampaikan dalam musrenbang dan sesuai dengan kebutuhan yang dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

3. *Apakah peserta selalu memberikan saran pendapat dalam acara Musrenbang?*

Saya, kami selalu memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan dalam proses musrenbang

E. Hasil Musrenbang Bermanfaat bagi Penyusunan APBD:

- *Sejauh mana hasil Musrenbang bermanfaat bagi penyusunan APBD?*

Sangat bermanfaat. Dengan musrenbang kami dapat mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat yang ada di desa/kelurahan yang akan kami usulkan dalam penyusunan APBD. Dengan kami mengetahui mana yang harus didahulukan dan mana yang dapat ditunda

F. Terserapnya Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat:

- *Apakah hasil Musrenbang telah menggambarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik dari aspek materil maupun non materil?*

Iya semua yang menjadi aspirasi masyarakat adalah prioritas dan utama berdasarkan kami akan pengusulan APBD, tentu saja di program kan. Hanya saja kita harus lebih bijak dalam menyikapi sebagian aspirasi yang masyarakat sampaikan, karena tidak dapat semua kita penuhi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 3

DATA KAJIAN HASIL JAWABAN RESPONDEN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2008

A. Efektifitas Pelaksanaan Musrenbang Tahunan

NO	PERNYATAAN	JUMLAH (Orang)					TOTAL (Orang)
		SS	S	AS	KS	TS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SKPD senantiasa melakukan survey dalam menjaring permasalahan pembangunan	7	22	10	1	0	40
2.	SKPD memiliki data yang akurat sebagai bahan Musrenbang	2	6	14	18	0	40
3.	SKPD memiliki skala prioritas program dan kegiatan setiap tahun	2	24	12	2	0	40
4.	SKPD memiliki rencana program sesuai dengan rencana Strategi	4	34	2	0	0	40
5.	Partisipasi masyarakat terbuka secara umum dalam Musrenbang	2	4	19	15	0	40
6.	SKPD menyiapkan media dan mekanisme untuk partisipasi masyarakat secara terbuka	2	17	14	7	0	40
7.	Penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan secara langsung	0	12	15	13	0	40
8.	Partisipasi masyarakat cukup berarti dalam merumuskan program	10	20	5	5	0	40
9.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang	0	7	27	6	0	40
10.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang	0	5	30	25	0	40
11.	Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten sesuai jadwal dan tahapan Musrenbang	0	3	25	12	0	40
12.	Peserta Musrenbang aktif menghadiri Musrenbang	8	17	15	0	0	40
13.	Peserta aktif mengikuti proses Musrenbang	8	12	20	0	0	40
14.	Peserta berperan aktif memberikan saran pemikiran dalam Musrenbang	2	12	26	0	0	40
15.	Peserta mengikuti proses Musrenbang sampai selesai	3	13	24	0	0	40
16.	Rumusan program SKPD selalu tepat sesuai dengan arah kebijakan organisasi	5	27	5	1	2	40
17.	Rumusan program SKPD yang diusulkan selalu disetujui pada Musrenbang Kabupaten	3	12	20	2	3	40
18	Keakuratan rumusan program SKPD sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan	5	25	6	2	2	40
19.	Program yang ditetapkan dalam Musrenbang sesuai kebutuhan SKPD	8	26	3	2	1	40
20.	Program yang ditetapkan mudah dilaksnakan oleh SKPD	6	29	2	1	2	40
21.	Program yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kab. Wakatobi	3	30	2	2	3	40
22.	Program yang ditetapkan selalu memperhitungkan keberlanjutan program.	1	5	29	4	1	40

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan

NO	PERNYATAAN	JUMLAH (Orang)					TOTAL (Orang)
		SS	S	AS	KS	TS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Hasil Musrenbang sesuai prioritas program SKPD	5	27	5	1	2	40
2.	SKPD mudah melakasanakan hasil Musrenbang	3	12	20	2	3	40
3.	SKPD memiliki kemampuan kelembagaan yang memadai untuk melaksnakan program	5	25	6	2	2	40
4.	SKPD memiliki kemampuan aparatur yang memadai untuk melaksanakan program	8	26	3	2	1	40
5.	Hasil Musrenbang mampu menyerap aspirasi masyarakat dari aspek materil	5	30	1	3	1	40
6.	Hasil Musrenbang mampu menyerap kebutuhan masyarakat dari aspek non-materil	0	35	5	0	0	40
7.	Hasil Musrenbang memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek materil	1	36	3	0	0	40
8.	Hasil Musrenbang memenuhi kebutuhan masyarakat dari aspek non-materil	5	31	2	1	1	40

Keterangan:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- AS : Agak Setuju
- KS : Kurang Setuju
- TS : Sangat Tidak Setuju

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 4

TRANSKRIP KUTIPAN HASIL WAWANCARA
MENGENAI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2008

NO	TANGGAL	INFORMAN	KUTIPAN HASIL WAWANCARA
1	2	3	4
A.	**Efektivitas Pelaksanaan Musrembang**		
1.	**Kemampuan Mengidentifikasi Masalah-masalah Pembangunan**		
	5 Februari 2009	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi	"Masalah yang dihadapi oleh SKPD kami dalam kaitannya dengan kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan adalah terbatasnya data yang akurat. Artinya kami masih kurang memiliki data mengenai jenis kebutuhan masyarakat apalagi secara geografis Kabupaten Wakatobi sulit dijangkau secara keseluruhan. Sehingga kadang-kadang perencanaan yang dilakukan tidak didasarkan pada data yang akurat".
	12 Agustus 2008	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi	"Dinas yang kami pimpin memiliki kendala tentang data yang akurat, berkaitan dengan beberapa hal, seperti kebutuhan guru tiap sekolah, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, kondisi bangunan sekolah, data murid, siswa yang berhak mendapatkan beasiswa atau bantuan belajar, bahkan data base pendidikan Kabupaten Wakatobi belum ada. Hal ini tentunya menyulitkan kami untuk menyusun rencana".
	20 Februari 2009	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi	"Dalam upaya memajukan ekonomi dan sistem pemerintahan daerah yang bernuansa normatif, dinas yang kami pimpin memiliki kendala akan minimnya data dan informasi yang akurat tentang kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan laut, darat dan udara untuk pengembangan hubungan antarpulau yang meliputi, data kondisi wilayah, ketersediaan sarana perhubungan setempat, jumlah tenaga lapang, yang tentunya kesemuanya ini harus ditunjang oleh profesionalisasi yang optimal".
	22 Januari 2009	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi	"Dinas kami sangat terkendala oleh data yang akurat mengenai masalah-masalah kesehatan masyarakat, misalnya kondisi kesehatan pada umumnya, gizi masyarakat, fasilitas kesehatan, seperti penempatan puskesmas dengan petugasnya, masalah-masalah utama kesehatan masyarakat di Kabupaten Wakatobi belum dimiliki data yang akurat. Dengan kata lain, kami kekurangan data yang akurat untuk masalah-masalah

UNIVERSITAS TERBUKA

			kesehatan. Hal ini merupakan salah satau dampak kondisi geografis yang sulit dijangkau, karena sarana perhubungan tidak memadai, dan petugas kami sangat terbatas".
2.	**Partisipasi Masyarakat**		
	2 Februari 2009	Tokoh Masyarakat Kabupaten Wakatobi	"Pada kenyataannya masyarakat masih bingung di mana dan kapan aspirasi mereka disalurkan. Memang ada musrenbang, tapi perhatian masyarakat untuk Musrenbang sangat kecil. Hal ini tidak terlepas dari mekanisme perencanaan yang ada, karena indikasi menunjukkan bahwa perencanaan seakan-akan dari bawah, tetapi kemudian hasil keputusan akhir (program pembangunan) banyak yang tidak sesuai dengan usulan".
	3 Februari 2009	Bappeda Kabupaten Wakatobi	"Memang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang belum optimal, hal ini disebabkan oleh antara lain sebagian SKPD yang ada masih kurang membuka diri kepada masyarakat, misalnya tidak hadir dalam Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, sehingga ada anggapan masyarakat percuma kita ikut Musrebang karena pejabat yang diharapkan hadir tidak hadir. Hal lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang. Memang ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dalam pelaksanaan musrenbang, karena kelemahan ini ada pada dua sisi baik SKPD maupun masyarakat itu sendiri".
	19 Januari 2009	Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi	"Bahwasanya Wakatobi dengan segala keterbatasan-nya harus mampu menciptakan pemerintahan dengan sistem perencanaan yang optimal. Pemerintah sebagai *stakeholder* adalah pemegang kendali dalam menentukan baik dan buruknya tatanan perencanaan pembangunan. Tanpa didasari oleh tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi serta kepekaan terhadap usulan kebutuhan dari masyarakat maka secara dramatis Kabupaten kita akan terpuruk jauh terbelakang dengan daerah-daerah lain. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran haruslah menjadi prioritas utama dalam pencapaian tujuan pembangunan. Juga Musrenbang jangan hanya jadi ajang asal. Pemerintah harus mampu menuntun dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tujuan dan arah pelaksanaan pembangunan yang direncanakan".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

	1 Februari 2009	Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi	"Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Wakatobi tidak berjalan sesuai dengan pola asas-asas pelaksanaan Musrenbang nasional yang dilahirkan oleh pemerintah negara kita. Kalau mencermati proses pelaksanaannya, bahwa Musrenbang di Kabupaten Wakatobi ini hanya menurut keinginan atau kebutuhan para lembaga saja. SKPD dan sejenisnya bukan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi boleh dikatakan peran unsur masyarakat hampir tidak ada. Terlihat dari setiap pelaksanaannya usulan masyarakat terkadang sama sekali tidak di akomodir. Kita harus menata ulang pelaksanaan Musrenbang ini agar berjalan sesuai dengan tujuan kita bersama. Dengan demikian kami unsur legislatif sebagai wakil masyarakat yang senantiasa duduk bersama dengan pemerintah dalam merumuskan dalam pemanfaatan anggaran akan berjalan lancar dan tertib serta kondusif".
3.	**Ketepatan Waktu**		
	14 Februari 2009	Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi	"Belum tepatnya waktu pelaksanaan Musrenbang ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kesiapan perangkat pemerintah mulai pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten kurang memperhatikan bahan Musrenbang, dan masalah prosedur penyusunan anggaran yang selalu terlambat".
4.	**Keaktifan Peserta**		
	14 Februari 2009	Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi	"Keaktifan peserta Musrenbang dari tiap instansi sudah memadai, hanya kadang-kadang masih dijumpai beberapa pejabat yang tidak mengikuti pelaksanaan Musrenbang".
5.	**Ketepatan Rumusan Rencana Program**		
	14 Februari 2009	Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi	"Rumusan program yang diusulkan SKPD selalu mendapat hambatan di lembaga legisiatif, sehingga tidak semua usulan bisa diterima, yang sebenarnya bukan karena program itu kurang baik, tetapi lebih disebabkan mekanisme penyusunan anggaran yang cenderung menggunakan pendekatan politik oleh anggota legislatif. Misalnya Dinas Pendidikan pada Tahun 2007 mengusulkan anggaran pendidikan S2 bagi pegawai Pemda Wakatobi, namun tidak disetujui oleh DPRD".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6.	**Ketepatan Program Pembangunan**		
	3 Februari 2009	Tokoh LSM Kabupaten Wakatobi	"Pada setiap tahunnya program-program pembangunan yang hadir di Kabupaten Wakatobi hampir tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Banyak program-program yang tidak tepat sasaran yang hanya membuang-buang anggaran. Ini sangat membingungkan masyarakat kenapa samapai terjadi demikian. Pemerintah harusnya sensitif dengan masyarakat karena keberhasilan suatu daerah diukur dari kesejahtraan masyarakat bukan kekayaan para pemangku jabatan yang melimpah".
	16 Februari 2009	Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi	"Perencanaan pembangunan di Kabupaten Wakatobi masih cenderung perencanaan dari atas (*top down planning*). Hal ini dapat dilihat banyaknya usulan dari unit kerja di bawah, tetapi tidak mampu diakomodir dalam penetapan anggaran. Tentunya hal ini merupakan satu kelemahan dalam perencanaan pembangunan, hanya saja tidak bisa dihindari karena mekanisme penyusunan anggaran yang belum berjalan secara optimal. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya jumlah usulan sementara kemampuan anggaran sangat terbatas".
B.	**Hasil Musrenbang**		
1.	**Bermanfaat bagi Penyusunan APBD:**		
	26 Februari 2009	Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Bappeda Kabupaten Wakatobi	"Hasil Musrenbang yang dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, sangat bermanfaat dalam penyusunan program dan anggaran di kantor kami. Hal ini karena data-data yang dibutuhkan cukup lengkap dari hasil Musrenbang, yang berisikan berbagai usulan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hanya saja kadang-kadang usulan terlalu banyak, sementara anggaran yang tersedia relatif terbatas, sehingga kami melakukan seleksi, usulan program mana yang menjadi prioritas".
2.	**Terserapnya Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat**		
	20 Februari 2009	Tokoh LSM Kabupaten Wakatobi	"Melihat struktur APBD Kabupaten Wakatobi dalam tiga tahun 2008 menunjukkan bahwa anggaran disusun belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Belanja pelayanan publik relatif kecil yakni hanya mencapai 47,5 peresen dari jumlah APBD. Lagi pula anggaran belum terdistribusi dengan baik, misalnya pada sektor pendidikan, masih banyak sekolah-sekolah yang minim fasilitas belajarnya. Demikian juga pada sektor kesehatan, program pemerintah daerah belum berihak kepada masyarakat".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

	5 Februari 2009	Tokoh Masyarakat Kabupaten Wakatobi	"Pada kenyataannya masyarakat kurang memahami apa pentingnya Musrenbang bagi mereka. Sehingga perhatian masyarakat untuk Musrenbang sangat kecil. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi mengenai Musrenbang, dan adanya indikasi bahwa perencanaan seakan-akan dari bawah, tetapi kemudian hasil keputusan akhir (program pembangunan) banyak yang tidak sesuai dengan usulan".
	25 Februari 2009	Tokoh LSM Kabupaten Wakatobi	"Bahwa anggaran disusun belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Belanja pelayanan publik relatif kecil yakni hanya mencapai 47,5 persen dari jumlah APBD. Lagi pula anggaran belum terdistribusi dengan baik, misalnya pada sektor pendidikan, masih banyak sekolah-sekolah yang minim fasilitas belajarnya. Demikian juga pada sektor kesehatan sangat minim, program pemerintah daerah belum berpihak kepada masyarakat".

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Pemb. Drainase	Desa Maleko		APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	✓
17.	Pemb.Jalan Setapak Menuju Air Minum	Desa Pookambua	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
18.	Pemb.Jln Setapak dari Lebu ke SD Wungka	Desa Lembo - lembo	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
19.	Pemb. Jalan Usaha Tani	Desa Pookambua	250 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
20.	Pengadaan Gedung TK	Desa Pookambua	7 x 8 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
21.	Pemb Tower Air Minum Lengkap dengan Pipa 3/4 Inci	Desa Pada Raya Makmur	50 buah	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
22.	Pemb. Jalan menuju Manugela Padaue	Desa Pada Raya Makmur	400 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
23.	Rehabilitas SD	Desa Pada Raya Makmur	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
24.	Pembangunan Drainase	Kelurahan Pongo	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
25.	Pemb. Jalan Aspal	Kelurahan Pongo	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
26.	Perintisan Jalan 4 Titik	Kelurahan Pongo	800 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
27.	Penggalian Alur Masuk Pelabuhan	Kelurahan Pongo	600 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
28.	Pengerasan Jalan Lintas Menuju Kel. Wandoka	Kelurahan Pongo	1,5 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
29.	Pemb Jalan Rabat Beton	Kel. Wandoka Selatan	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
30.	Pembuatan Tambatan Perahu	Kel. Wandoka Selatan	30 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
31.	Pengadaan Sumur Bor	Kel. Wandoka Selatan	2 unit	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
32.	Pemb. Jalan Usaha Tani	Kel. Wandoka Selatan	700 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
33.	Pemb. Talud Penahan Ombak	Kel. Wandoka Selatan	400 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
34.	Pengadaan WC Umum	Kel. Wandoka	1 unit	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
35.	Pengadaan Polindes	Kel. Wandoka	1 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
36.	Pengadaan Gedung TK	Kel. Wandoka	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
37.	Pengadaan Jalan Tani	Kel. Wandoka Utara	1 unit	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
38.	Pemb. Taluk Penahan Ombak	Kel. Wandoka Utara	100 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
39.	Pengadaan Gedung TK	Kel. Wandoka Utara	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
40.	Pengadaan Gedung Posyandu	Desa Sombu	12 x 8 m	APBD	Dinas Kesehatan	✓	

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	Pembangunan Talud Penahan Ombak	Desa Sombu	80 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
42.	Pengaspalan Jalan Menuju Desa Tindoi	Desa Sombu	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
43.	Pengadaan Gedung TK	Desa Wa Pia-pia	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
44.	Peningkatan Pustu Menjadi Puskesmas	Desa Wa Pia-pia	12 x 8 m	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
45.	Pengadaan Jalan Baru	Desa Waha	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
46.	Pengadaan Tanggul Penahan Ombak	Desa Waha	350 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
47.	Pemb. Jalan Rabat Beton	Desa Kornova	400 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
48.	Pengadaan Gedung Posyandu	Desa Kornova	6 x 10 m	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
49.	Pengadaan Tanggul Penahan Ombak	Desa Kornova	480 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
50.	Pengerasan Jalan Poros Menuju Desa Tindoi Timur	Desa Waelumu	500 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
51.	Pemb. Jalan Rabat Beton	Desa Waelumu	4 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
52.	Pengadaan Gedung TK	Desa Waelumu	8 x 12 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	✓
53.	Pemb. Talud Penahan Ombak	Desa Waetuno	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
54.	Pemb.Got Saluran Limbah dari Jalan Raya	DesaWaetuno	60 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
55.	Pemb. Jalan Tani menuju Tindoi	DesaWaetuno	2 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
56.	Pengadaan Lokasi Gedung SMP	DesaWaetuno		APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
57.	Pemb. Jalan Rabat Beton	Desa Waetuno	2.800 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
58.	Pemb. Jalan Setapak dari Jalan Raya Kelurahan Motika	Desa Longa	1,5 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
59.	Pengerasan Jalan Untuk Perluasan Pemukiman	Desa Longa	2 x 3 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
60.	Pengadaan Gedung TK	Desa Longa	2 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
61.	Pengadaaan Sumur Umum	Desa Longa	12 buah	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
62.	Pengadaan Jalan Usaha Tani Menuju Topanuanda	Desa Longa	1,5 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
63.	Pewngadaan Jamban Umum	Desa Longa	8 buah	APBD	Dinas Kesehatan		✓
64.	Pemb. Jalan Rabat Beton	Desa Longa	80 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
II.	**Kecamatan Wangi-Wangi Selatan**						

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengaaan WC Umum	Desa Mola Utara	2 unit	APBD	Dinas Kesehatan		✓
2.	Pengaaan WC Umum	Desa Matahora	9 unit	APBD	Dinas Kesehatan		✓
3.	Pengaaan WC Umum	Desa Komala	2 Unit	APBD	Dinas Kesehatan		✓
4.	Pengadaan Gedung Polindes	Desa Mola Samaturu	1 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
5.	Bantuan Perbaikan Tempat Permandian Umum	Desa Kabita Togo	1 unit	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
6.	Pengaspalan Jalan Poros Mandati	Kel. Mandati I	1,4 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
7.	Pengaspalan Jalan	Kel. Mandati III	3 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
8.	Pengaspalan Jalan	Desa Wungka	4,5 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
9.	Pengaspalan Jalan	Desa Matahora	3 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
10.	Pembangunan Jalan antar Dusun (Rabat Beton)	Desa Liya Bahari Indah	257 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
11.	Pengadaan Rabat Beton Jalan Setapak	Desa Mola Samaturu	325 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
12.	Rabat Beton Jalan Setapak	Desa Kabita Togo	100 x 2 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
13.	Pengadaan Rabat Beton Jalan Setapak	Kel. Mandati I	420 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
14.	Rehab Jalan Rabat	Desa Mola Utara	150 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
15.	Rabat Jalan Setapak	Kel. Mandati III	3,5 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
16.	Rabat Beton Jalan Setapak	Desa Kabita	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
17.	Rabat Beton Jalan Setapak	Desa Wungka	2,5 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
18.	Pembuatan Jalan Baru RSUD Komala	Kel. Mandati III		APBD	Dinas Kesehatn		✓
19.	Pengerasan Jalan Desa Liya Matahora	Antara Liya dan Matahora	7 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
20.	Pengadaan Jalan Poros Mola	Desa Mola Samaturu		APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
21.	Air bersih dan Perpipaan	Desa Matahora	3 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
22.	Pengadaan Pipa	Desa Mola Utara	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
23.	Pembuatan PAH	Desa Wungka	4 buah	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
24.	Pembangunan Drainase	Desa Komala	2 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
25.	Pembuatan Drainase	Desa Wungka	2,5 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
UNIVERSITAS TERBUKA
40605.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Penimbunan Lokasi pasar	Desa Kapota Utara		APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
27.	Penimbunan Lokasi pasar	Desa Mola Utara	2x 2,5 x 500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
28.	Pengadaan Jeti	Desa Mola Utara	5 unit	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
29.	Pengadaan Listrik Tenaga Surya	Desa Wungka	60 rumah	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
30.	Pembuatan Gapura Batas Desa	Desa Kabita	1 unit	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
31.	Pengaspalan Jalan Kantor Camat	Kel.Mandati III	1,5 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
32.	Rabat jalan Pesisir Pantai	Ds. Liya One Melangka	4 km	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
33.	Pembangunan Talud Pantai	Ds. Liya Bahari Indah	214 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
34.	Pembuatan Talud Pantai Sousu	Desa Matahora	700 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
35.	Rabat beton jalan Panatai Melaione	Desa Matahora	1 km	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
36.	Pembuatan Talud Pemecah Gelombang	Desa Kabita	400 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
37.	Pembuatan Talud	Desa Liya Mawi	375 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
38.	Pembuatan Jembatan	Desa Liya Bahari Indah		APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
39.	Pembuatan Jembatan Penghubung ke pantai	Desa Liya Bahari Indah	64 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
40.	Pembangunan Jembatan	Desa Mola Bahari	70 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
41.	Pmb. Jmbtn dari Kel. Mandati III ke Mola Selatan (Rabat dan pelebaran)	Desa Mola Selatan	1 km	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
42.	Pembuatan Dermaga	Ds Mola Nelayan Bakti	7 x 12 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
43.	Pembuatan Dermaga	Desa Kapota	500 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
44.	Pembuatan Jembatan Titian	Ds Mola Nelayan Bakti	300m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	✓
45.	Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu	Desa Matahora	300 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
46.	Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu	Desa Mola Utara	100 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
47.	Pembuatan Jembatan Tambatan Perahu	Desa Mola Samaturu	100 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
48.	Pembuatan Galangan Bodi Batang	Ds Mola Nelayan Bakti	20 x 30 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
49.	Pembuatan Galangan Bodi Batang	Desa Mola Samaturu		APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
50.	Pembuatan Terminal Penumpang	Desa Mola Samaturu	7 x 12 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	Pembuatan Ruang Tunggu Penumpang ke Wakatobi 2	Desa Mola Utara	12 X 8 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
52.	Pengadaan Marka Jalan	Kel. Mandati II	2 km	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
53.	Beasiswa S1 bagi Putra Putri Wakatobi yang Berprestasi	Kec. Wangsel	25 orang	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
54.	Rehabilitasi Gedung TK	Desa Kapota Utara	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
55.	Pembangunan Gedung TK	Desa Matahora	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
56.	Pembangunan Gedung TK	Desa Wungka	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
57.	Pembangunan Gedung TK	Desa Mola Selatan	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
58.	Pembangunan Gedung TK	Desa One Melangka		APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
59.	Penambahan Buku Paket Mata Pelajaran SLTP Waopu[illegible]enggo	Desa Matahora	500 buah	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
III.	**Kecamatan Kaledupa**						
1.	Pengadaan Talud Pemecahan Ombak	Desa Sombano	1200 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
2.	Pemb. Jalan Usaha Tani	Desa Sombano	2 x 500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
3.	Pengaspalan Dermaga Ambeua	Kel. Ambeua	1 km	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
4.	Rehabilitasi Dermaga Ambeua	Kel. Ambeua	7 x 104 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
5.	Pengadaan Talud Pengaman Jalan	Kel. Ambeua	450 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
6.	Pelebaran Jalan dari Dermaga	Kel. Ambeua	1 km	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
7.	Pengadaan Jalan Titian	Desa Sama Bahari	700 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
8.	Pengaspalan Poros Buranga - Sombano	Desa Ollo	17 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
9.	Pengadaan Drainase	Desa Ollo	800 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
10.	Pengadaan Talud Pengaman Jalan	Desa Ollo	400 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
11.	Pengerasan Sombano Horuo	Desa Horuo	8 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
12.	Pengerasan Horuo - Ollo	Desa Horuo	7 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
13.	Pengadaan Talud Jalan	Desa Balasuna Selatan	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
14.	Tambatan Perahu	Desa Lewuto	250 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
15.	Rehab Gedung Laboratorium SMA Negeri Kaledupa	Desa Lewuto	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Rehab Jembatan Beton	Kel. Lagiwae	6 x 5 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
17.	Pengerasan Jalan Lagiwae Ollo	Kel. Lagiwae	2 Km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
18.	Pengadaan Jalan Titian	Desa Waduri	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
19.	Pengadaan Drainase	Desa Waduri	600 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
20.	Pengadaan Drainase	Desa Ambeua Raya	2 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
21.	Pengerasan Jalan	Desa Ambeua Raya	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
22.	Pengadaan Drainase	Desa Kalimas	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
23.	Pengadaan Jalan Baru Kalimas Balasuna Selatan	Desa Kalimas	7 Km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
24.	Pengadaan Jalan Titian	Desa Balasuna	600 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
25.	Pengadaan Drainase	Desa Balasuna	700 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
26.	Pengadaan Drainase	Desa Buranga	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
27.	Pembangunan Puskesmas Plus	Desa Buranga	1 unit	APBD	Dinas Kesehatan		✓
28.	Pengerasan Jalan Horuo Sombano	Desa Mantigola	8 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
29.	Pengadaan Jalan Titian	Desa Mantigola	3 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
30.	Rehabilitasi Kantor Kelurahan	Desa Laulua	1 unit	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
31.	Pengadaan Talud Jalan	Desa Ollo Selatan	800 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
32.	Rehab Jalan Beton	Desa Ollo Selatan	600 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
33.	Lanjutan Bangunan Kantor Camat	Desa Ambeua	1 unit	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
34.	Lanjutan Pengadaan Pagar Keliling	Desa Ambeua	300 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
35.	Rehab Panggung Rujab	Desa Ambeua	63 m2	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
IV.	**Kecamatan Kaledupa Selatan**						
1.	Penambahan Panjang Dermaga Langge	Desa Langge	50 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
2.	Pemb. Talud Pengaman Pantai	Desa Langge	300 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
3.	Pembangunan Drainase Togo-Togo	Desa Langge	400 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
4.	Pengadaan Pagar Keliling TK Melati	Desa Langge	6 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Pengadaan Gedung Posyandu	Desa Langge	6 x 8 m	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
6.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Sandi	1,5 km 2	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
7.	Pengaspalan Jalan Sandi Pajam	Desa Sandi	2 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
8.	Pembangunan Drainase	Desa Sandi	900 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
9.	Pengaspalan Jalan Poros Kalsel. Kaledupa	Desa Sandi	4 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
10.	Talud Jalan Poros	Desa Sandi	3 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
11.	Pengadaan Jalan Rabat ke Sumur Umum	Desa Sandi	350 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
12.	Pengaspalan Jalan Poros (Kalsel s/d Kaledupa)	Kec. Kalsel	4 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
13.	Pembangunan Jalan Titian Dusun Lohoa	Desa Tanomeha	270 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
14.	Pagar pengaman Jalan Poros Tanomen	Desa Tanomeha	200 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
15.	Pengadaan Drainase	Desa Tanomeha	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
16.	Pengadaan Gedung Posyandu	Desa Tanomeha	1 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
17.	Peng. Pgr. Kelling. SDN Tanomeha &SMAN 2 Kaledupa	Desa Tanomeha	294 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
18.	Pengadaan Tnga. Guru SMA Negeri 2 Kaledupa	Desa Tanomeha	5 orang	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
19.	Pelebaran Jalan Setapak	Desa Tanomeha	300 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
20.	Pengadaan Gedung TK/Mobiler	Desa Lentea	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
21.	Pengadaaan Jalan Usaha Tani	Desa Lentea	3 Km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
22.	Pengadaan Jalan Rabat	Desa Lentea	3 Km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
23.	Penambahan Panjang Dermaga	Desa Lentea	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
24.	Pengadaan Tower	Desa Lentea	3 unit	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
25.	Pengadaan Tenaga Medis	Desa Lentea	10 orang	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
26.	Pengadaan Tenaga Guru TK, SD, SMP	Desa Lentea	6 orang	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
27.	Pengadaan Gedung TK	Desa Lentea	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
28.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa Lentea	6 x 8 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
29.	Penambahan Panjang Dermaga Tambatan Perahu	Desa Darawa	400 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Darawa	320 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
31.	Bantuan Listrik Tenaga Surya	Desa Darawa	150 unit	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
32.	Pengadaan Jamban Keluarga	Desa Darawa	150 unit	APBD	Dinas Kesehatan		✓
33.	Pengerasan Jalan Menuju Pantai Oanujawa	Desa Darawa	300 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
34.	Pengaspalan Jalan Sandi Pajam	Desa Pajam	7 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
35.	Pengadaan Tower	Desa Pajam	10 unit	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
36.	Rabat Jalan Setapak Menuju Gua Lembah Sejah	Desa Pajam	1 paket	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
37.	Pembangunan Talud dari Palea ke Jamaraka	Desa Pajam	300 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
38.	Pengadaan WC umum	Desa Pajam	20 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
39.	Pengadaan Pipa Air	Desa Pajam	1000 m	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
40.	Pengadaan Jalan Rabat	Desa Peropa	3 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
41.	Pemb. Jalan Usaha Tani	Desa Peropa	1,2 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
42.	Pemb. Tanggul Pelindung Perahu	Desa Peropa	300 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
43.	Pengadaan Pagar Keliling SDN Peropa	Desa Peropa	200 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
44.	Pengadaan Pipa Sanitasi Air Bersih/Tawar	Desa Peropa	200 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
45.	Perintisan /Pengerasan Jalan Tampara-Kasuwari-Peropa	Desa Kasuwari	2 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
46.	Pengadaan Tenaga Guru TK	Desa Kasuwari	2 orang	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
47.	Pengadaan Tenaga Medis	Desa Kasuwari	3 orang	APBD	Dinas Kesehatan		✓
48.	Pembangunan Dermaga Tambatan Perahu	Desa Kasuwari	400 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
49.	Pengadaan Rabat Beton ke Lokasi Piknik	Desa Kasuwari	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
50.	Pagar Keliling SMPN 3 Kaledupa	Desa Kasuwari	500 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
51.	PengaspalanTampara-Balasuna	Desa Kasuwari	2 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
52.	Drainase Jalan Poros Tampara	Desa Tampara	4 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
53.	Pemb. Jalan Usaha Tani	Desa Tampara	300 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
54.	Pemb. Jalan Rabat Beton	Desa Tampara	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	Penambahan Tenaga Guru MAS	Desa Tampara	2 orang	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
56.	Pengadaan Tenaga Medis	Desa Tampara	10 orang	APBD	Diknas Kesehatan	✓	
57.	Pengadaan Pagar Keliling SDN Teewali	Desa Tampara	200 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
V.	**Kecamatan Tomia**						
1.	Pembangunan Gedung TK	Desa Teemoane	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
2.	Pembangunan Gedung TK	Desa Runduma	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
3.	Pembangunan Gedung PAUD	Desa Kollosoha	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
4.	Pembangunan Gedung PAUD	Kel. Waha	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
5.	Rehab lantai Gedung SDN 2 Waha	Kel. Onemay	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
6.	Pembangunan Pagar Permanen Keliling SDN 1 Waha	Kel. Onemay	4 RKB	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
7.	Pembangunan Pagar Permanen Keliling SDN 2 Waha	Kel. Onemay	250 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
8.	Pembangunan Pagar Permanen Keliling SDN 3 Waha	Kel. Waha	170 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
9.	Pemb. Pagar Permanen Kliling TK Dharmawanita Kecamatan	Kel. Waha	200 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
10.	Pembangunan Pagar Permanen Keliling SMP 2 Tomia	Kel. Waha	50 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
11.	Pembngnan Pagar Permanen Keliling SDN 3 Tanawali	Kel. Waha	100 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
12.	Pembngnan Pagar Permanen Keliling SDN Lamanggau	Desa Lamanggau	100 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
13.	Pemb. Pgr. Permanen Kellg TK Dharmawanita Ds. Waitii	Desa Waitii Timur	200 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
14.	Pembngnan Pagar Permanen Kelilling SDN Teemoane	Desa Waitii	50 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
15.	Pembangunan Pagar Permanen Kelilling MTS Tomia	Desa Teemoane	400 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
16.	Rehab Berat Gedung SMP 2 Tomia	Kel. Waha	500 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
17.	Rehab Gedung MTS Tomia	Desa Waitii Timur	5 RKB	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
18.	Tambahan RKB SDN Lamanggau	Desa Teemoane	3 RKB	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
19.	Pengadaan Perumahan guru SDN Lamanggau	Desa Lamanggau	1 RKB	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
20.	Pengadaan Perumahan SMP 1 Atap Lamanggau	Desa Lamanggau	2 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
21.	Pengadaan Kantor SDN Teemoane	Desa Lamanggau	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Tambahan Tenaga Guru PNS SDN Runduma	Desa Teemoane	5 orang	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
23.	Tambahan Tenaga Guru PNS SMP 1 Atap Runduma	Desa Runduma	2 orang	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
24.	Pengadaan SD Kecil Desa Patua II	Desa Runduma	2 orang	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
25.	Pengadaan SMP	Desa Patua II		APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
26.	Pengadaan Posyandu	Desa Patua	1 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
27.	Pengadaan Posyandu	Kel. Onemay	1 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
28.	Pengadaan Posyandu	Kel. Waha	1 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
29.	Pengadaan Posyandu	Desa Patua II	2 unit	APBD	Dinas Kesehatan		✓
30.	Pembangunan Puskesmas	Desa Patua	2 unit	APBD	Dinas Kesehatan		✓
31.	Penempatan Tenaga Medis dan Bidan Desa	Desa Runduma	4 orang	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
32.	Penempatan Tenaga Medis dan Bidan Desa	Desa Wai tii	2 orang	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
33.	Penempatan Tenaga Medis dan Bidan Desa	Desa Lamanggau	2 Orang	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
34.	Rehab Gedung Perawatan Puskesmas Tomia	Kel. Onemay	1 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
35.	Rehab Perumahan Paramedis Puskesmas	Kel. Onemay	1 unit	APBD	Dinas Kesehatan		✓
36.	Pengdan. Sarana Tmpt tidur Rawat Inap Puskesmas Tomia	Kel. Onemay	3 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
37.	Pengaspalan Pelebaran Lintas Poros Tomia - Tomia Timur	Tomia-Tomia Timur	9 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
38.	Perintisan Jalan Baru di Atas Tebing	Kel.Waha-Kel.Onemay	2,5 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
39.	Rehab Berat Dermaga Kec.Tomia	Kelurahan Waha	100 m		Din.Perhub. Kominfo		✓
40.	Rehab Dermaga Waitii	Desa Waitii	70 m x 6 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
41.	Pembangunan Talud Abrasi Pantai	Desa Waitii	40 m x 3 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
42.	Pembangunan Talud Abrasi Pantai	Kel.Waha	200 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
43.	Pembangunan Talud Abrasi Pantai	Kel. Onemay	200 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
44.	Pembangunan Talud Abrasi Pantai	Desa Runduma	20 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
45.	Pembangunan Talud Abrasi Pantai	Desa Kollosoha	300 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	Pembangunan Talud Abrasi Pantai	Desa Lamanggau	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
47.	Pembangunan Talud Abrasi Pantai	Desa Waitii Barat	300 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
48.	Rehab Berat Dermaga Panjang Pelabuhan Luar Kec Tomia	Kelurahan Waha	400 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
49.	Peningkatan Dermaga	Desa Waitii	100 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
50.	Pembangunan Tambatan Perahu	Desa Lamanggau	20 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
51.	Pengadaan Tambatan Perahu	Desa Teemoane	35 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
52.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa Waitii	300 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
53.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa Waitii Barat	350 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
54.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa Lamanggau	800 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
55.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa Teemoane	400 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
56.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa Kollosoha	500 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
57.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Kel. Waha	500 m x 1,5 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
58.	Pemb. Rabat Jalan Usaha Tani	Desa Lamanggau	500 m x 1,5 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
59.	Rabat Jalan Usaha Tani	Desa Patua	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
60.	Rabat Jalan Usaha Tani	Desa Waitii	800 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
61.	Rabat Jalan Usaha Tani	Desa Rundum	2 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
62.	Lanjutan Pembangunan Drainase	Kel. Waha	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
63.	Lanjutan Pembangunan Drainase	Kel. Onemay	350 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
64.	Rabat Keliling Lapangan Sepak Bola Baskara Jaya	Kel. Waha	300 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
65.	Pengaspalan Jalan Poros Wewa	Tomia-Tomia Timur	10 km	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
66.	Pemb. Rabat Tangga Pendakian ke Kebun	Kel. Waha	30 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
67.	Pemb. Rabat Tangga Pendakian	Desa Waitii Barat	75 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
68.	Pemb. Rabat Tangga Pendakian	Desa Teemoane	20 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
69.	Pengaspalan Jalan Tangga Pendakian Onemay-Patua I	Kel. Onemay	60m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
70.	Pendalaman Alur Masuk Keluar Pelabuhan Tomia	Kel. Waha	500 m x 75 cm	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	Pendalaman Alur Masuk Keluar Pelabuhan Waitii	Desa Waitii	150 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
72.	Pendalaman Alur Lalu Lintas Hubungan Laut antar Desa	Desa Runduma	151 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
VI.	**Kecamatan Tomia Timur**						
1.	Pengaspalan Jalan Kahianga - Usuku	Tong.Barat- Kahianga	5,5 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
2.	Pengaspalan Jalan SMA 2 Tomia	Kel. Tongano Timur	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
3.	Pendalaman Alur Masuk-Keluar Pelabuhan Usuku	Kel. Tongano Timur	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
4.	Lanjutan Pembangunan Talud	Kel. Bahari	200 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
5.	Pengadaan Pagar Pengaman Tanjakan Bahari	Kel. Bahari	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
6.	Rehabilitasi Dermaga Patipelong	Kel. Bahari	200 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
7.	Pengadaan Rambu Suar	Kel. Patipelong	120 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
8.	Pembuatan Talud Pantai Huuntete	Kel. Bahari	5 buah	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
9.	Pengadaan Kantor UPTD Diknas Kec.	Kel. Bahari	1 km	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
10.	Pengadaan Tambahan RKB SMA 2 Tomia	Kel. Tongano Timur	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
11.	Rehab Berat gedung SMP Negeri 1 Tomia	Kel. Tongano Timur	9 RKB	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
12.	Penataan Lapangan Sepakbola Usuku	Kel. Tongano Timur	6 RKB	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
13.	Pengadaan Kantor SMA 2 Tomia	Kel. Tongano Timur	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
14.	Pengadaan Perpustakaan SMA 2 Tomia	Kel. Tongano Timur	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
15.	Pengadaan Pagar keliling SMA 2 Tomia	Kel. Tongano Timur	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
16.	Pengadaan Aula Pertemuan SMA 2 Tomia	Kel. Tongano Timur	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
17.	Pengadaan Buku-buku Perpustakaan	Kel. Tongano Timur	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
18.	Pagar keliling SDN 3 Usuku	Kel. Patipelong	1000 jadi	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
19.	Pengadaan Bangunan TK	Kel. Tongano Timur	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
20.	Pemasangan Instalasi Gedung TK Tiroau	Kel. Tongano Timur	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
21.	Pagar Keliling TK	Desa Timu	1 paket	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
22.	Pagar Keliling TK Tiroau	Kel. Bahari	50 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Pengadaan Alat-alat Olahraga SD, SMP, SMA	Desa Timu	150 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
24.	Pengadan Mebeulair Poskesdes	Tersebar	17 set	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
25.	Pengadan Tabung Oksigen dan Reguler	Tersebar	9 paket	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
26.	Pengadaan Pagar Kelilin[illegible] Puskesmas Usuku	Kel. Tongano Barat	300 m	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
27.	Pengadaan Generator Puskesmas	Kel. Tongano Barat	1 buah	APBD	Dinas Kesehatan		✓
28.	Pengadaan Pagar Kelililing Puskesmas Kulati	Desa Kulati	200 m	APBD	Dinas Kesehatan		✓
29.	Tambahan Ruang Perawatan Puskesmas Usuku	Kel. Tongano Barat	2 ruang	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
30.	Pengadaan Rumah Dokter Puskesmas Kulati	Desa Kulati	2 lokal	APBD	Dinas Kesehatan		✓
VII.	**Kecamatan Binongko**						
1.	Pengaspalan Jalan Raya Palahidu ke Palahidu Barat	Kel. Palahidu	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
2.	Pengadaan Jalan Baru ke Keraton Watiu	Kel. Palahidu	2,7 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
3.	Pengaspln Jln dr Rujab cmt Binongko ke Drmg. Lamededi	Kel. Palahidu	2,7 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
4.	Pengadaan Sarana Penyulingan Air Bersih	Kel. Palahidu	150 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
5.	Rehab Dermaga Lameci	Kel. Palahidu	1 paket	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
6.	Rehab Benteng Perahu	Kel. Palahidu	1 paket	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
7.	Pengadaan Dermaga Bongkar Muat	Kel. Palahidu	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
8.	Pemecah Ombak Pelabuhan Rukuwa	Kel. Palahidu	1 paket	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
9.	Pengadaan Pagar Jalan Pinggir Pantai dan Taman	Kel. Palahidu	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
10.	Tambahan Tenaga Guru SMA 1 Binongko	Kel. Palahidu	5 orang	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	✓
11.	Rehab Perumahan Paramedis	Kel. Palahidu	2 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
12.	Rehab Perumahan Dokter	Kel. Palahidu	1 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
13.	Pengadaan Listrik Tenaga Surya	Kel. Palahidu	150 buah	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
14.	Peningkatan Talud Abrasi Pantai	Kel. Rukuwa	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
15.	Penambahan Benteng Perahu	Desa Wali	500 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
16.	Rehab Benteng Perahu	Desa Wali	100 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Pemb. Jalan Rabat beton	Desa Wali	50 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
18.	Pengaspalan Jalan	Desa Wali	3 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
19.	Pembukaan Jalan Baru	Desa Wali	1,5 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
20.	Pemagaran Benteng Keraton	Desa Wali	3 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
21.	Rabat beton Jalan Lingkar Desa	Desa Wali	1,5 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
22.	Penambahan Tenaga Kesehatan	Desa Makoro	8 Orang	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
23.	Pengadaan Dermaga	Desa Makoro	100 m	APBD	Dinas Kesehatan		✓
24.	pengadaan Benteng Perahu	Jaya Makmur	1 paket	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
25.	Rehab Benteng Perahu	Jaya Makmur	75 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
26.	Pendalaman Alur Masuk Pelabuhan	Kel.Taipabu	200 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
27.	Pengadaan Tambatan Perahu	Kel. Taipabu	1 paket	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
28.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Desa Lagongga	40 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
29.	Pemb. Tambatan Perahu	Desa Lagongga	300 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
30.	Pengadan Talud Pengaman Pantai	Desa Kampo-kampo	150 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
31.	Pengadaan Jalan Tani	Desa Kampo-kampo	250 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
32.	Pengadaan Tambatan Perahu	Desa Kampo-kampo	500 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo		✓
33.	Pembukaan Jalan Baru	Desa Palahidu Barat	51 m	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
34.	Perpipaan Untuk Sarana Air Bersih	Desa Palahidu Barat	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
35.	Pembangunan MCK Umum	Desa Palahidu Barat	5 unit	APBD	Dinas Kesehatan		✓
36.	Pembangunan Drainase	Desa Palahidu Barat	60 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
37.	Pemb. Jalan Rabat ke Sumur Umum	Desa Tanjung	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
38.	Pemb. Jalan Usaha Tani	Desa Tanjung	500 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
39.	Perintisan Jalan	Desa Tanjung	1 km	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
40.	Pengadaan Gedung TK	Desa Tanjung	6 x 8 m	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
41.	Pengadaan Jembatan Tambatan Perahu	Desa Tanjung	40 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	✓

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
UNIVERSITAS TERBUKA
40605.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8
VIII.	**Kecamatan Togo Binongko**						
1.	Rehab Lapangan Bola	Kelurahan Popalia	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
2.	Penambahan RKB SDN 3 Popalia	Kelurahan Popalia	1 paket	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
3.	Pembangunan Kantor SDN 3 Popalia	Kelurahan Sowa	6 RKB	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
4.	Pembangunan WC/Kamar Mandi SDN 3 Popalia	Kelurahan Sowa	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
5.	Pemb. Rumah Dinas Ka. Sekolah dan Guru SDN 3 Popalia	Kelurahan Sowa	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
6.	Pembangunan Kantor MAS Waloindi	Kelurahan Sowa	2 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
7.	Rehab Lapangan Bola Kaki	Desa Waloindi	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
8.	Tambahan Guru SD	Desa Oihu	6 orang	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
9.	Pengadaan Plafon SDN Haka	Desa Oihu	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
10.	Pemb. Gedung UPTD Diknas Kec.Togo Binongko	Desa Haka	1 paket	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
11.	Tambahan Guru Bidang Studi SLTPN 2 Binongko	Kec. Togo Binongko	6 orang	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
12.	Tenaga Pengajar SMA Negeri 1 Togo Binongko	Kec. Togo Binongko	6 orang	APBD	Diknas, Pmd & Olga	✓	
13.	Pembangunan Kantor SMA Negeri 1 Togo Binongko	Kec. Togo Binongko	15 orang	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
14.	Balai Posyandu Setiap Lingkungan	Kec. Togo Binongko	1 unit	APBD	Diknas, Pmd & Olga		✓
15.	Pembangunan Gedung Puskesmas	Kel. Sowa	3 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
16.	Pembangunan Jamban/WC Umum	Kel. Sowa	1 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
17.	Rehabilitasi Pustu	Kel. Sowa	1 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
18.	Penempatan Tenaga Medis Pustu	Desa Waloindi	6 Orang	APBD	Dinas Kesehatan		✓
19.	Pembangunan Jamban/WC Umum	Desa Oihu	20 unit	APBD	Dinas Kesehatan		✓
20.	Pengadaan Ambulans Puskesmas	Desa Haka	1 unit	APBD	Dinas Kesehatan		✓
21.	Rabat Jalan	Pusk Kec. T. Binongko	1 unit	APBD	Dinas Kesehatan	✓	
22.	Rehabilitas Pipa Air	Kel. Popalia	500 m	APBD			✓
23.	Pembangunan Tanggul/Talud	Kel. Sowa	1 paket	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	
24.	Pengaspalan Jalan Poros Mulai Taipabu sampai Haka	Kel. Sowa	500 m	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Rabat Jalan Alternatif	Kel. Sowa	10 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	✓
26.	Pengadaan Listrik Tenaga Surya	Desa Waloindi	250 unit	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
27.	Penambahan Jaringan Pipa	Desa Waloindi	2 km	APBD	Dinas PU, Pertamben	✓	✓
28.	Pengadaan Listrik Tenaga Surya	Desa Oihu	250 unit	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
29.	Pengadaan Reversa Osmosis (Air Laut Menjadi Air Tawar)	Desa Oihu	150 unit	APBD	Dinas PU, Pertamben		✓
30.	Pembangunan Dermaga	Desa Haka	30 m	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	
31.	Pembangunan Dermaga	Kec. Togo Binongko	1 unit	APBD	Din.Perhub. Kominfo	✓	✓

Sumber data diolah:

1. Bappeda Kabupaten Wakatobi,
2. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi.
3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi.

UNIVERSITAS TERBUKA

40605.pdf

Lampiran 6

FOTO-FOTO SAAT WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN TENTANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN MUSRENBANG KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2008



Foto bersama dengan salah seorang Tokoh LSM di Kabupaten Wakatobi pada saat melakukan wawancara tentang Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi Tahun 2008



Foto bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi pada saat melakukan wawancara tentang Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi Tahun 2008



Foto bersama dengan salah seorang Tokoh Masyarakat Kabupaten Wakatobi pada saat melakukan wawancara tentang Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi Tahun 2008

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka